



PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 11 TAHUN 2023

Tentang

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2023**





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimana perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan sub. Kegiatan RKPD serta keadaan dimana saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2023.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 34) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

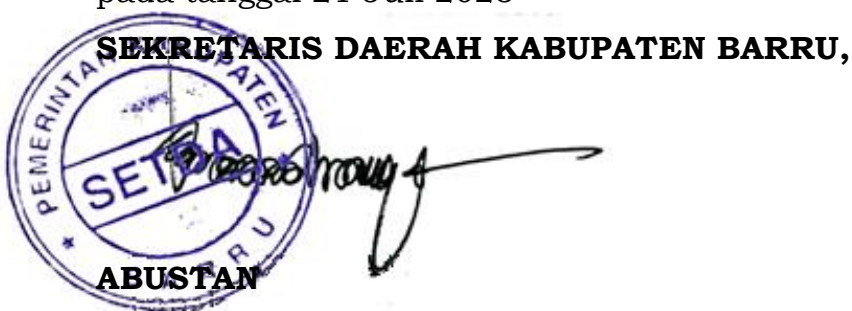
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 21 Juli 2023



Diundangkan di Barru
pada tanggal 21 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 11

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR GRAFIK viii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

1.4 Maksud dan Tujuan I-6

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-9

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II

TAHUN 2023 II-1

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro II-1

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-1

2.1.2. Tingkat Kemiskinan II-4

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka II-7

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi II-9

2.1.5. PDRB Perkapita II-11

2.1.6. Rasio Gini II-12

2.1.7. Nilai SAKIP II-14

2.2 Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja II-15

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan..... II-17

2.3.1. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan
dan Sub Kegiatan..... II-17

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Urusan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) II-19

2.3.3. Capaian Kinerja Pendanaan II-21

2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi
Pelaksanaan RKPD 2023 II-26

2.4.1. Hambatan dan Kendala pelaksanaan RKPD
Tahun 2023 II-26

2.4.2. Upaya-upaya Pencapaian Pelaksanaan RKPD
Tahun 2023 II-26

BAB III.	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGANDAERAH	III-1
3.1	Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro	III-1
3.1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-1
3.1.1.2.	Inflasi	III-4
3.1.1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III-7
3.1.1.4.	Tingkat Kemiskinan	III-10
3.1.1.5.	Ratio Gini	III-13
3.1.1.6.	Pendapatan Per Kapita	III-16
3.1.1.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-18
3.2	Tantangan Perekonomian Daerah	III-21
3.2.1.	Aspek Eksternal.....	III-21
3.2.2.	Aspek Internal.....	III-22
3.2.3.	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru	III-23
3.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-24
3.3.1.	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.3.1.1.	Perubahan Pendapatan Asli Daerah	III-26
3.3.1.2.	Perubahan Pendapatan Transfer	III-31
3.3.1.3.	Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	III-32
3.3.2.	Perubahan Belanja Daerah	III-33
3.3.2.1.	Perubahan Belanja Operasi	III-34
3.3.2.2.	Perubahan Belanja Modal	III-36
3.3.2.3.	Perubahan Belanja Tidak Terduga	III-37
3.3.2.4.	Perubahan Belanja Transfer	III-38
3.3.3.	Perubahan Pembiayaan Daerah	III-38
3.3.3.1.	Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	III-39
3.3.3.2.	Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	III-40
BAB IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-10
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-15
4.2.1.1.	Tema Pembangunan Nasional	IV-15
4.2.1.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	IV-12
4.2.1.3.	Arah Kebijakan dan Strategi	

	Pembangunan Nasional	IV-22
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-29
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru	III-33
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1 Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2023	V-1
	5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023	V-2
	5.3 Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk Perubahan Tahun 2023	V-16
BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
	6.1 Indikator Makro Pembangunan	VI-1
	6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
	6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-4
	6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)	VI-19
	6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VI-21
BAB VII.	PENUTUP.....	VII-1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru	I-2
Tabel 2.1	Indikator Makro Kab. Barru Tahun 2023	II-1
Tabel 2.2	Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kab. Barru Tahun 2018 – 2022	II-4
Tabel 2.3	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan di Kab. Barru Tahun 2018 – 2022	II-5
Table 2.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Barru Dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Barru Tahun 2018-2022..	II-8
Tabel 2.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Barru dengan wilayah setara	II-9
Tabel 2.7	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-11
Tabel 2.8	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-13
Tabel 2.9	Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Barru Tahun 2021- 2022	II-14
Tabel 2.10	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kab. Barru sampai dengan Semester I Tahun 2022	II-15
Tabel 2.11	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan RKPD Pokok Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023	II-17
Tabel 2.12	Realisasi Capain Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023	II-19
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Program, Kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-23

Tabel 3.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023	III-25
Tabel 3.2	Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023	III-34
Tabel 3.3	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023	III-39
Tabel 4.1	Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021 – 2026	IV-4
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021 – 2026	IV-5
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023	IV-7
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan, Permasalahan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Barru	IV-11
Tabel 4.5	Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran /Kegiatan Prioritas Nasional	IV-12
Tabel 4.6	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-13
Tabel 4.7	Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-15
Tabel 4.8	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-30
Tabel 4.9	Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.10	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Barru	IV-34
Tabel 4.11	Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2023	IV-35
Tabel 4.12	Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023	IV-36
Tabel 5.1	Rincian Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2023...	V-2
Tabel 5.2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023	V-3
Tabel 5.3	Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024	V-17

Tabel 6.1	Target Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2023 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kabupaten Barru	VI-2
Tabel 6.3	Penetapan Perubahan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 Kabupaten Barru	VI-4
Tabel 6.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023	VI-20
Tabel 6.5	Penetapan Target Indikator TPB/ SDG's Kabupaten Barru Tahun 2022	VI-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penyusunan Tema Pembangunan Nasional
 Tahun 2023 IV-16

Gambar 4.2 Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
 Berkelanjutan IV-17

Gambar 4.3 Ekonomi Inklusif IV-18

Gambar 4.4 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023 IV-19

Gambar 4.5 Sasaran Pembangunan Nasional IV-20

Gambar 4.6 Tema RKP Tahun 2023 IV-21

Gambar 4.7 Arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 IV-22

Gambar 4.8 Perintis Pembangunan Nasional 2023 IV-23

Gambar 4.9 Highlight Major Project RKP Tahun 2023 IV-28

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-2
Grafik	2.2	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan capaian Propinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-3
Grafik	2.3	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-3
Grafik	2.4	Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-6
Grafik	2.5	Perbandingan Persentase penduduk miskin Kabupaten Barru dengan capaian propinsi Sulsel dan Nasional ...	II-6
Grafik	2.6	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kab. Barru dengan capaian Propinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-8
Grafik	2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II-10
Grafik	2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-10
Grafik	2.9	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)	II-12
Grafik	2.10	Perbandingan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sul-Sel dan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-13
Grafik	3.1	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Triwulan I Tahun 2023	III-2
Grafik	3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru . Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian	

		Tahun 2022	III-4
Grafik	3.3	Inflasi Sulawesi Selatan. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Triwulan II Tahun 2023	III-6
Grafik	3.4	Inflasi Kabupaten Barru. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Tahun 2022	III-7
Grafik	3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Priode Februari Tahun 2023 (persen)	III-9
Grafik	3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru. Target RPJMD Tahun 2021-2026, Target RKPD Pokok Tahun 2023, dan Capaian Tahun 2022 (persen)	III-10
Grafik	3.7	Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023 , Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Periode Maret Tahun 2023	III-12
Grafik	3.8	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru. Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan capaian Tahun 2022	III-13
Grafik	3.9	Ratio Gini Kabupaten Barru. Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Tahun 2022	III-16

Grafik	3.10	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Barru. Target RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan capaian Tahun 2021	III-17
Grafik	3.11	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru. Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021	III-20
Grafik	4.1	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas	III-20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan tahun awal efektifitas pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Barru, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2023.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2023 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil

evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global covid-19, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM

Indikator makro pembangunan Kabupaten Barru didasari dari indikator Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Adapun target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2023 yaitu :

Tabel 1.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan I Tahun 2023	Target Tahun 2023	Target RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,53	71,53	72,16	72,57
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,35	69,35	69,35	69,35
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,25	8,25	8,77	8,84
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,61	13,61	13,62	13,63
	• Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	Ribu Rupiah/Orang	11,27	11,27	11.37	11.43
2	Kemiskinan					
	• Tingkat Kemiskinan	%	8,4	8,4	6,67	6,41
	• Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	14.730	14.730	11.696	11.240
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka/ nilai	0,070	0,070	0.055	0.053
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,32	5,31	5,14
	• Jumlah Penganggur	jiwa	4.495	4.495	4.484	4.341
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,11	5,91	6,64
5	PDRB Perkapita					
	• ADHB	Juta Rp	47,50	47,50	48,5	51
	• ADHK	Juta Rp	28,51	28,51	47,50	50,92
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,36	0,34	0,33

Sumber data : BPS Kab.Barru dan RPJMD Kab Barru 2021-2026

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19 menyebabkan adanya beberapa kebijakan terkait pengalokasian anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Pengalokasian anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk fokus dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dinamika perubahan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran menyebabkan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran harus diselaraskan dan disesuaikan, munculnya Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yang kesemuanya merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi hal mendasar untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan.

Kondisi-kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan RKPD, dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dan berdasarkan pasal 345 disebutkan bahwa tahapan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 disusun dengan tahapan : (a) penyusunan rancangan perubahan RKPD, (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, dan (c) penetapan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan

- Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Barru tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dan dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
- c) Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RENJA-PD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. Memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2023;
- c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, hal hal yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan RKPD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bagian ini memperlihatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II berdasarkan Program, Kegiatan, Indikator, Target, Lokasi, dan Anggaran.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan tahun berikutnya, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan triwulan II tahun berjalan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp. 5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp. 2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK- P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen

Indikator makro pembangunan Kabupaten Barru didasari atas indikator pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Adapun target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2023:

Tabel. 2.1
Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,53	72,57
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,4	6,41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,14
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	6,64
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	47,50	50,92
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,33

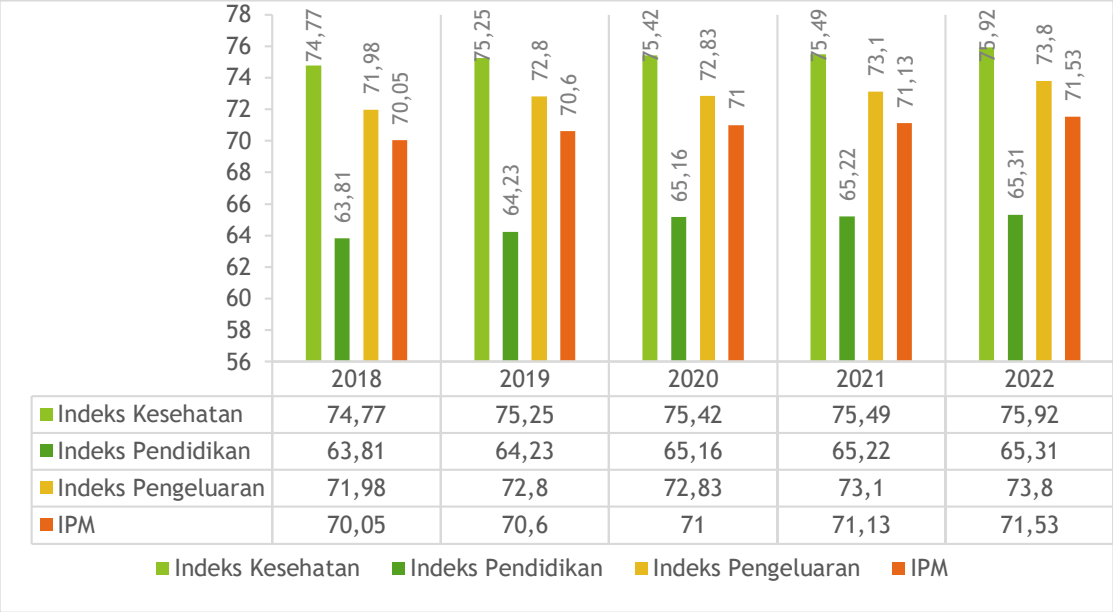
Sumber data : BPS Kab.Barru Tahun 2023 dan Bappelitbangda 2023

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator IPM meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Perkembangan IPM Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Barru sebesar 70,05 persen, terus mengalami kenaikan hingga di angka 71,53 persen di tahun 2022.

Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru
Tahun 2018-2022



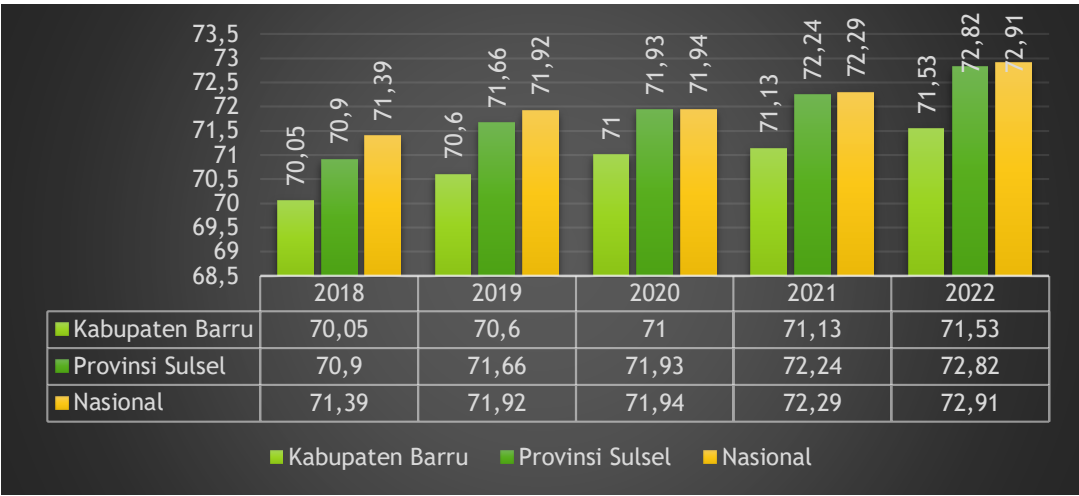
Sumber :Kabupaten Barru dalam Angka 2023

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih

berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.2

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022



Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM tahun 2022 berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Untuk wilayah Sulawesi Selatan posisi

IPM Kabupaten Barru tetap berada pada posisi 8 diantara 24 Kabupaten/Kota, posisi yang sama dengan tahun 2021.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	68.60	68,91	69,02	69,07	69.35
2	Harapan Lama Sekolah	13.56	13,57	13,58	13,59	13.61
3	Rata-rata Lama Sekolah	7.86	7,96	8,23	8,24	8.25
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10.62	10,91	10,92	11,02	11.27
IPM		69.07	69.56	69,56	71,13	71,53

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2023

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru.

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index,

maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan	garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan))
2	2018	15.680	173.451	9,04	307,904
3	2019	14.920	182.373	8,57	322,248
4	2020	14.440	187.392	8,26	337,047
5	2021	15.180	189.377	8,68	351,924
6	2022	14.730	191.895	8,40	368,160

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru.

Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang

menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka tahun 2023

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuatif, sementara pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.5
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/ Kota	2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
1	Kab. Barru	9,04	1,43	0,32	8,57	1,07	0,21	8,26	1,31	0,36	8.68	1.52	0.39	8,40	0,98	0,15
2	Kota Pare-pare	5,59	0,75	0,17	5,26	0,71	0,15	5,44	0,94	0,24	5.40	0.72	0.13	3,45	0,56	0,09
3	Kab. Soppeng	7,50	1,39	0,37	7,25	0,69	0,12	7,59	0,83	0,16	7.53	1.24	0.28	7,49	0,06	0,21
4	Kab.Sidrap	5,16	0,94	0,23	4,79	0,60	0,13	5,05	0,82	0,19	5.04	0.64	0.13	5,11	0,06	0,21
5	Kab. Pangkep	15,10	3,12	0,92	14,06	1,81	0,31	13,96	2,52	0,71	14.28	2.78	0.78	6,05	2,09	0,49
6	Kab. Bone	10,44	1,44	0,30	10,06	1.35	0,29	10,68	1.59	0,36	10.52	1.67	0.42	10,58	1,35	0,26

Sumber : BPS Tahun 2023

Dari tabel di atas, persentase penduduk miskin Kabupaten Barru di tahun 2022 berada pada posisi kedua paling bawah setelah Kabupaten Bone. Namun untuk indeks kedalaman kemiskinan berada pada urutan ke empat, masih lebih baik dari Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Untuk indeks keparahan kemiskinan, Kabupaten Barru di tahun 2022 berada pada urutan kedua setelah Kota Parepare.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

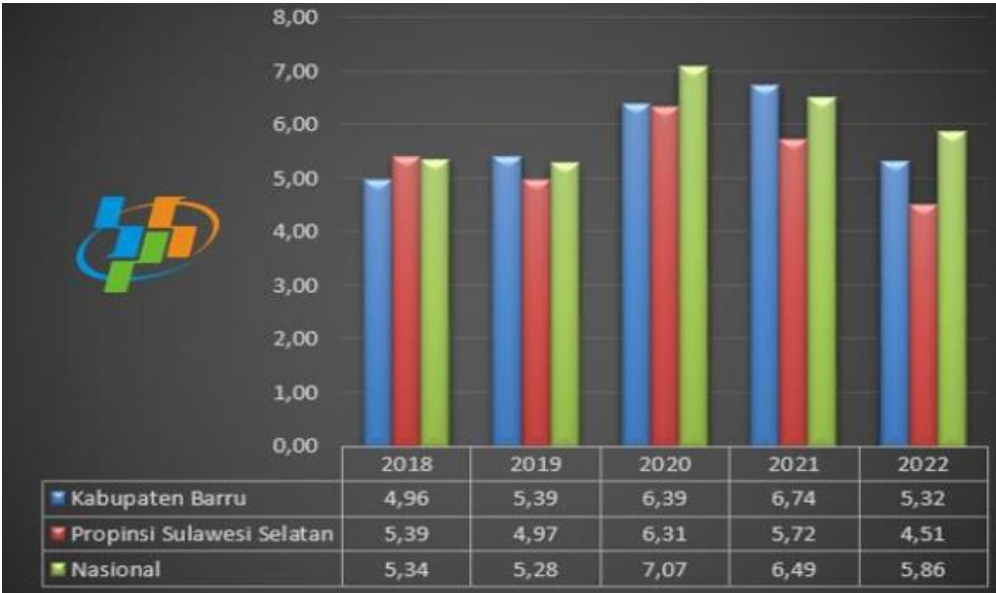
Tabel 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barru Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	56,73	58,55	57,18	58,14	62,36
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,38	5,79	6,39	6,74	5,32

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

TPT di Kabupaten Barru terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,74% dan pengangguran terendah pada tahun 2022 yaitu hanya 5,32%, hal ini dipicu karena banyaknya pekerja dari luar Kabupaten Barru yang dirumahkan kembali ke kampung halaman (Kabupaten Barru) sehingga mempengaruhi angka 3 tahun terakhir.

Grafik 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan
Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023, Provinsi Sulsel dalam Angka Tahun 2023, Statistik Indonesia Tahun 2023

Dari grafik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Namun untuk TPT Kabupaten Barru di tahun 2022 masih lebih baik dibandingkan capaian nasional namun lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru
dengan wilayah setara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	4,96	5,39	6.39	6,74	6,74
2	Kota Pare-pare	6,36	6,17	7.14	6,72	6,72
3	Kab. Soppeng	2.36	3,24	4.42	3,92	3,92
4	Kab.Sidrap	4.29	4.35	5.91	4,93	4,93
5	Kab. Pangkep	6.13	4,99	5.18	5,86	5,86
6	Kab. Bone	2.56	3,01	3.20	4,15	4,15

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2023

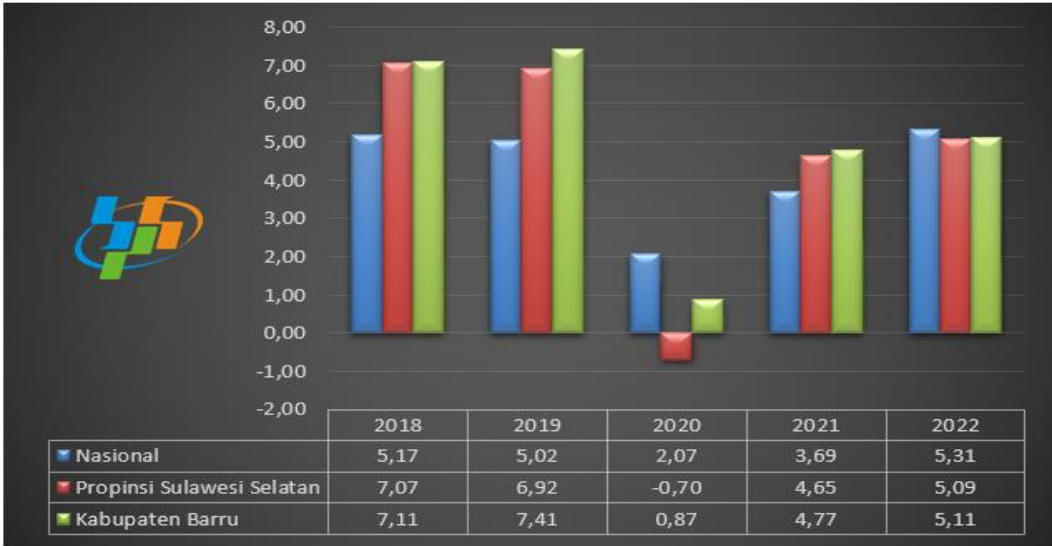
Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian TPT Kabupaten Barru di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada di urutan tengah dibandingkan wilayah setara di sekitarnya. Namun pada tahun 2021 dan 2022 capaian TPT Kabupaten Barru berada pada posisi paling buncit dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitarnya

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatannya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sejak tahun 2020 hingga 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih tinggi pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2022. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 5,11 setelah di tahun 2020 mengalami resesi pada angka 0,87 akibat pandemi covid 19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid19 di tahun 2021 pelan-pelan memperlihatkan trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional hingga ke daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru untuk selanjutnya disajikan dalam Grafik 2.1

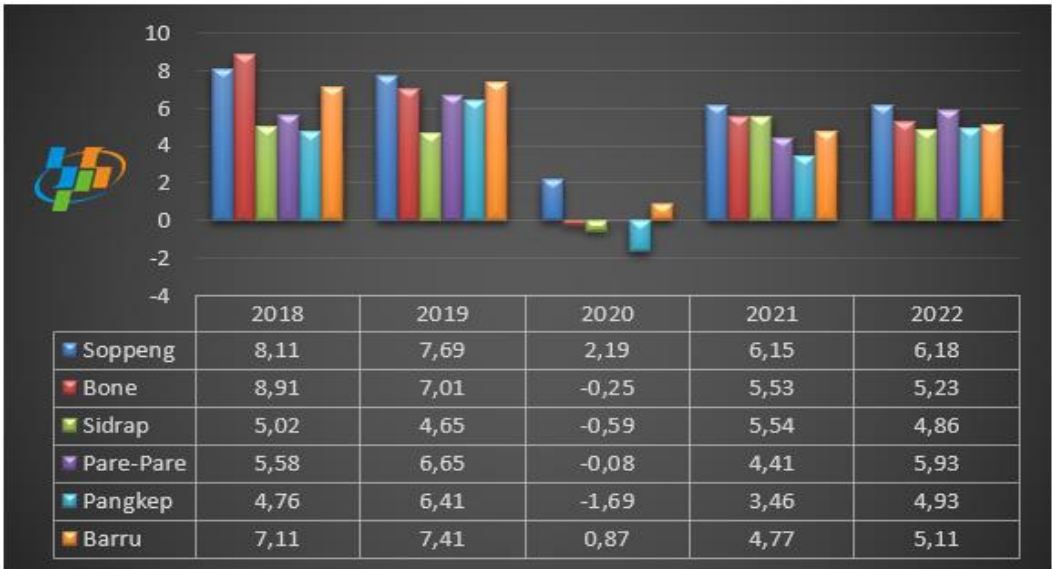
Grafik 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023, Provinsi Sulsel dalam Angka Tahun 2023, Statistik Indonesia Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru dari tahun 2020 - 2022 secara gradual mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif. Untuk Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan
Wilayah Sekitar Tahun 2012 - 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

2.1.5 PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

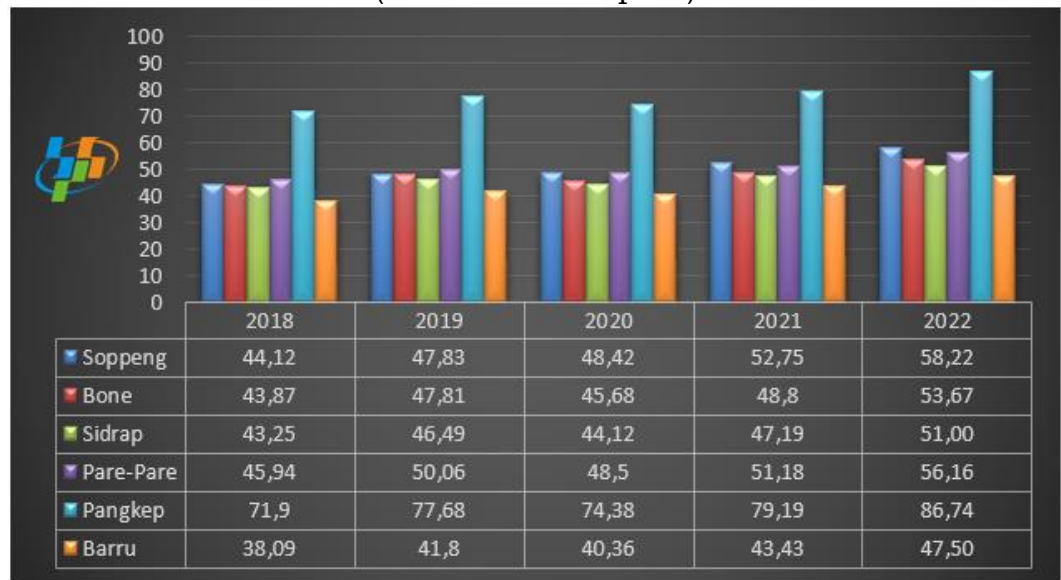
Tabel 2.7
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Barru Tahun 2018-2022

Tahun	ADHB (Rp.)	ADHK (Rp.)
2018	38.094.607	25.725.509
2019	41.711.191	27.520.350
2020	42.472.955	27.653.853
2021	43.429.469	27.327.826
2022	47.500.758	28.512.702

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK) dan atas dasar harga Berlaku (HB) mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai tahun 2022. kondisi pandemi covid19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita di tahun 2021, sehingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK). Peningkatan signifikan dalam periode tahun 2018-2022 terjadi pada tahun 2022 yang mana capaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 47,5 juta. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.9
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)
Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 s.d Tahun 2022
(dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS Tahun 2023

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

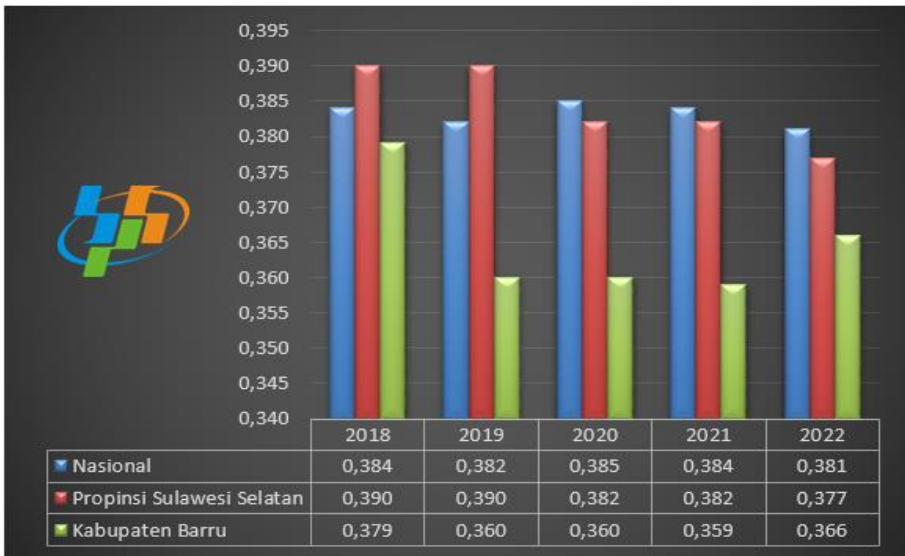
2.1.6 Rasio Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Rasio Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 2. 0.4 <GR<0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang(Moderat)
- 3. GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2018 hingga tahun 2021 stagnan di kisaran 0,360 tapi meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 0.366.

Tabel 2.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	0,379	0,360	0,360	0,359	0,366
2	Kota Pare-pare	0,382	0,350	0,373	0,381	0,379
3	Kab. Soppeng	0,359	0,392	0,357	0,406	0,386
4	Kab.Sidrap	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354
5	Kab. Pangkep	0,321	0,328	0,345	0,363	0,334
6	Kab. Bone	0,412	0,366	0,404	0,383	0,376

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada periode tahun 2018-2022, pada periode tahun 2018-2021 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2018 – tahun 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Upaya pemerintah Kabupaten barru dalam

menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahun 2022 indeks gini kabupaten barru mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

2.1.7 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 57,34 atau predikat CC. hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berotientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Perencanaan Kinerja	30	21,33	21,79
B	Pengukuran Kinerja	25	11,32	15,07
C	Pelaporan Kinerja	15	9,55	9,65
D	Evaluasi Internal	10	4,73	10,85
E	Capaian Kinerja	20	10,11	57,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,04	57,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2023

Nilai SAKIP tahun 2022 yang sebesar 57,34 dengan kategori CC meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan pemerintah kabupaten barru telah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkait dengan komponen penilaian yang menentukan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai SAKIP pada tahun 2022 yang sebesar 57,34 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 60.

2.2. EVALUASI PAGU INDIKATIF DAN REALISASI BELANJA

Informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan per urusan menunjukkan besaran penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2022 dan APBD 2022. Gambaran tentang capaian realisasi keuangan per urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru
Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (%)
1.	Dinas Pendidikan	306.588.172.880	112.679.280.559	36,75	36,79
2.	Dinas Kesehatan	131.121.769.668	53.704.460.866	40,96	40,96
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	45.176.259.391	23.727.630.281	52,52	52,52
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	75.480.319.823	11.954.703.145	15,84	12,13
5.	Dinas Lingkungan Hidup	7.362.765.736	3.299.453.815	44,81	44,81
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.870.875.748	1.487.024.825	38,42	44,09
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.726.552.006	1.550.341.649	41,60	41,60
8.	Dinas Perhubungan	6.878.890.733	2.580.155.436	37,51	37,51
9.	Dinas Sosial	3.484.007.983	1.430.903.585	41,07	10,24
10.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.069.500.320	1.652.869.785	32,60	32,60
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.510.490.434	2.231.509.472	26,22	26,22
12.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.585.128.969	1.098.547.792	30,64	30,64
13.	Sekretariat DPRD	25.533.003.508	10.824.115.736	42,39	61,00

14.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	105.825.394.766	37.918.669.320	35,83	35,83
15.	Inspektorat Daerah	6.005.040.619	2.463.821.491	41,03	41,03
16.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.075.970.061	1.748.276.960	42,89	44,85
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.267.066.675	1.966.265.739	23,78	24,00
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.836.946.220	4.356.507.652	29,36	29,36
19.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	13.669.549.682	5.646.050.167	41,30	41,30
20.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.229.756.409	1.951.531.211	31,33	31,33
21.	Dinas Tenaga Kerja	1.894.591.009	749.580.528	39,56	39,56
22.	Badan Pendapatan Daerah	6.913.701.267	2.266.935.093	32,79	32,79
23.	Dinas Perikanan	3.904.195.263	1.261.880.957	32,32	33,00
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.787.812.614	3.092.477.452	45,56	45,56
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.457.878.770	1.033.602.189	42,05	45,00
26.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.962.014.749	1.378.167.866	34,78	34,78
27.	Sekretariat Daerah	43.198.251.697	12.491.351.535	28,92	37,03
28.	Kecamatan Tanete Rilau	4.003.361.133	1.781.402.565	44,50	44,50
29.	Kecamatan Pujananting	2.530.008.709	1.094.286.011	43,25	43,25
30.	Kecamatan Balusu	2.720.772.890	1.179.669.102	43,36	43,36
31.	Kecamatan Soppeng Riaja	3.455.364.615	1.494.403.372	43,25	43,25
32.	Kecamatan Mallusetasi	4.845.242.537	2.358.594.669	48,68	48,68
33.	Kecamatan Barru	6.678.578.757	3.314.143.293	49,62	50,00
34.	Kecamatan Tanete Riaja	3.466.146.209	1.620.594.303	46,75	46,75
J U M L A H		882.115.381.850	319.389.208.421	36,21	36,37

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah 2023

Tabel di atas menunjukkan total belanja daerah tahun 2023 dari pagu sebesar Rp. 882.115.381.850,- sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi sebesar 36,21 persen atau sebesar Rp. 319.389.208.421,-. Terbagi atas 4 (empat) urusan dengan 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah ditambah dengan 7 (tujuh) kecamatan. Hingga triwulan 2 terdapat 18 perangkat daerah yang menunjukkan persentase realisasi diatas 40 % atau 53% dari jumlah keseluruhan OPD, sehingga secara umum realisasi serapan anggaran hingga

triwulan 2 jika dirata-ratakan maka masuk kategori baik. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru memiliki capaian realisasi tertinggi sebesar 52, 52%.

Adapun perangkat daerah sampai hingga triwulan 2 yang berada pada kisaran 20% - 40% dengan jumlah OPD sebanyak 15 OPD atau 44% dari jumlah keseluruhan OPD, sisanya sebanyak 1 OPD dengan realisasi anggaran dibawah 20% yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KELUARAN KEGIATAN

2.3.1 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD Pokok Tahun 2023 dengan Permendagri 90 tahun 2019, pemuktahiran permendagri 050.5889 Tahun 2021 dan perubahan SOTK menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perangkat daerah, sehingga menyebabkan penyesuaian jumlah program/kegiatan/subkegiatan yang dipetakan berdasarkan indikator kinerja dan diinput dalam aplikasi SIPD. Adapun penyesuaian dalam RKPD pokok Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan RKPD Pokok
Tahun 2023 dan perubahan RKPD Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	RKPD Pokok Tahun 2023			Perubahan RKPD 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan
1	Urusan Bidang Pendidikan	2	10	52	2	10	53
	Urusan Bidang Kesehatan	5	23	89	5	23	91
3	Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8	25	77	8	25	81
	Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	8	13	4	8	13
5	Urusan Bidang Trantibumlinmas	5	19	65	5	19	65
		7	14	45	7	14	46
6	Urusan Bidang Sosial	5	18	45	5	18	45
	Urusan Bidang Tenagakerja	5	8	9	5	8	9
8	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4	8	21	4	8	21
	Urusan Bidang Pangan						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	RKPD Pokok Tahun 2023			Perubahan RKPD 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan
10	Urusan Bidang Pertanahan	7	7	7	7	7	7
11	Urusan Bidang Lingkungan Hidup	10	17	33	10	17	33
12	Urusan Bidang Administrasi Kependudukan	5	16	39	5	16	39
13	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	9	33	4	9	33
14	Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	2	5	6	2	5	6
15	Urusan Bidang Perhubungan	3	14	47	3	14	47
16	Urusan Bidang Kominfo	3	10	42	3	10	42
17	Urusan Bidang Koperasi Dan Umkm	7	14	37	7	14	37
18	Urusan Bidang Penanaman Modal	7	17	42	7	17	42
19	Urusan Bidang Pemudan Dan Or	7	22	73	7	22	73
20	Urusan Bidang Statistik	1	1	6	1	1	6
21	Urusan Bidang Persandian	1	1	4	1	1	4
22	Urusan Bidang Kebudayaan	3	5	6	3	5	6
23	Urusan Bidang Perpustakaan	2	8	31	2	8	31
24	Urusan Bidang Kearsipan	2	6	9	2	6	9
25	Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4	19	43	4	19	43
26	Urusan Bidang Pariwisata	5	13	35	5	13	35
27	Urusan Bidang Pertanian	7	24	59	7	24	59
28	Urusan Bidang Perdagangan	5	19	14	5	9	14
29	Urusan Bidang Perindustrian	3	3	10	3	3	10
30	Sekretariat Daerah	3	18	64	3	18	64
31	Sekretariat DPRD	2	12	33	2	12	33
32	Urusan Perencanaan	3	12	43	3	12	44
33	Urusan Keuangan	2	7	24	2	7	24
34	Urusan Kepegawaian	2	10	23	2	10	23
35	Urusan Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	2	1	2	2
36	Urusan Peneltian Dan Pengembangan	1	2	5	1	2	5
37	Urusan Pengawasan	3	9	28	3	10	29
38	Kecamatan	6	15	44	6	16	47
39	Kesbangpol	6	11	23	6	11	23

Sumber : Data Olahan Bappeltibangda Tahun 2023

Dari tabel diatas, beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan jumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan, hal ini disebabkan adanya penyesuaian nomenkelatur dari Permendagri 050-3708 Tahun 2020 ke Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang telah memuat indikator kegiatan dan Sub Kegiatan. Secara keseluruhan indikator RKPD 2023 disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dari hasil penyesuaian tersebut menyebabkan adanya beberapa target kinerja yang berpindah dari Kegiatan dan Sub Kegiatan yang satu ke Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lain. Disamping itu adanya penyesuaian terhadap Program RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan.

Tabel 2.12
Realisasi capaian Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hingga Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2023
I	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	10.806.662.000	18,28	1.967.080.500
2	Pendidikan Dasar				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100	33.255.861.772	16,46	5.379.337.873
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100	20.287.549.479	17,48	3.544.945.650
3	Pendidikan Kesenjangan (Paket A/B/C)	100	3.963.480.600	30,35	1.203.022.556
II	KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	508.340.560	39,71	6.109.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu	100	69923500	37,09	0
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	188554460	41,88	0
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	61.634.608	34,84	1.175.000

No	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hingga Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2023
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	209.295.000	0	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	667.946.500	37,84	0
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	1.679.065.000	43,41	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	21.813.500	22,25	0
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100	190.334.490	47,05	200.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	27.307.000	93,59	0
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	100	726.851.212	36,63	0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus Yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	698.749.000	41,76	1.762.500
III	PEKERJAAN UMUM				
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100	1.261.841.375	0,71	7.572.210
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	189.271.000	12,86	57.179.200
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	1.454.102.000	28,11	79.945.586
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	4.631.000	48,86	1.527.000
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100	825.200.000	49,00	407.959.000
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	21.699.000	50,00	0
3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	263.026.500	42,17	95.594.000
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban	100	81.800.150,00	31,41	11.105.000
VI	SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	100	157.983.500	11,22	54.588.750
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	100			

No	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hingga Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2023
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti	100			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	100			
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	180.468.500	17,54	90.024.500

Sumber : SKPD Pengampu SPM Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, untuk SPM Bidang Pendidikan telah terlaksana mulai bulan januari hingga Juni 2023, baik dari realisasi kinerja maupun realisasi anggaran. SPM Bidang Kesehatan menunjukkan realisasi kinerja pada semua sub kegiatan pelayanan hingga triwulan II Tahun 2023, namun hanya empat sub kegiatan pelayanan yang tersaji informasi realisasi anggarannya. Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat, capaian realisasi kinerja dan anggaran hingga triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi walaupun dengan tingkat kinerja yang masih rendah. Untuk SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat capaian realisasi kinerja hingga triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi dengan tingkat kinerja cukup baik dengan capaian 30 – 50 poin. Untuk SPM Bidang Sosial capaian realisasi kinerja hingga triwulan II Tahun 2023 sudah terealisasi, demikian juga capaian realisasi anggaran sudah terealisasi Sebagian.

2.3.3 Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Kategori rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0-20%. Kategori sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20%-40% dan Kategori tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 40 %. Penetapan batas realisasi yang diharapkan berdasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan sampai dengan triwulan II yaitu lebih dari 40%.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Pada hasil evaluasi capaian kinerja outcome pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 187 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 79 program atau 42,25 persen (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 52 program atau 27,81 persen (realisasi >20-40 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 56 program atau 29,95 persen (realisasi diatas 40 persen).

2. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan

Pada evaluasi pelaksanaan capaian kinerja outcome pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, terdapat 452 kegiatan yang ditetapkan dalam APBD untuk tahun 2023. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 190 kegiatan atau 42,04 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0-20 persen, sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 115 kegiatan atau 25,44 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 50 sebanyak 147 kegiatan atau 32,52 persen

3. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level sub Kegiatan

Untuk evaluasi capaian kinerja outcome pada level sub kegiatan, dapat diuraikan bahwa dari 971 sub kegiatan terdapat 49,85 persen sub kegiatan yang berada pada kategori rendah atau sebanyak 484 sub kegiatan dari seluruh sub kegiatan yang diadakan oleh semua OPD di Kabupaten Barru. Jumlah sub kegiatan yang berada dalam kategori sedang, dengan total sebanyak 215 sub kegiatan atau 22,14 persen dari total seluruh sub kegiatan. Sedangkan kategori tinggi sebanyak 272 sub kegiatan atau sebesar 28,01 persen dari total keseluruhan sub kegiatan.

Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan masing-masing OPD terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Program, Kegiatan Perangkat Daerah
sampai dengan triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20% - 40%	> 40%		0 - 20%	>20% - 40%	> 40 %		0 - 20%	>20% - 40%	> 40%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	3	1	2	12	8	1	3	53	39	8	6
2	Dinas Kesehatan	6	4	1	1	13	2	1	10	55	36	11	8
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2	1	-	1	4	3	-	1	4	3	-	1
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13	11	1	1	25	15	6	4	43	25	9	9
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4	-	1	3	14	1	2	11	13	-	1	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	-	1	1	12	4	2	6	25	7	4	14
7	Dinas Sosial	6	1	3	2	12	2	5	5	30	12	8	10
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	4	-	1	10	7	-	3	24	19	2	3
9	Dinas Tenaga Kerja	5	3	1	1	10	5	2	3	14	10	2	2

Perubahan RKPD 2023

10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	3	4	2	18	7	9	2	34	18	10	6
11	Dinas Lingkungan Hidup	9	1	4	4	13	2	6	5	24	6	7	11
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	-	1	13	8	2	3	20	12	5	3
13	Dinas Perhubungan	2	-	1	1	9	3	2	4	21	13	2	6
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6	3	1	2	11	7	2	2	25	14	6	5
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	12	4	4	4	17	4	7	6	23	8	7	8
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	1	2	1	13	4	6	3	21	10	5	6
17	Dinas Perikanan	4	3	1	-	12	8	2	2	29	14	10	5
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	8	6	-	2	18	12	3	3	27	13	10	4
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10	5	2	3	27	15	8	4	44	23	12	9
20	Sekretariat Daerah	3	1	2	-	44	16	8	20	88	44	12	32
21	Sekretariat DPRD	2	-	-	2	12	3	5	4	32	15	8	9
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	1	2	1	12	6	5	1	33	16	7	10
23	Badan Pendapatan Daerah	2	-	2	-	6	2	2	2	21	8	6	7
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	-	2	1	13	5	7	1	46	33	8	5
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	-	1	2	9	4	-	5	21	6	3	12

Perubahan RKPD 2023

26	Inspektorat	3	-	2	1	9	3	3	3	24	13	5	6
27	Kecamatan Tanete Riaja	6	2	1	3	12	4	2	6	22	10	6	6
28	Kecamatan Mallusetasi	7	3	1	3	12	6	2	4	22	11	4	7
29	Kecamatan Soppeng Riaja	6	2	2	2	10	4	3	3	24	9	7	8
30	Kecamatan Balusu	6	3	1	2	10	3	3	4	26	8	9	9
31	Kecamatan Barru	6	1	2	3	12	3	3	6	26	7	5	14
32	Kecamatan Pujananting	6	3	3	-	9	3	2	4	20	8	4	8
33	Kecamatan Tanete Rilau	6	2	2	2	10	3	3	4	21	7	7	7
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	1	1	9	8	1	-	16	7	5	4
	TOTAL	187	79	52	56	452	193	115	147	971	501	215	272

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

2.4 HAMBATAN, UPAYA PENCAPAIAN, DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN RKPD 2023

2.4.1. Hambatan dan Kendala pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 masih berada di kisaran angka 36,21 %. Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

- 1. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barru yang belum maksimal dan merata.
- 2. Belum optimalnya daya saing perekonomian produk unggulan.
- 3. Belum Optimalnya pelayanan publik.
- 4. Belum optimalnya kualitas layanan DPRD
- 5. Masih rendahnya literasi dan budaya membaca

2.4.2. Upaya-upaya Pencapaian pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Terhadap berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, maka beberapa hal yang dapat dipertimbangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kondisi jalan dalam rangka pencapaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota; Peningkatan penataan bangunan gedung; Optimalisasi pengelolaan sistem drainase; Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya air; Peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2. Peningkatan Fasilitas Layanan, Peningkatan dan penataan bangunan gedung/kantor layanan, Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana DPRD, Peningkatan dan penganekaragaman jenis bacaan dan Pembangunan perpustakaan daerah beserta fasilitasnya

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran sekaligus skenario perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah perlambatan Ekonomi Global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), Sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Kedepan, Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, Didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

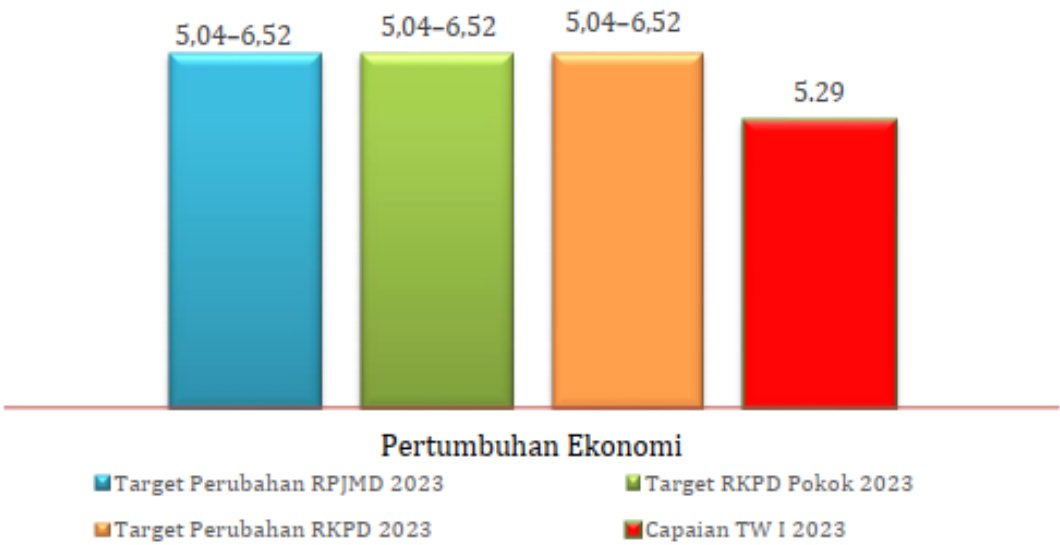
Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Komsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Secara lapangan usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. LU transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

B. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23– 6,71 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,70 persen. Sementara untuk ditahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023,
Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Triwulan I Tahun 2023
(Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sul-Sel

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2022 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,33 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,07 triliun

rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,77 persen.

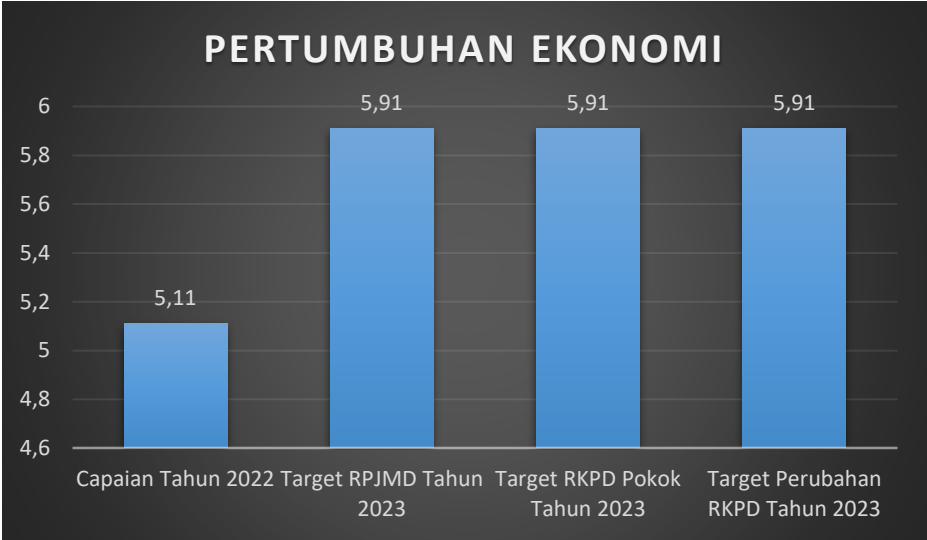
Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mencapai 5,11 persen. Perekonomian semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru juga berhasil tumbuh positif. Terdapat tiga kategori yang dapat tumbuh di atas 5 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020. Ketiga kategori itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang tumbuh 6,48 persen; Transportasi dan Pergudangan (H) yang tumbuh 14,97 persen; dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Kategori-kategori tersebut adalah beberapa kategori yang paling merasakan pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya terdampak berbagai kebijakan pembatasan sosial sebagai dampak COVID-19 yang memicu pengurangan aktivitas operasional.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan dibukanya kembali beberapa usaha yang bergerak di sektor jasa pada tahun 2021, di saat pada tahun 2020 banyak usaha di sektor jasa harus tutup sementara akibat kebijakan pembatasan dan melemahnya perekonomian karena dampak pandemi COVID-19.

Posisi kedua kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah kategori Transportasi dan Pergudangan, yang tumbuh 7,87 persen. Mobilitas penduduk yang kembali meningkat pasca puncak pandemi, menyebabkan sektor transportasi baik laut maupun darat kembali sibuk. Aktivitas pergudangan dan pengiriman barang sebagai pendukung lapangan usaha lainnya juga kembali meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di semua lapangan usaha secara umum. Kebiasaan masyarakat untuk berbelanja online semasa pandemi di 2020 juga masih bertahan dan bahkan meningkat di 2021.

Melihat perkembangan capaian tahun 2022 dan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, maka dilakukan perubahan target perencanaan sebagai berikut :

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target
Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian
Tahun 2022(Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab.Barru

3.1.1.2 Inflasi

A. Inflasi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Mei 2023 tercatat sebesar 0,09% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,33% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan menjadi 4,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,33% (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023.

Penurunan inflasi IHK pada Mei 2023 dipengaruhi oleh penurunan inflasi inti. Inflasi inti tercatat sebesar 0,06% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,25% (mtm). Perkembangan inflasi inti sejalan dengan normalisasi permintaan setelah periode HBKN Idulfitri serta penurunan tekanan harga komoditas global. Komoditas utama penyumbang penurunan inflasi inti terutama berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki. Secara tahunan, inflasi inti Mei 2023

tercatat sebesar 2,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,83% (yoy).

Inflasi kelompok volatile food Mei 2023 meningkat dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,29% (mtm). Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh inflasi komoditas bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras. Peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada komoditas aneka cabai. Kelompok volatile food secara tahunan mengalami inflasi 3,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,74% (yoy).

Kelompok administered prices mencatat deflasi sebesar 0,25% (mtm), menurun dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,69% (mtm). Perkembangan ini dipengaruhi oleh pola musiman setelah periode HBKN Idulfitri, tecermin pada deflasi tarif angkutan udara dan angkutan antar kota sejalan dengan normalisasi tarif setelah periode HBKN Idulfitri. Deflasi lebih dalam tertahan oleh inflasi rokok kretek filter akibat kenaikan tarif cukai tembakau. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi 9,52% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 10,32% (yoy).

B. Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan yang sempat tercatat sebesar 2,40% (yoy) di 2021, terus meningkat dan mencapai level tertingginya di 5,77% (yoy) pada tahun 2022. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas akibat peningkatan tensi geopolitik dunia dan ketidakpastian iklim yang terjadi secara global. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Inflasi utamanya disumbang oleh kelompok transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2023 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen.

Grafik 3.3
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023,
Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Triwulan II Tahun 2023



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

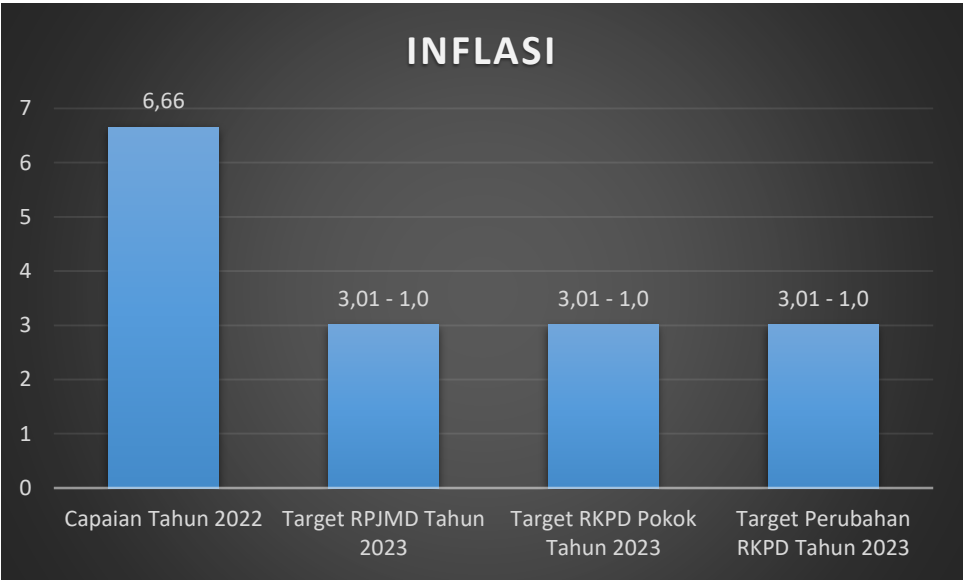
C. Inflasi Kabupaten Barru

Maret 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 0,54 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,48 pada Februari 2022 menjadi 109,07 pada Maret 2022. Dari 5 kota IHK, seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bulukumba sebesar 1,12 persen dan inflasi terendah terjadi di Palopo sebesar 0,45 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,49 persen.

Gambaran kondisi inflasi dan rencana penyesuaian target tahun 2022 terhadap capaian tahun 2021, target RPJMD 2021-2026 dan target.RKPD 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Inflasi Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target
Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Barru

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional

Pada Februari 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan.

1. Keadaan Tenaga Kerja

- Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,24 persen poin.
- Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Aktivitas Jasa Lainnya, masing-masing sebesar 0,51 juta orang.
- Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.
- Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2022.
- Jumlah pekerja komuter Februari 2023 sebesar 7,18 juta orang, naik sebesar 0,11 juta orang dibanding Februari 2022.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 persen, turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.
- Terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang).

2. Rata-rata upah buruh

- Rata-rata upah buruh pada Februari 2023 sebesar 2,94 juta rupiah.
- Rata-rata upah buruh dari Februari 2022 ke Februari 2023 naik 1,80 persen, dari 2,89 juta rupiah menjadi 2,94 juta rupiah.
- Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,23 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,42 juta rupiah.
- Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Real Estat, yaitu sebesar 4,82 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori Jasa Lainnya, yaitu sebesar 1,79 juta rupiah.
- Terdapat 11 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional.
- Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,46 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,90 juta rupiah.
- Menurut kelompok umur, rata-rata upah buruh tertinggi sebesar 3,66 juta rupiah pada kelompok umur 50-54 tahun, sedangkan terendah sebesar 1,76 juta rupiah pada kelompok umur 15-19 tahun.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,38 persen poin pada Tahun 2022 atau setara dengan 1,61 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun

2023 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,69 persen atau masih lebih rendah jika dibandingkan dari capaian tahun 2022 yang mencapai 5,75 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,83 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 5,69 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 5,3-6,00 persen.

Grafik 3.5

Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023,
Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Periode Februari Tahun
2023 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

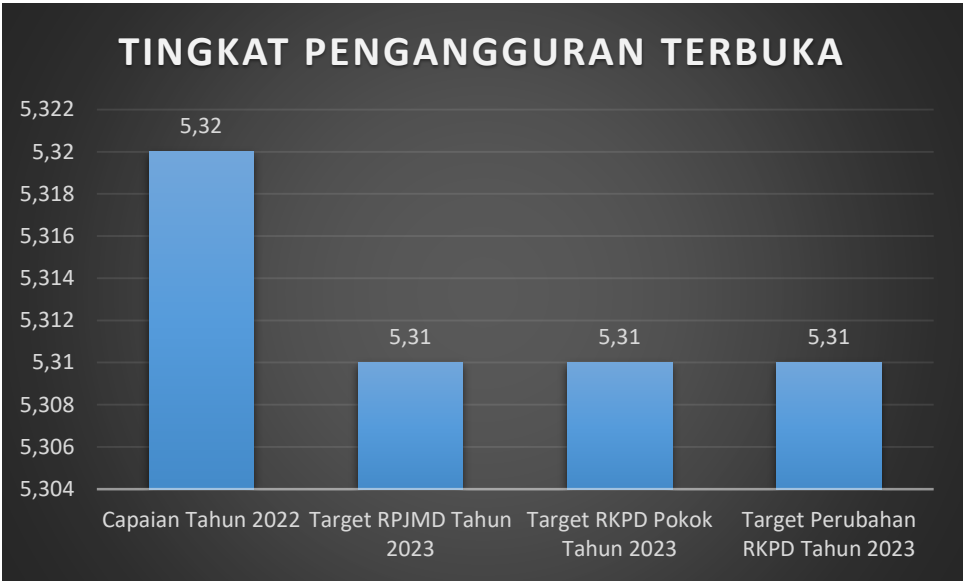
C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barru

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 menunjukkan trend yang fluktuatif, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,74% dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,32%, kalau ditelaah lebih lanjut, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pekerja yang merupakan penduduk asli Kabupaten Barru tetapi bekerja di luar dan dirumahkan kembali ke kampung halaman pada saat pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi angka pengangguran pada periode empat tahun tersebut.

Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian target Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap capaian Tahun 2022 juga terhadap target RPJMD 2021-2026 dan target RKPD 2023 sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2021-2026, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Barru

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

A. Tingkat Kemiskinan Nasional

Tren penurunan angka kemiskinan sejak 2021 tertahan setelah Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau lebih tinggi dari Maret 2022 yang 9,54 persen. Sejumlah faktor turut memengaruhi kondisi itu, termasuk peningkatan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Berdasarkan data BPS, peningkatan persentase kemiskinan mulai dirasakan sejak 2020 atau masa awal pandemi Covid-19, yang puncaknya mencapai 10,19 persen (September 2020). Selepas itu, terjadi tren penurunan. Secara beruntun, yakni 10,14 persen (Maret 2021); 9,71 persen (September 2021); dan 9,54 persen (Maret 2022). Namun, pada September 2022, tingkat kemiskinan kembali meningkat, menjadi 9,57 persen.

sepanjang September 2022 juga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi. Di samping itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga

berdampak pada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, terutama untuk subsektor perikanan tangkap.

B. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi COVID-19 sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diprediksi akan menurun menjadi 7,45 persen dibandingkan dari tahun 2022 yang mencapai 8,66 persen (menurun 0,29 persen), atau lebih rendah dari prediksi target Nasional untuk menurunkan penduduk miskin yaitu berkisar antara 9,7-10,20 persen. Pada tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat diharapkan lebih membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,48 persen atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen.

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang perlahan aktif kembali. Hal lain yang menggembirakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.

Grafik 3.7
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Periode Maret Tahun 2023 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

C. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru

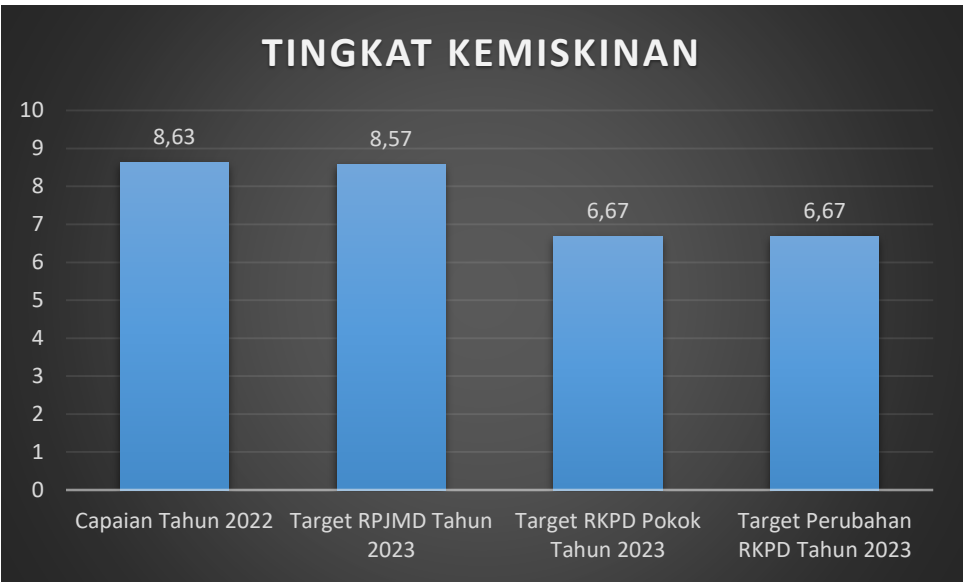
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran

diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Barru tahun 2022 serta rencana penyesuaian target tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Barru

3.1.1.5 Ratio Gini

A. Ratio Gini Nasional

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini sebesar 0,381 pada September 2022. Angka tersebut turun 0,003 poin dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 0,384. Penurunan rasio gini nasional disebabkan oleh penurunan angka penduduk miskin pada Maret 2021 karena perekonomian mulai pulih dari dampak Covid-19.

Jika melihat data rasio gini memang sempat turun drastis pada Maret 2021. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika

dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Penurunan tentu saja dipicu oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, rasio gini di perkotaan tercatat sebesar 0,402 pada September 2022. Nilai tersebut turun dibandingkan pada enam bulan sebelumnya yang sebesar 0,403. Sementara, rasio gini di perdesaan terpantau sebesar 0,313. Angkanya turun 0,001 poin dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 0,314. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran nasional di kelompok 40% terbawah sebesar 18,24%. Artinya, pengeluaran penduduk berada di kategori tingkat ketimpangan rendah pada September 2022.

Jika dilihat dari klasifikasi daerahnya, persentase pengeluaran nasional di kelompok 40% terbawah di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 17,19% dan 21,06%. Ini berarti baik perkotaan maupun perdesaan sama-sama masuk kategori ketimpangan rendah.

Yogyakarta menjadi provinsi dengan rasio gini tertinggi pada September 2022, yakni 0,459. Sementara, Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan rasio gini terendah sebesar 0,255. Selain itu, rasio gini di 6 provinsi tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya secara nasional. Sedangkan, 28 provinsi lainnya memiliki rasio gini yang lebih rendah dari rata-rata nasional.

B. Ratio Gini Provinsi Sulawesi Selatan

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,365. Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang juga sebesar 0,377.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,378, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388 dan juga turun dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,387. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,324, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,334.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,26 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,69 persen yang berarti

tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,80 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah

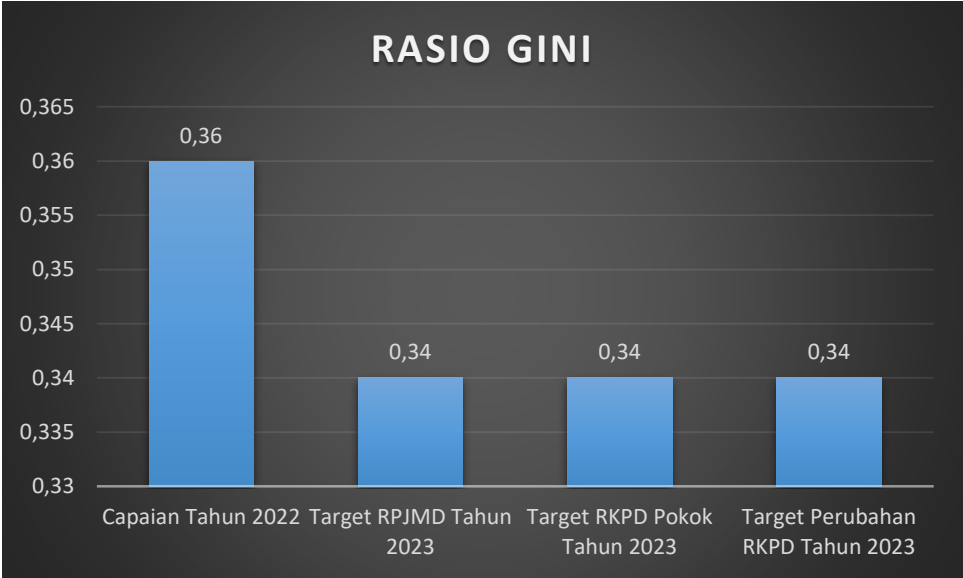
C. Ratio Gini Kabupaten Barru

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada Rancangan Akhir RKPD 2024 periode tahun 2018-2022, pada periode tahun 2018-2020 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2018 – tahun 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahun 2022 indeks gini kabupaten barru mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa indek gini di tahun 2022 yang sebesar 0,366 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 0,35.

Grafik 3.9
Ratio Gini Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan
RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Barru

3.1.1.6 Pendapatan Per Kapita

A. Pendapatan Per Kapita Nasional

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku PDB mencapai Rp19.588,4 triliun. Dibagi jumlah penduduk 275 juta orang lebih, maka PDB per kapitanya mencapai kisaran Rp71 juta atau 4.783,9 dollar AS.

Lalu pada Januari 2023 Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy, menghitung pendapatan per kapita Indonesia berpotensi berada di level 5.083 dollar AS. Tak hanya pendapatan per kapita yang membaik, tapi juga diprediksi terjadi penurunan kesenjangan pendapatan.

Total PDB Indonesia tahun 2022 adalah Rp19.588,4 triliun, dan total jumlah penduduk adalah 275.361.267. Maka PDB per kapita adalah Rp19.588,4 triliun dibagi jumlah penduduk 275 juta jiwa itu, didapat angka sekitar Rp71 juta, atau dalam 4.783,9 dollar AS.

B. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan

PDRB per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Terbatasnya aktivitas sosial ekonomi selama tahun 2022 berdampak pada penurunan pendapatan per kapita masyarakat, baik di Sulsel maupun nasional. Namun program pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2023 berkontribusi terhadap

bounce back sehingga PDRB perkapita Sulsel mampu mencapai Rp65,59 juta setelah terpuruk ke angka Rp55,68 juta di tahun 2020.

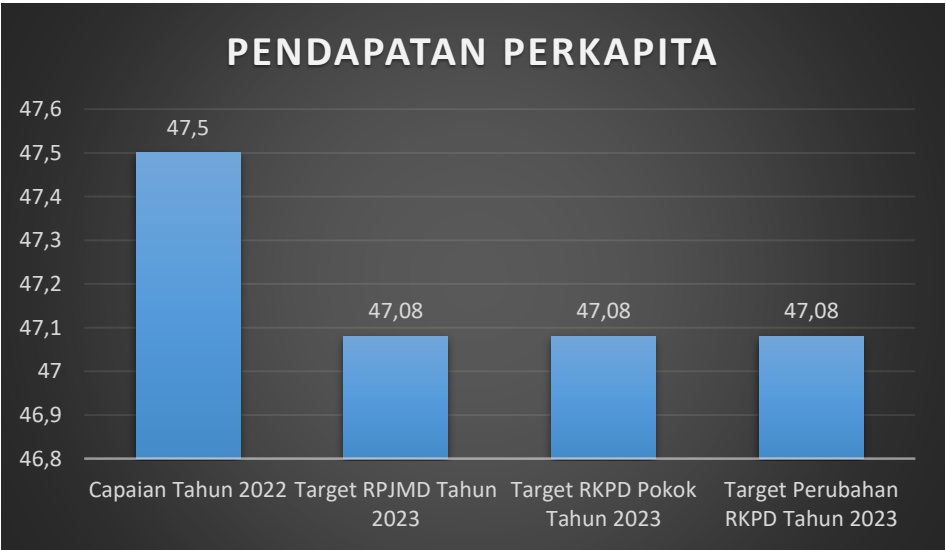
C. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Barru

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,80 juta rupiah kemudian tercatat menurun menjadi 40,36 juta di tahun 2020 lalu kembali meningkat pada 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 43,43 juta rupiah dan di tahun 2022 meningkat menjadi 47,50 juta rupiah.

Adapun gambaran terkait capaian pendapatan

Grafik 3.10
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Barru

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia diperkirakan akan menyusut pada 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. IPM Indonesia pada 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Melihat tren saat, jika terjadi resesi, kisaran laju tumbuhnya (IPM Indonesia) akan menurun sebesar 0,32%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan IPM 2022, telah mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM terkini ada di angka 72,91 atau meningkat 0,86% dibanding 2021. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika dilihat secara historisnya, sejak pemulihan pandemi Covid-19 muncul, IPM memang mengalami perbaikan. Pada 2021 terjadi kenaikan IPM dengan laju sebesar 0,49%, dari besaran angka sebesar 71,94 pada 2020 menjadi 72,29 tahun 2021. Kemudian tumbuh 0,86% pada 2022 alias sebesar 72,91.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan

IPM merupakan alat ukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pengukurannya menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar pembangunan, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pencapaian pembangunan manusianya.

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Sulsel terus mengalami kemajuan. Rata-rata pertumbuhan IPM Sulsel dari tahun 2011 hingga 2022 sebesar 0,86 persen. Meskipun IPM Sulsel sempat melambat di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun setelah satu tahun lebih, mulai mengalami percepatan di tahun 2022 mencapai 72,82. Laju pertumbuhan IPM Sulsel dari tahun ke tahun bahkan lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM nasional. Progres baik tersebut menempatkan IPM Sulsel tahun 2022 hanya terpaut sembilan basis poin di bawah IPM Nasional sebesar 72,91. Dan di level regional, IPM Sulsel berada pada urutan ke-2 setelah IPM Sulawesi Utara sebesar 73,30. IPM Sulsel tahun 2022 yang meningkat 58 basis poin dibanding tahun 2021 sebesar 71,93 didukung oleh peningkatan semua komponen pembentuknya.

Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap naiknya IPM Sulsel. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengalokasian anggaran di bidang Kesehatan dan Pendidikan. Melalui PC PEN klaster Kesehatan telah dialokasikan anggaran untuk Klaim COVID-19 yang disalurkan ke rumah sakit, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Insentif Nakes dan Belanja penanganan COVID-19 pada DIPA satker. Pengalokasian anggaran kepada Pemerintah Daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di bidang Kesehatan dan Pendidikan juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Berdasarkan klasifikasi BPS, baik capaian Sulsel maupun nasional masuk dalam kategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} \leq 79$). Jika dibandingkan dengan target pemerintah dalam RPJMD-P tahun 2018-2023, capaian Sulsel melebihi target yang diharapkan mencapai angka 72,20. Jika dilihat dari komponennya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada dua komponen yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan komponen Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan sebesar 0,95 persen.

Seiring dengan meningkatnya IPM Sulsel, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Dari 24 daerah kabupaten/kota yang ada di Sulsel, gap antara IPM tertinggi dan terendah adalah sebesar 18,1. Makassar mencapai IPM tertinggi dengan capaian 82,66 dan IPM terendah masih ditempati oleh Jeneponto dengan capaian 64,56.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru kembali meningkat di tahun 2022, dengan nilai IPM sebesar 71,53. Sejak tahun 2018, telah ada kenaikan nilai IPM sebesar 1,48 poin dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,83 persen setiap tahunnya. Perkembangan ini mengindikasikan adanya perbaikan pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Barru. Laju pertumbuhan IPM di tahun 2022 adalah sebesar 0.40 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2020. Meskipun terjadi perlambatan, pertumbuhannya tetap positif. Perlambatan biasa terjadi saat capaian nilai IPM sudah relatif tinggi. Hal ini dikarenakan tidak adanya komponen yang mengalami peningkatan yang melejit, karena sudah dalam posisi baik sejak tahun sebelumnya.

BPS membuat empat kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM, yakni :

- kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$)
- kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$)

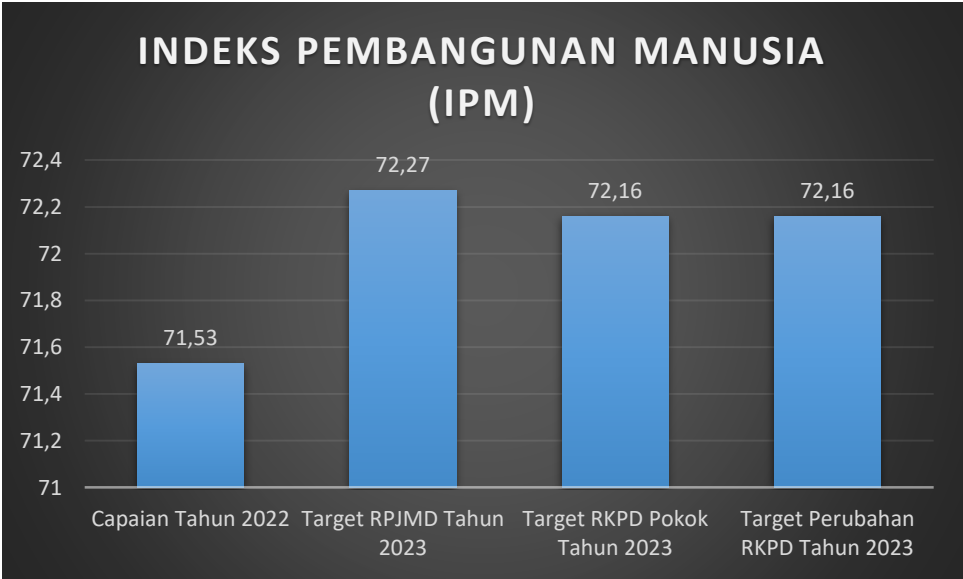
- kategori sedang ($60 < \text{IPM} < 70$)
- kategori rendah ($\text{IPM} < 60$)

Mulai tahun 2018, IPM Kabupaten Barru mulai masuk di kategori tinggi di angka 70,05. Angka tersebut terus naik hingga tercatat IPM sebesar 71,53 di tahun 2022 serta tidak pernah berkontraksi (menurun nilainya dibanding tahun sebelumnya). Pertumbuhan yang selalu positif ini memungkinkan capaian IPM untuk beranjak dari kategori sedang ke kategori tinggi. Capaian ini adalah hasil pertumbuhan positif dari tiap-tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak atau perekonomian.

Capaian pembangunan manusia Kabupaten Barru di tahun 2022 ditandai dengan angka IPM sebesar 71,53 yang dikategorikan tinggi. Perolehan ini membuat Kabupaten Barru mempertahankan peringkat delapan capaian IPM tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Posisi ke-8 ini tidak berubah sejak tahun 2010. Tujuh kabupaten/kota dengan peringkat di atas Kabupaten Barru secara berurutan dari peringkat pertama adalah: Makassar, Palopo, Parepare, Luwu Timur, Enrekang, Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Pinrang.

Capaian ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian target IPM pada tahun 2023. Adapun gambaran tentang capaian IPM tahun 2022, target RPJMD tahun 2023, target RKPD 2023 dan target Perubahan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru
Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Barru

3.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1 Aspek Eksternal

A. Tantangan Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yakni masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajectory pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari SDM yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan megatrend global ke depan.

B. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2023 tumbuh 5,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,11%; yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan domestik yang menguat seiring aktivitas

ekonomi masyarakat yang semakin baik pasca penghapusan kebijakan PPKM dan kenaikan permintaan dalam menyambut momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan yang dimulai pada Maret 2023.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I 2023 dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi domestik, baik dari swasta maupun pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan periode awal HBKN Ramadan yang mulai berjalan pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga meningkat, baik untuk investasi bangunan maupun non bangunan. Hal tersebut terkonfirmasi dari realisasi belanja modal pemerintah dan impor barang modal yang juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, peningkatan ekonomi Sulsel triwulan I 2023 terutama didorong oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalian seiring peningkatan produksi hasil tambang. Selain itu, LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran juga terpantau tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja investasi yang lebih tinggi dan penguatan permintaan domestik. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan.

3.2.2 Aspek Internal

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah.

Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, merupakan tantangan sendiri. Perencanaan diarahkan lebih focus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi *aggregate control* untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan

berkelanjutan. Pengelolaan fiscal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah.

Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui :

1. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi
2. Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan
3. Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan pencemaran/kerusakan SDA dan LH
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
6. Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam sistem keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip value for money yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2023

NO.	URAIAN	TAEGET RPJMD TAHUN 2023	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	7
04.00	PENDAPATAN DAERAH	996.598.717.425	1.058.778.310.996	914.156.244.871	144.622.066.125	15,82
04.01	Pendapatan Asli Daerah	111.344.324.467	81.127.696.557	104.354.004.055	23.226.307.498	22,26
04.01.01	Pajak Daerah	19.909.394.926	21.809.150.000	24.478.108.406	-2.668.958.406	-10,90
04.01.02	Retribusi Daerah	8.748.709.341	8.045.581.342	7.345.200.104	700.381.238	9,54
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.256.907.692	9.389.242.740	9.389.242.740	0	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	73.429.312.688	41.883.722.475	63.141.452.805	-21.257.730.330	-33,67
04.02	Pendapatan Transfer	755.527.366.112	929.258.394.357	809.802.240.816	119.456.153.541	14,75
04.02.01	Pendapatan Tarnsfer Pemerintah Pusat	755.527.366.112	929.258.394.357	708.195.672.892	221.062.721.465	31,21
04.02.01.01	Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer Antar Daerah	700.365.177.881		101.606.567.924		
04.02.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.193.104.098	886.324.925.357			
04.02.01.01.02	Dana Alokasi Umum	516.165.300.075	843.391.456.357			
04.02.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.127.452.880	521.776.459.357			
04.02.01.01.04	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	105.879.320.828				
04.02.01.02	Dana Insentif Daerah	55.162.188.231	22.829.930.949			
04.02.01.05	Dana Desa	42.933.469.000	42.933.469.000			
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.373.551.287				
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				-	
04.02.02.02	Bantuan Keuangan					
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	80.353.475.379	520.661.084.583			
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	56.152.754.429	42.933.469.000			
04.03.03.01	Lain-lain Pendapatan		48.392.220.082			

04.03.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	16.644.752.971	-

Sumber : RPJMD Kab. Barru Tahun 2021-2026, RKPD Kab. Barru Tahun 2023, APBD Kab. Barru Tahun 2023

3.3.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;

- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa

Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
 - o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan
 - q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan

- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Adapun target perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah antara lain :

a. Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah diperkirakan tetap sebesar Rp. 24.478.108.406,-

b. Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah diperkirakan tetap sebesar Rp. 7.345.200.104,-

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sama dari Rp 9.389.242.740

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah diperkirakan tetap pada angka Rp. 63.141.452.805,-

3.3.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan terdiri atas

- 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

- 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- b. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- c. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Adapun pendapatan transfer diperkirakan mengalami Peningkatan dari Rp. 770.452.266.620,- menjadi Rp. 809.802.240.815,65,-, hal ini diasumsikan bahwa pada anggaran perubahan tahun 2023, Kabupaten Barru memperoleh tambahan dana transfer antar daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.1.3 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

3.3.2 Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBD sebagai instrument fiskal dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Untuk menjaga kualitas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barru, kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi structural pada reformasi SDM unggul (Kesehatan, perlindungan social, Pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi)
2. Penguatan Spending better, melalui :
 - a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (result based)
 - b. Efisiensi belanja non prioritas daerah dan nasional yaitu penajaman belanja melalui efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga. Serta

penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, Konektivitas, Pangan serta pembatasan pada pengadaan kendaraan dinas.

3. Penguatan quality control terhadap belanja daerah.

Adapun target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023

NO.	URAIAN	TAEGET RPJMD TAHUN 2023	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	1.000.600.965.279	1.106.727.644.967	1.013.052.507.381	-93.675.137.586	-9,25
05.01	Belanja Operasi	762.409.291.112	745.551.447.338	763.098.578.964	17.547.131.626	2,30
05.01.01	Belanja Pegawai	446.566.883.898	463.544.059.073	424.345.446.510	-39.198.612.563	-9,24
05.01.02	Belanja Barang & Jasa	297.545.597.394	265.922.560.036	305.810.190.319	39.887.630.283	13,04
05.01.03	Belanja Bunga	3.122.260.474	3.191.298.036	1.530.000.000	-1.661.298.036	-108,58
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000	0
05.01.05	Belanja Hibah	15.174.549.346	12.893.530.193	30.212.942.135	17.319.411.942	57,32
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0	-	0
05.02	Belanja Modal	113.596.006.423	255.328.591.436	153.812.418.774	101.516.172.662	-66,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	12.326.684.844	9.893.530.193	4.352.717.492	-5.540.812.701	-127,30
05.04	Belanja Transfer	112.268.982.900	95.954.076.000	91.788.792.151	-4.165.283.849	-4,54
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.268.982.900	95.954.076.000	91.788.792.151	-4.165.283.849	-4,54
05.04.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
05.04.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-	-

Sumber : RPJMD Kab. Barru Tahun 2021-2026, RKPD Kab. Barru Tahun 2023, APBD Kab. Barru Tahun 2023

3.3.2.1 Perubahan Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai, Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil

Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja Barang dan jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana perubahan belanja operasi Kabupaten Barru meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan mengalami Peningkatan sebesar dari Rp. 420.471.284.060,- menjadi Rp. 424.345.446.510,00,-, memperhitungkan Pembayaran Gaji CPNS dan PPPK.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa diperkirakan mengalami Peningkatan dari Rp 261.047.928.017,- menjadi Rp. 305.810.190.319,- memperhitungkan dukungan terhadap pencapaian target kinerja, program prioritas pemerintah pusat dan persiapan pelaksanaan Pemilu.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga diproyeksikan tetap sebesar Rp. 1.530.000.000,-

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 6.717.730.441,- menjadi Rp 30.212.942.135,00,- untuk mengakomodir kebutuhan anggaran Pemilu sebesar 40 % di tahun 2023

3.3.2.2 Perubahan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/

pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan:

- 1) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Rencana perubahan belanja modal Kabupaten Barru diperkirakan mengalami Peningkatan dari Rp. 107.738.787.915,- menjadi Rp . 153.812.418.773,-, hal ini disamping untuk pembayaran kegiatan lanjutan dari tahun 2022, juga untuk mengejar pencapaian target kinerja yang sebelumnya dilakukan rasionalisasi karena adanya rasionalisasi anggaran pada APBD tahun 2022 dan dan APBD Pokok Tahun 2023.

3.3.2.3 Perubahan Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana perubahan belanja tak terduga Kabupaten Barru diperkirakan mengalami penurunan dari Rp. 5.165.015.000,- menjadi Rp. 4.352.717.492,-

3.3.2.4 Perubahan Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten Barru kepada pemerintah Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).

Belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan diproyeksikan tetap pada angka Rp. 91.788.792.151,-

3.3.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Adapun target perubahan pembiayaan daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2023

NO.	URAIAN	TAEGET RPJMD TAHUN 2022	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN	4.002.247.854	3.536.226.708	98.896.262.510	95.360.035.802	96,42
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.603.989.319	9.589.257.972	103.949.293.775	94.360.035.803	90,78
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.603.989.319	32.287.829.160	103.949.293.775	71.661.464.615	68,94
06.02.01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.601.741.465	6.053.031.264	5.053.031.265	999.999.999	-19,79
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah		3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	-50
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		3.053.031.264	3.053.031.265	0	0

Sumber : RPJMD Kab. Barru Tahun 2021-2026, RKPD Kab. Barru Tahun 2023, APBD Kab. Barru Tahun 2023

3.3.3.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan direncanakan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perubahan penerimaan SILPA dari Rp. 24.706.298.174,- menjadi Rp. 103.949.293.775,-, peningkatan ini disebabkan adanya beberapa kegiatan lanjutan dari tahun 2022.

3.3.3.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penyertaan Modal Daerah

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam

rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah

perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

a. DAK;

b. pinjaman daerah; dan

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 diproyeksikan tetap pada angka Rp. 5.053.031.265,-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 34 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, dimana penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan penggalan ke 2 (dua) RPJMD Kabupaten Barru Periode 2021-2026. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada perubahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota, evaluasi capaian, evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 triwulan I + bulan 4 dan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten Barru. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan (tahun 2023) menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan, seiring dengan telah ditetapkan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, disamping itu dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Barru fokus untuk melakukan pemulihan di beberapa sektor di antaranya terganggunya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas dan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor Industri dan pariwisata yang berakibat pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi dalam perencanaan kedepan melalui perubahan RKPD Tahun 2023.

Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian.

Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2023 mendasarkan dan memperhatikan pada:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2023.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi dan Kabupaten.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2023. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Selanjutnya substansi perubahan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2023 mengacu pada Perda Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 - 2026.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2021-2026. Adapun penjelasan Visi disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Penjelasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahterah baik secara ekonomi maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana dampak pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal dibelakang
	Bernafaskan keagamaan	Kondisi ideal dimana seluruh aktifitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.
7. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Adapun penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Periode 2021-2026

Pernyataan Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan Bernafaskan Keagamaan			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang difokuskan pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan	Sejahtera
2	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kondisi tentram, tertib dan aman melalui pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Sejahtera
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya local	Mencakup Upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah hingga mendorong pemanfaatan sumberdaya local dalam menunjang perekonomian daerah	Mandiri
4	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah dengan memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	Mandiri
5	Mewujudka pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Berkeadilan
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan pelayanan public yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi	Berkeadilan

7	Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilaiBernafaskan agama yang terdiri dari keagamaan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- c. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- d. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- e. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d. Memenuhi kriteria SMART-C

Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 yang mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan RKPD 2023
	Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan						
1	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya						
	1	Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,16	72,26	72,26
	1	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	65,31	70,28	70,28
	2	Sasaran : Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,92	76,93	76,93
	3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	11,27	11,35	11,35
2	Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local						
	2	Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Poin	0,64	0,72	0,72
	4	Sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%		0,009	0,009
	3	Tujuan : Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	0,05	7,25	7,25
	5	Sasaran : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	0,083	11,11	11,11
3	Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal						

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan RKPD 2023
	4	Tujuan : Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,28	0,28
	6	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	1,95	3,874	3,874
4	Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
	5	Tujuan : Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,91	5,91
	7	Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,27	52,52	52,52
	8	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,04	74	74
5	Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan						
	6	Tujuan : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,33	0,34	0,34
	9	Sasaran : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan Penurunan Angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,31	5,31
			Angka Kemiskinan	%	8,40	6,67	6,67
6	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi						
	7	Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	50,13	70	70

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan RKPD 2023
	10	Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Poin	57,34	65	65
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,96	3,7	3,7
7	Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama						
	8	Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	0,04	6,1	6,1
	11	Sasaran : Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	0,001

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 7 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 8 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 21 Indikator.

Tujuan dan sasaran pada Pembangunan Kabupaten Barru untuk Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sehingga visi misi pembangunan Kabupaten Barru dapat tercapai.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan target ketiga dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Penggalan ke lima arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, Penelaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2023 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah : **“Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja;
- 4. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2023 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel 4.4
Keselarasan Tema Pembangunan, Permasalahan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Barru

Tema Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama	Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	57,34	65
				Indeks Pelayanan Publik	3,96	3,7
	Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	65,31	70,28
			Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	75,92	76,93
			Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	11,27	11,35
	Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,31
				Angka Kemiskinan	8,40	6,67
	Masih rendahnya daya saing daerah	Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	50,27	51,94
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,04	74
	Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	1,95	3,874
	Belum optimalnya penciptaan lingkungan	Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana Dan	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,64	0,72

	yang kondusif	Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	0,083	11,11

Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung sasaran prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Adapun dukungan prioritas Kabupaten Barru terhadap sasaran prioritas pembangunan nasional dapat dilihat melalui indikator kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru yang sebagai berikut :

Tabel 4.5
Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran/Kegiatan Prioritas Nasional

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Target 2023	Prioritas Pembangunan Kab. Barru	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9 %	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi	5,91%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0%	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,31%
Rasio Gini	0,375-0,378	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Rasio Gini	0,34
Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	72,16
Tingkat Kemiskinan	7,0%-8,0%	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Tingkat Kemiskinan	6,67%
Emisi Gas Rumah Kaca	27,02%	-		-
Nilai Tukar Petani	103-105	-		-
Nilai Tukar Nelayan	105-107	-		-

Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2023

Sedangkan untuk prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah Prov. Sulsel	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Target Perub-RKPD Sulsel	Prioritas Pembangunan kab Barru 2023	Target perubahan RKPD Barru 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyelenggara n pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81 – 90)	Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel	70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	A (>80– 90)		65
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51- 5,00)		3,7
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	0,607	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	0,28
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	83,40		84,97
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 65,98 Juta	Percepatan Penanggulan gan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	47,08
			Tingkat Kemiskinan	7,45		6,67
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Penganggura n terbuka	4,46		5,31

4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Gini Rasio	0,381	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	0,34
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM	73,49	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	72,27
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	67,05		70,28
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,86		76,93
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembayaran Gender (IDG)	76,86		-
		Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	24.438 kasus		6,1 kasus
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,04-6,52	Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	5,91
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas total daerah	77.349.122		-
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH	72,84	Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	74
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi penurunan emisi GRK (Juta ton CO2Eq)	1.347		-

Untuk indikator kinerja sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sasaran Prioritas Provinsi Sulsel	Target Perubahan tahun 2023	Prioritas Kab. Barru	Indikator Kinerja Sasaran	Target Perubahan tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-6,52%	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,91%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,46%	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31%
Rasio Gini	0,381	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Rasio Gini	0,34
Indeks Pembangunan Manusia	73,49	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	72,16
Tingkat Kemiskinan (%)	7,45%	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	Tingkat Kemiskinan (%)	6,67%

Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2023

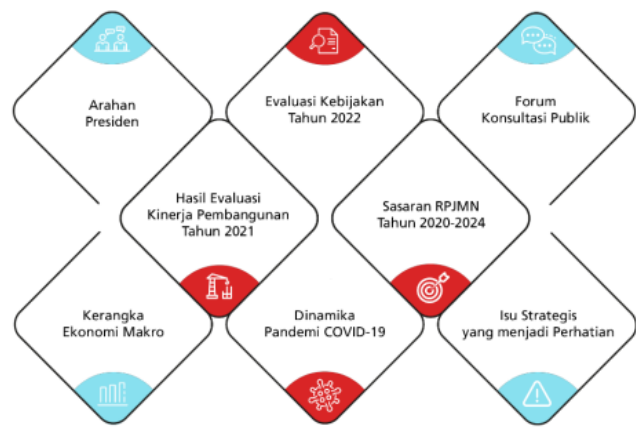
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2023 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2023 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

4.2.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Gambar 4.1
Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023

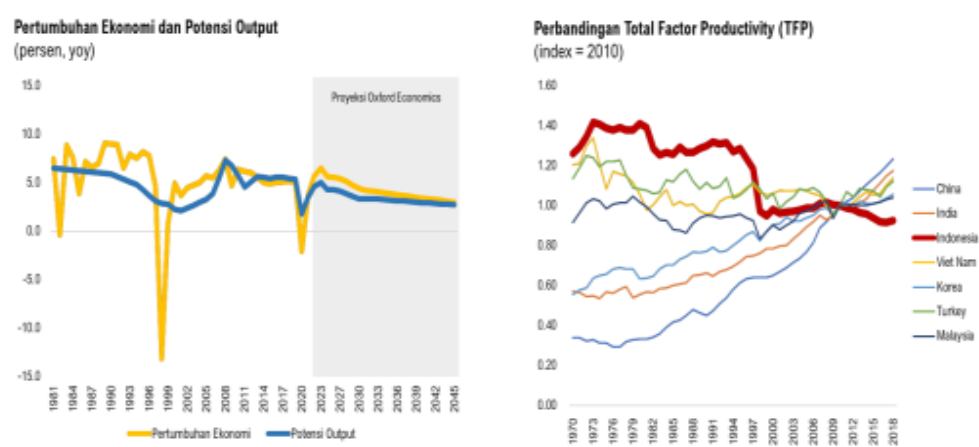


Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Grafik 4.1
Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas



Sumber: BPS, Oxford Economics, Asian Productivity Database, 2021

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata- rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

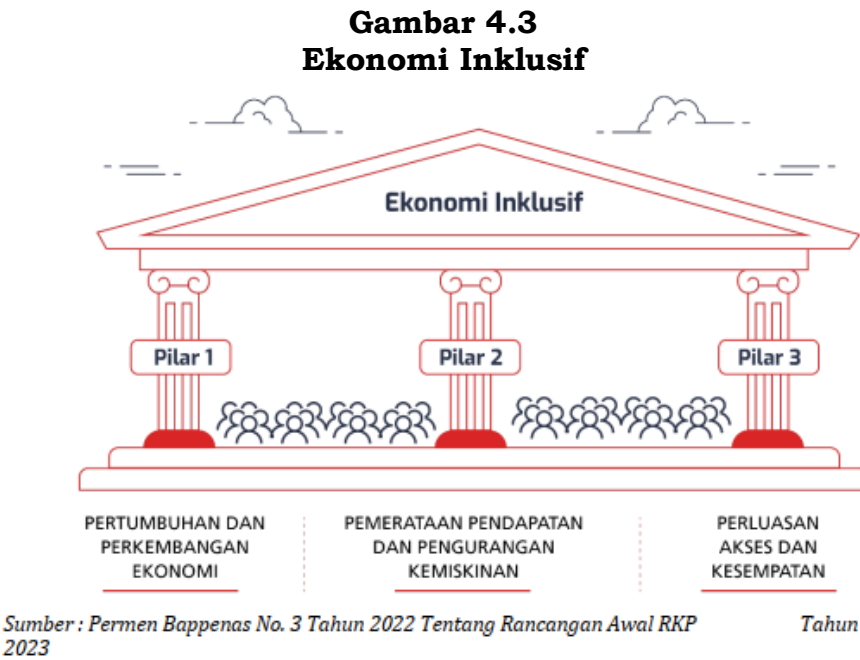
Gambar 4.2
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang paling terdampak negatif pandemi menjadi daerah percontohan atau pilot project melalui pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali Terintegrasi, (5) Bali Smart Island, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik yang perlu diadopsi oleh provinsi lain melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perludilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.



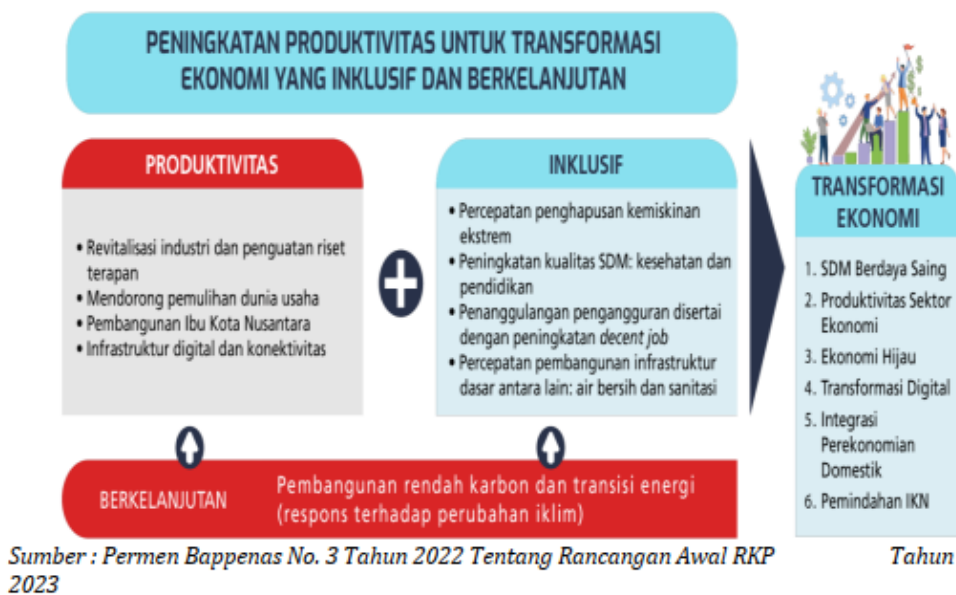
Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap

pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.4
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan

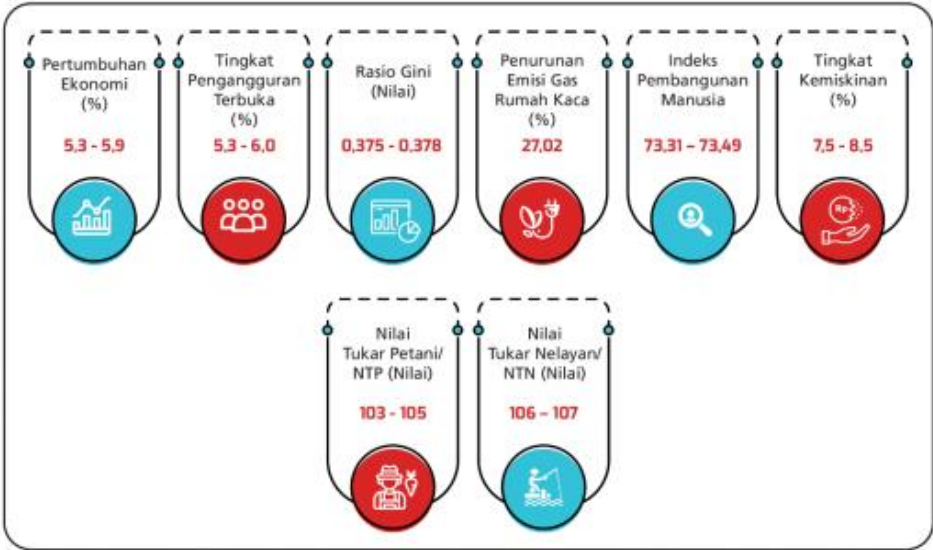
pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- 1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

Gambar 4.5
Sasaran Pembangunan Nasional



Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

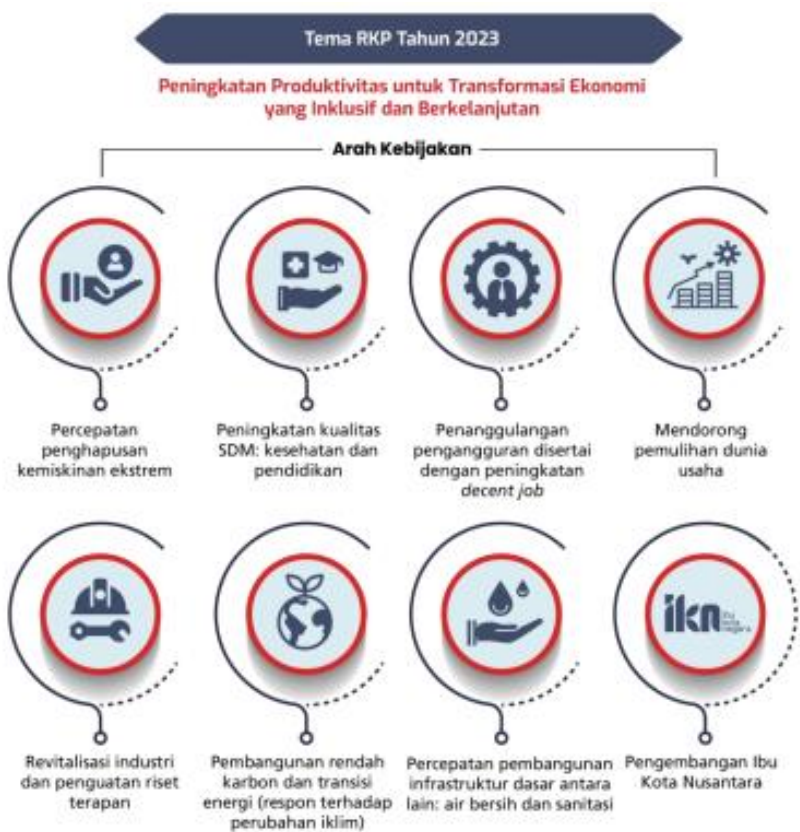
4.2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- 2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan;
- 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
- 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 4.6
Tema RKP Tahun 2023



Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis dibawah ini.

Gambar 4.7
Arah kebijakan pembangunan Tahun 2023

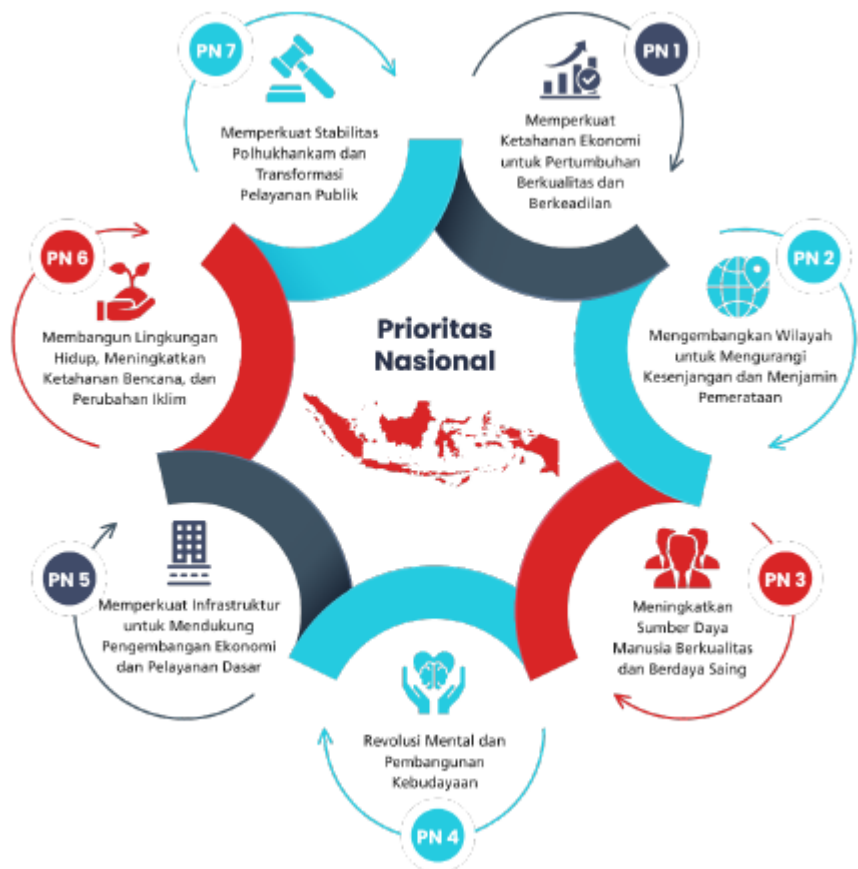


Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

4.2.1.3 Priroitas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

Gambar 4.8
Prioritas Pembangunan Nasional 2023



Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sasaran rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) KTI, (b) indeks pembangunan manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI
3. Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (a) menurunkan angka kematian ibu (AKI), (b) menurunkan angka kematian bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberkulosis (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks perlindungan anak (IPA), (b) indeks pembangunan gender (IPG), serta (c) indeks pembangunan pemuda (IPP)

- e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam word class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut :
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan indeks capaian revolusi mental, dan (b) peningkatan indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan.
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indeks pembangunan masyarakat.
 - d. Menguatkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalities kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang di modernisasi

- (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar track quality index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase caption on time performance (OTP) transportasi udara;
 - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
 - d. Meningkatnya layanan energi dari ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar 4G
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut :
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebahasaan, menguatnya kapasitas lembaga lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat

- kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintahan;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
 - c. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
 - e. Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

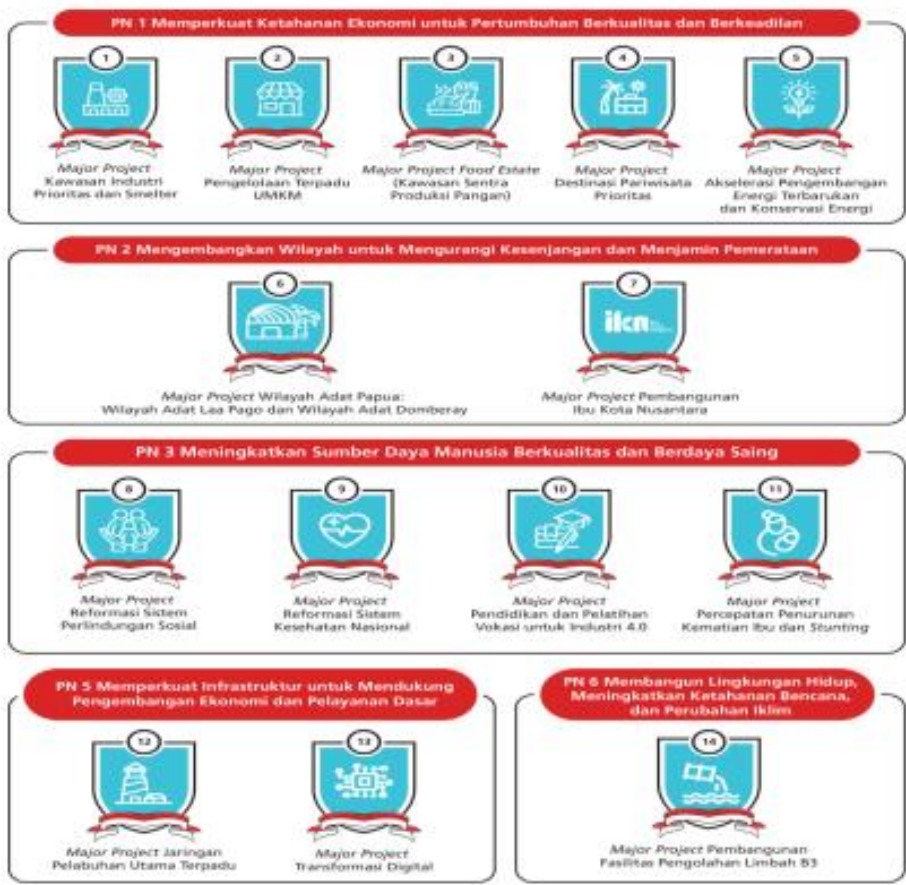
Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN Tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua:

Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar 4.9
Highlight Major Project RKP Tahun 2023



Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertaja pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting) guna memastikan

komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada Tahun 2024.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 2. Penguatan infrastruktur wilayah
- 3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- 4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
- 5. Peningkatan Pembangunan manusia
- 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- 7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P-RKPD 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/Angka	A (81 – 90)	BB (81 – 90)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/Angka	A (>80–90)	A (>80–90)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/Angka	A (4,51-5,00)	A (4,51-5,00)
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,607	0,565
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,40	83,40
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RKPD Tahun 2023	P-RKPD 2023
		masyarakat secara merata				
			7 Tingkat Kemiskinan	%	7,45	7,45
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8 Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	4,46
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9 Rasio	Angka	0,381	0,362
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10 IPM	Angka	73,05	73,49
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,42
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Indeks Kesehatan	Angka	77,86	77,86
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13 Indeks Pembayaran Gender (IDG)	Angka	76,86	76,86

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P-RKPD 2023
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka Kriminalitas	Kasus	24,438	24,438
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 – 6,52	5,04 – 6,52
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas total daerah	Rp/- Angkatan Kerja	77.349.122	81.628.228
8	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	Poin	72,84	74,91
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi penurunan emisi GRK (Juta ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1.347	1.428

Prioritas, strategi , arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan tahun 2023 yang meliputi :

Tabel 4.9
Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,04 - 6,52	5,04 - 6,52
2	PDRB per kapita (ADHB)	62,43	65,98	65,98
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – Agustus	4,51	5,69	4,46
	Jumlah Penganggur		256.110	256.110
4	Tingkat Kemiskinan	8,63	7,45	7,45
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,82	73,05	73,49
6	Gini Rasio (September)	0,365	0,381	0,362
7	Indeks Williamson	0,687	0,607	0,6565
8	Tingkat Inflasi (%)	3,01 - 1	3,01 - 1	3,01 - 1

Sumber : RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2023 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah : **Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 5. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- 6. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 7. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja;
- 8. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
- 9. Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah; dan Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan.

Prioritas pembangunan tahun 2023 ini kemudian diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru kemudian dijabarkan pada strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023
Kabupaten Barru

Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya			
Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Memaksimalkan penyediaan dan Kualitas layanan dasar pendidikan dan layanan kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kependidikan
	Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat		Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak
	Meningkatnya Kualitas daya beli masyarakat	Menjaga Daya Beli dan Mendorong Komsumsi Masyarakat	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal			
Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Pelaksanaan Pencatatan dan registrasi Budaya Lokal
Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal			
Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	mengoptimalkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah	Meningkatkan akses rumah layak huni
			Meningkatkan Kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan			
Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Meningkatkan daya dukung dan Kualitas Sumberdaya Ekonomi di sektor-sektor strategis	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital

	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Mewujudkan Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon	penanggulangan pencemaran/kerusakan SDA dan LH
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan			
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Mengoptimalkan pemerataan pendapatan melalui penanggulangan kemiskinan, Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja
			Optimalisasi Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi			
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama			
Meningkatkan Kualitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama	Peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama

Sumber : RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2022 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Barru

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU DALAM RPJMD TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET RKPD POKOK 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	57,34	65	65
		Indeks Pelayanan Publik	3,96	3,7	3,7
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	65,31	70,28	70,28
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	75,92	76,93	76,93
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	11,27	11,35	11,35

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,31	5,31
		Angka Kemiskinan	8,40	6,67	6,67
Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor- sektor strategis terhadap PDRB	50,27	51,94	51,94
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,04	74	74
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	1,95	3,874	3,874
Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana Dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,64	0,72	0,72
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	0,083	11,11	11,11

Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2022

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2023 yang meliputi antara lain :

Tabel 4.12
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,53	72,27	72,27
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,40	6,67	6,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,31	5,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,91	5,91
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	47,50	47,08	47,08
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,34	0,34

Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2023

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2023 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 alokasi pendanaan sebesar Rp. 1.106.727.644.967, sementara Perubahan RKPD 2023 diproyeksikan Rp. 1.013.052.507.381. hal ini mengalami penurunan karena tahun 2023 masih diasumsikan dalam masa pemulihan ekonomi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Barru sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dengan regulasi terkait pengelolaan keuangan Daerah yang juga sangat mempengaruhi struktur dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	2	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	996.598.717.425	1.058.778.310.996	914.156.244.871	144.622.066.125
04.01	Pendapatan Asli Daerah	111.344.324.467	81.127.696.557	104.354.004.055	23.226.307.498
04.02	Pendapatan Transfer	755.527.366.112	929.258.394.357	809.802.240.816	119.456.153.541
5	BELANJA DAERAH	1.000.600.965.279	1.106.727.644.967	1.013.052.507.381	-93.675.137.586
05.01	Belanja Operasi	762.409.291.112	745.551.447.338	763.098.578.964	17.547.131.626
05.02	Belanja Modal	113.596.006.423	255.328.591.436	153.812.418.774	101.516.172.662
05.03	Belanja Tidak Terduga	12.326.684.844	9.893.530.193	4.352.717.492	-5.540.812.701
05.04	Belanja Transfer	112.268.982.900	95.954.076.000	91.788.792.151	-4.165.283.849
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.268.982.900	95.954.076.000	91.788.792.151	-4.165.283.849
6	PEMBIAYAAN	4.002.247.854	3.536.226.708	98.896.262.510	95.360.035.802
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.603.989.319	9.589.257.972	103.949.293.775	94.360.035.803
06.02.01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.601.741.465	6.053.031.264	5.053.031.265	999.999.999

Sumber : Bappelitbangda dan BKAD Kabupaten Barru, diolah

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 10 (sepuluh) sasaran, dan 46 (Enam Puluh Satu) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.2

Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Pelebagaan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berakuntabilitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461.811.900	Level 1	421.283.502	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang Ukpbj	Level 2	350.000.000	Level 2	212.937.500	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) Yang Sesuai Peraturan Per Uu Dan Ditetapkan Tepat Waktu	100%	404.000.000	100%	227.815.350	BAPPELITBAN GDA
				Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Rpjmd	100%	120.000.000	100%	0	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Perda Apbd Tepat Waktu Dan Sesuai	100%	104.218.767.249	100%	1.149.008.500	BKAD

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
				Peraturan Per Undang-Undangan					
				Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	670.000.000	100%	99.315.239.143	BKAD
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke Bpk Ri Tepat Waktu	100%	710.000.000	100%	562.002.100	BKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	100%	1.097.333.830	100%	821.253.975	BKAD
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk)	B (61-80)	2.588.427.258	B (61-80)	736.548.150	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Jp Pertama	80%	1.145.006.500	80%	73.544.000	BKPSDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan Bpk) Dan Internal (Apip) Yang Telah Ditindaklanjuti	90	2.507.762.000	90	1.321.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Ktp-El	99%	246.649.500	99%	187.038.500	DINAS DUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	179.773.000	98%	172.773.000	DINAS DUKCAPIL
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	98,0	532.892.672	98,0	532.892.672	DINAS PMPTSPNAKE R
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud (Spm)	100	12.223.862.400	100	10.806.662.00 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts) (Spm)	100	44.108.950.779	100	33.255.861.77 2	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesataraan (Spm)	100	5.833.526.700	100	20.287.549.479	DINAS KESEHATAN
				Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	980.571.125	100	980.571.125	
				Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	193.395.810	100	193.395.810	
				Angka Status Gizi Masyarakat	91,57%	1.835.162.021	91,57%	1.835.162.021	
				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84%	660.559.630	84%	670.659.630	
				Indeks Keluarga Sehat	0,05	85.892.764.154	0,05	76.635.127.955	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
				Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%	8.080.000	100%	8.080.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sdm Kesehatan Yang Kompeten Sesuai Standar Dan Peraturan Perundang-Undangan	83%	49.402.000	100%	49.402.000	DINAS KESEHATAN
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Penduduk Yang Menerapkan Phbs	80	187.136.000	80	187.136.000	DINAS KESEHATAN
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,73%	302.000.000	0,73%	202.000.000	DINAS PMDPPKBPPP A
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	700	113.000.000	100	113.000.000	DINAS PMDPPKBPPP A
			Peningkatan Pengawasan Terhadap Harga Bahan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	68	140.000.000	64	140.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat							

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	≥10	54.353.617	≥10	54.000.000	DINAS KOP, UKM & DAG
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.202	57,3	154.393.500	DINAS TENAGA KERJA
	Optimalisasi Perlindungan, Dan Jaminan Masyarakat Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	12,1	195.708.271	1,63	101.496.000	DINAS TENAGA KERJA
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100	75.931.630	100	157.983.500	DINAS SOSIAL
				Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100	42.000.000	100	16.167.375	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
				Di Luar Panti (Spm)					
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.000	100	16.167.375	
				Persentase Warga Negara/Gelandang an Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	78.100.000	100	33.670.625	
				Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	60.900.000	100	91.978.125	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	538.683.987	100	428.068.000	DINAS SOSIAL
			Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	10,55%	2.806.600.000	10,55%	2.800.000.000	DINAS KOP, UKM & DAG

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Yang Berskala Mikro					
			Program Pengembangan Ukm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	0,90%	321.838.897	0,90%	321.838.897	DINAS KOP, UKM & DAG
Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Pma Dan Pmdn	350 M	335.604.949	350 M	335.604.949	DINAS PMPTSP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	4 %	1.550.400.000	4 %	1.669.383.417	DINAS PERIKANAN
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah Perikanan	1393 Ton	250.920.000	1406,99 Ton	313.440.000	DINAS PERIKANAN
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	5.478.986.370	2%	5.478.986.370	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAA N, DAN OR

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	7,45	417.883.501	7,45	417.883.501	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	7,48%	2.047.450.000	7,48%	1.871.650.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2,95%	350.000.000	2,95%	525.800.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,47%	9.507.500.000	1,47%	3.883.150.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Sda Dan Lh	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28	260.458.733	28	96.670.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	81,63	1.598.950.000	81,63	3.873.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Akses Rumah Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani	54,49	8.000.000.000	54,49	7.935.000.000	DINAS PUPR, PKP & PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan			Oleh Jaringan Irigasi					
				Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	6,54	13.425.590.971	6,54	1.148.700.000	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari (Spm)	98,31 Layak Dan 66,31 Aman	1.651.045.360	98,31 layak dan 66,31 aman	500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Spm)	100	3.764.022.649	100	500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Penyelenggaraa n Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	74,64	38.863.998.923	70,63	134.243.543.2 00	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Spm)	100	1.607.775.000	100	1.010.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Spm)	100	300.000.000	0	0	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan Memiliki Kelengkapan Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	55,00	348.025.450	57,00	348.025.450	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Melalui Dermaga/Kapal Laut	2%	2.105.160.966	2%	0	DINAS PERHUBUNGAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana Dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Spm)	100	45.000.000	100	45.000.000	BPBD
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Spm)	100	424.145.421	100	424.145.421	
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Spm)	100	150.000.000	100	150.000.000	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran)	100	1.672.317.476	100	1.727.999.111	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Waktu Tanggap (Rensponse Time)	15	55.681.636	15	55.681.635	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2023	OPD
			Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana Alam Dan Social Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Spm)	100	335.634.088	100	180.468.500	DINAS SOSIAL
	Pelaksanaan Pencatatan Dan Registrasi Budaya Lokal	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Dan Karya Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,22	657.000.000	0,22	831.241.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Budaya Lokal Dan Situs Bersejarah Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,75	181.450.000	0,75	103.886.725	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru

5.3 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk Perubahan Tahun 2023

Untuk rencana program Kabupaten Barru Perubahan Tahun 2023 dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Perubahan Tahun 2023 beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.3 :

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan P-RKPD Tahun 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB				
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif								
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan						
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1					BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA										237.116.169.204	237.216.892.259	100.723.055	Disdikbud
1	1	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan		236.031.532.606	236.031.532.606	-	Disdikbud					
1	1	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2338 Orang	236.031.532.606	236.031.532.606	-	Disdikbud					
1	1	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/ fungsional/ struktural	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/ fungsional/ struktural		30.501.000	10.167.000	-	20.334.000	Disdikbud				
1	1	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	30.501.000	10.167.000	-	20.334.000	Disdikbud				
1	1	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		363.503.150	395.575.750		32.072.600	Disdikbud				
1	1	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	46.523.250	53.223.250		6.700.000	Disdikbud				
1	1	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	316.979.900	342.352.500		25.372.600	Disdikbud				
1	1	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000	20.000.000	-	Disdikbud					
1	1	1	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	20.000.000	-	Disdikbud					
1	1	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		496.354.704	496.354.704	-	Disdikbud					
1	1	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	198.164.000	198.164.000	-	Disdikbud					
1	1	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	153.163.704	153.163.704	-	Disdikbud					
1	1	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	145.027.000	145.027.000	-	Disdikbud					
1	1	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		174.277.744	263.262.199		88.984.455	Disdikbud				
1	1	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rupa	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rupa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rupa	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rupa	53 Unit	60.900.000	60.900.000	-	Disdikbud					
1	1	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	10.725.000	10.725.000	-	Disdikbud					

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
												Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	1	1	2	09	09		Pemennaraan/kenaomtasi Gedung Kantor dan	Juman Gedung Kantor dan	Pemennaraan/kenaomtasi Gedung Kantor dan	Juman Gedung Kantor dan	1 Unit	102.652.744	191.637.199	88.984.455	Disdikbud	
										LANJUTAN			88.984.455	88.984.455	Disdikbud	
															Disdikbud	
1	1	2					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			68.313.553.851	69.717.334.385	1.403.780.534	Disdikbud	
							APM PAUD		APM PAUD	100%					Disdikbud	
							APM SD		APM SD	100%					Disdikbud	
							APM SMP		APM SMP	100%					Disdikbud	
1	1	2	2	01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)		33.255.861.772	34.222.063.848	966.202.076	Disdikbud	
1	1	2	2	01	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	Disdikbud	
1	1	2	2	01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		786.348.157	805.570.357	19.222.200	Disdikbud	
										LANJUTAN			19.222.200	19.222.200	Disdikbud	
1	1	2	2	01	04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		1.422.348.803	1.422.348.803	-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 7 BARRU		UPTD SD NEGERI 7 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 18 BARRU		UPTD SD NEGERI 18 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 78 BARRU		UPTD SD NEGERI 78 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 132 BARRU		UPTD SD NEGERI 132 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 151 BARRU		UPTD SD NEGERI 151 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 179 BARRU		UPTD SD NEGERI 179 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 183 BARRU		UPTD SD NEGERI 183 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 195 BARRU		UPTD SD NEGERI 195 BARRU					-	Disdikbud	
							UPTD SD NEGERI 24 BARRU		UPTD SD NEGERI 24 BARRU					-	Disdikbud	
1	1	2	2	01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		4.286.392.945	5.170.629.888	884.236.943	Disdikbud	
							Pembangunan Pagar UPTD SDN 99 BARRU					102.980.490	102.980.490	-	Disdikbud	
							Pembangunan Pagar UPTD SDN 18 BARRU					154.470.735	154.470.735	-	Disdikbud	
							Pembangunan Pagar UPTD SDN 77 BARRU					185.364.882	185.364.882	-	Disdikbud	
							Pembangunan Pagar UPTD SDN 113 BARRU					187.424.491	187.424.491	-	Disdikbud	
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 117 BARRU					50.513.520	50.513.520	-	Disdikbud	
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 29 BARRU					152.592.925	152.592.925	-	Disdikbud	
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 181 BARRU					115.760.150	115.760.150	-	Disdikbud	
							Pembangunan Lab. Komputer UPTD SD NEGERI 118					261.297.917	261.297.917	-	Disdikbud	
							Pembangunan Lab. Komputer UPTD SD NEGERI 178 BARRU					261.297.917	261.297.917	-	Disdikbud	

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	1	2	2	01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		186.929.640	186.929.640	-	Disdikbud		
							Pembanguan Perumahan Guru UPTD SDN 164 BARRU				180.000.000	180.000.000	-	Disdikbud		
1	1	2	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		7.400.472.627	7.447.916.135	47.443.508	Disdikbud		
							Rehab Plafond UPTD SDN 76 BARRU				39.194.688	39.194.688	-	Disdikbud		
							Rehab Ruang Kelas dan Kantor UPTD SD NEGERI 181 BARRU				2.204.701.177	2.204.701.177	-	Disdikbud		
							Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 172 BARRU/ Kelas Jauh Labaka				182.908.542	182.908.542	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 115 BARRU				509.530.939	509.530.939	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas dan WC UPTD SDN 118 BARRU				1.698.436.462	1.698.436.462	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 121 BARRU				274.362.813	274.362.813	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 167 BARRU				182.908.542	182.908.542	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 46 BARRU				274.362.813	274.362.813	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 63 BARRU				783.893.752	783.893.752	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 66 BARRU				117.584.063	117.584.063	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 70 BARRU				274.362.813	274.362.813	-	Disdikbud		
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN 96 BARRU				274.362.813	274.362.813	-	Disdikbud		
							Rehab Plafond UPTD SDN 93 BARRU				78.389.375	78.389.375	-	Disdikbud		
							Rehab Atap Plafond UPTD SDN 90 BARRU				130.648.959	130.648.959	-	Disdikbud		
							Rehab Atap Plafond UPTD SDN 82 BARRU				39.194.688	39.194.688	-	Disdikbud		
							Rehab Atap Plafond UPTD SDN 91 BARRU				39.194.688	39.194.688	-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 195 BARRU (Binuang)			UPTD SD NEGERI 195 BARRU (Binuang)			-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 41 BARRU (Lipukasi)			UPTD SD NEGERI 41 BARRU (Lipukasi)			-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 148 BARRU (5%-10%)			UPTD SD NEGERI 148 BARRU (5%-10%)			-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 67 BARRU (10%-15%)			UPTD SD NEGERI 67 BARRU (10%-15%)			-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 188 BARRU			UPTD SD NEGERI 188 BARRU			-	Disdikbud		
							UPTD SD NEGERI 102 BARRU			UPTD SD NEGERI 102 BARRU			-	Disdikbud		
									LANJUTAN			47.443.508	47.443.508	Disdikbud		
1	1	2	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		218.731.000	238.731.000	20.000.000	Disdikbud		
							UPTD SDN 128 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
							UPTD SDN 85 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud
							UPTD SDN 158 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud
							UPTD SDN 62 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud
							UPTD SDN 13 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud
							UPTD SDN 70 BARRU				32.000.000	32.000.000	-	Disdikbud
								POKIR/Hj. ASMIRAH HAMID	Sarana Pendidikan (Meja, Kursi, Papan Tulis) SD BACU-BACU	1 Paket		20.000.000	20.000.000	Disdikbud
1	1	2	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		-	-	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.075.048.600	1.075.048.600	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		375.000.000	375.000.000	-	Disdikbud
							Pengadaan Peralatan TIK UPTD SDN 26 BARRU				125.000.000	125.000.000	-	Disdikbud
							Pengadaan Peralatan TIK UPTD SDN 34 BARRU				125.000.000	125.000.000	-	Disdikbud
							Pengadaan Peralatan TIK UPTD SDN 69 BARRU				125.000.000	125.000.000	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		488.525.000	483.996.900	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	24	Penyiapan dan tindak lanjut Pkbsesi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Diambangi dan	Penyiapan dan tindak lanjut Pkbsesi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Diambangi dan		73.484.700	78.573.025	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		388.102.800	383.342.000	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		403.110.000	403.110.000	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		422.795.100	422.295.100	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah menengah Dasar yang Dikelola dan Dambangi	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dikelola dan Dambangi		108.592.400	108.592.400	-	Disdikbud
1	1	2	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		15.619.980.000	15.619.980.000	-	Disdikbud
1	1	2	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP)		20.287.549.479	20.623.405.443	-	Disdikbud
1	1	2	2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		661.410.353	661.410.353	-	Disdikbud

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	1	2	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1.696.297.864	1.759.248.574	62.950.710	Disdikbud
									LANJUTAN			62.950.710	62.950.710	Disdikbud
1	1	2	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		256.516.197	256.516.197	-	Disdikbud
1	1	2	2	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		-	-	-	Disdikbud
1	1	2	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2.894.239.353	3.152.035.367	257.796.014	Disdikbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 19 BARRU				100.000.000	100.000.000	-	Disdikbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 15 BARRU				100.000.000	100.000.000	-	Disdikbud
							Pemb. Ruang Lab. Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 33 BARRU (DAU)				612.416.994	612.416.994	-	Disdikbud
							Pemb. Ruang Perpustakaan UPTD SMP NEGERI 17 BARRU				551.175.294	551.175.294	-	Disdikbud
							Pemb. Ruang Lab. Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 29 BARRU (DAK)				613.183.000	613.183.000	-	Disdikbud
							Pemb. Ruang Lab. Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 31 BARRU (DAK)				613.183.000	613.183.000	-	Disdikbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 24 BARRU				205.960.980	205.960.980	-	Disdikbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 35 BARRU				102.980.490	102.980.490	-	Disdikbud
									LANJUTAN			163.451.014	163.451.014	Disdikbud
								POKIR/SYAHRUL RAMDANI, ST	Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Bal	100 M		100.000.000	100.000.000	Disdikbud
1	1	2	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.432.371.012	1.448.349.852	15.978.840	Disdikbud
							Rehabilitasi Ruang Kelas SATAP 21 BARRU				264.564.141	264.564.141	-	Disdikbud
							Rehabilitasi Ruang Kelas SMP NEGERI 6 BARRU				264.564.141	264.564.141	-	Disdikbud
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SMP NEGERI 11 BARRU				231.493.624	231.493.624	-	Disdikbud
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SMP NEGERI 12 BARRU				347.240.435	347.240.435	-	Disdikbud
							Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SMP NEGERI SATAP 30 BARRU				148.817.329	148.817.329	-	Disdikbud
							Rehab UPTD SMPN 20 BARRU				115.746.812	115.746.812	-	Disdikbud
									LANJUTAN			15.978.840	15.978.840	Disdikbud

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
												Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	1	2	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		66.205.000	66.205.000	-	Disdikbud		
1	1	2	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		-	-	-	Disdikbud		
1	1	2	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2.286.266.200	2.286.266.200	-	Disdikbud		
1	1	1	2	02	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		-	-	-	Disdikbud		
1	1	1	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		353.394.200	352.782.500	-	611.700	Disdikbud	
1	1	1	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		26.856.500	26.848.600	-	7.900	Disdikbud	
1	1	2	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		430.340.500	430.090.500	-	250.000	Disdikbud	
1	1	2	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		126.100.000	126.100.000	-	Disdikbud		
1	1	2	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pengembangan Karir	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pengembangan Karir		188.129.300	188.129.300	-	Disdikbud		
1	1	2	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		56.983.000	56.983.000	-	Disdikbud		
1	1	2	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		9.812.440.000	9.812.440.000	-	Disdikbud		
1	1	2	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM PAUD)		10.806.662.000	10.908.384.494		101.722.494	Disdikbud	
1	1	2	2	03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		209.875.000	257.766.380	47.891.380	Disdikbud		
							Pembangunan PAUD Nurul Asma Kiru-Kiru Sebrang				200.000.000	200.000.000	-	Disdikbud		
									LANJUTAN			47.891.380	47.891.380	Disdikbud		
1	1	2	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		558.564.000	612.395.114	53.831.114	Disdikbud		
							Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Kartini Madello				156.750.000	156.750.000	-	Disdikbud		
							Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Macora Bojo				156.750.000	156.750.000	-	Disdikbud		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
							Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya TK Kartini Madello				108.069.150	108.069.150	-	Disdikbud
							Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya TK Macora Bojo				108.069.150	108.069.150	-	Disdikbud
									LANJUTAN			53.831.114	53.831.114	Disdikbud
1	1	2	2	03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		4.198.777.900	4.198.777.900	-	Disdikbud
1	1	2	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		5.613.490.000	5.613.490.000	-	Disdikbud
1	1	2	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		132.892.600	132.892.600	-	Disdikbud
1	1	2	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		93.062.500	93.062.500	-	Disdikbud
1	1	2	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)		3.963.480.600	3.963.480.600	-	Disdikbud
1	1	2	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		3.963.480.600	3.963.480.600	-	Disdikbud
1	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pengembangan Kurikulum Muatan Lokal				-	Disdikbud
1	01	03	2	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum yang ditetapkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum yang ditetapkan				-	Disdikbud
1	01	03	2	01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen KD Mulok	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen KD Mulok				-	Disdikbud
1	01	03	2	01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus				-	Disdikbud
1	01	03	2	01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku Teks Pelajaran Mulok	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku Teks Pelajaran Mulok				-	Disdikbud
1	01	03	2	01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Mulok	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Mulok				-	Disdikbud

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik berkualifikasi S1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik berkualifikasi S1				-	Disdikbud	
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan Pendidik	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan Pendidik				-	Disdikbud	
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	Disdikbud	
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan				-	Disdikbud	
1	01	05				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Pengendalian Perizinan Pendidkan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Pengendalian Perizinan Pendidkan				-	Disdikbud	
1	01	05	2			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	
1	01	05	2	01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	
1	01	05	2	01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	
1	01	05	2	02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	
1	01	05	2	02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	
1	01	05	2	03	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					-	Disdikbud	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	01	05	2	04	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat				-	Disdikbud	
1	01	06				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan bahasa dan sastra daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan bahasa dan sastra daerah				-	Disdikbud	
1	01	06	2	01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	Disdikbud	
1	01	06	2	01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah				-	Disdikbud	
1	01	06	2	01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota					-	Disdikbud	
1	01	06	2	01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah				-	Disdikbud	
1	2					BIDANG KESEHATAN									
02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3	122.712.782.412	132.620.407.079	9.907.624.667	Dinas Kesehatan	
02	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1.000.000	922.000	- 78.000	Dinas Kesehatan	
02	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.000.000	922.000	- 78.000	Dinas Kesehatan	
02	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	67.440.000.000	61.716.004.409	- 5.723.995.591	Dinas Kesehatan	
02	01	2	02	01		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 orang	67.440.000.000	61.716.004.409	- 5.723.995.591	Dinas Kesehatan	
02	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpuhuan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpuhuan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	627.458.000	535.802.600	- 91.655.400	Dinas Kesehatan	
02	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	3.500.000	5.320.000	1.820.000	Dinas Kesehatan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	9.694.000	6.323.100	-	3.370.900	Dinas Kesehatan
02	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	125.264.000	47.148.000	-	78.116.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13.000.000		-	13.000.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12.000.000	6.820.000	-	5.180.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1104 laporan	464.000.000	470.191.500		6.191.500	Dinas Kesehatan
02	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		500.000		500.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	07	09				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		500.000		500.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 %	1.927.840.000	1.704.818.329	-	223.021.671	Dinas Kesehatan
02	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.000.000	91.287.400		66.287.400	Dinas Kesehatan
02	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	748.440.000	576.730.929	-	171.709.071	Dinas Kesehatan
02	01	2	08	03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.154.400.000	1.036.800.000	-	117.600.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	2.300.748.000	833.577.784	-	1.467.170.216	Dinas Kesehatan
02	01	2	09	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	431.000.000	100.550.000	-	330.450.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	147.950.000	20.750.000	-	127.200.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			45 unit	5.000.000	-	-	5.000.000	Dinas Kesehatan
02	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	1.716.798.000	712.277.784	-	1.004.520.216	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kesehatan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kesehatan BLUD	1 unit	50.415.736.412	67.828.781.957		17.413.045.545	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	02	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	50.415.736.412	17.615.927.826	-	32.799.808.586	Dinas Kesehatan
										1 unit		50.212.854.131	50.212.854.131		Dinas Kesehatan
02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT			150.690.587.476	86.835.174.147	-	63.855.413.329	Dinas Kesehatan
							Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)		Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100 %	980.571.125	1.315.444.060		334.872.935	Dinas Kesehatan
							Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)		Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100 %	193.395.810	595.629.068		402.233.258	Dinas Kesehatan
							Angka Status Gizi Masyarakat		Angka Status Gizi Masyarakat	91,57 %	1.835.162.021	4.774.438.880		2.939.276.859	Dinas Kesehatan
							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84 %	670.659.630	4.345.140.416		3.674.480.786	Dinas Kesehatan
							Indeks Keluarga Sehat		Indeks Keluarga Sehat	0,5	76.635.127.955	71.068.075.365	-	5.567.052.590	Dinas Kesehatan
							Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)		Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	1 %	8.080.000	908.866.500		900.786.500	Dinas Kesehatan
							Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan		Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan	77000	70.367.590.935	3.827.579.858	-	66.540.011.077	Dinas Kesehatan
02	2	01				Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhihan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhihan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	83,33 %	96.173.046.120	25.131.567.802	-	71.041.478.318	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	01		Pembangunan rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				20.464.520.000		-	20.464.520.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	02				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			158.512.150		158.512.150	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 unit	5.781.700.000	5.878.225.194		96.525.194	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	05		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 unit	13.563.789.346	1.237.057.695	-	12.326.731.651	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	02	2	01	06		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan renovasi/penambahan ruang	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan renovasi/penambahan ruang	6 unit		3.218.186.438	3.218.186.438	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	08		Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dsn Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1.500.000.000	-	1.500.000.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	01	09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinkes+UPTD	1 pkm		3.000.000.000	-	3.000.000.000	Dinas Kesehatan	
						Rehab lahan parkir Puskesmas Doi doi		PKM Doi-Doi					-	Dinas Kesehatan	
02	02	2	01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes+UPTD	2 faskes	2 faskes 500000000	500.000.000	-	500.000.000	Dinas Kesehatan	
						Rehab gedung Pustu Tompo Lemo-Lemo	Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan	PKM Ralla					-	Dinas Kesehatan	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu Pao-Pao	Desa Pao-Pao	PKM Pancana					-	Dinas Kesehatan	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya (Pukesmas Pembantu)	Buttue (Garessi)	PKM Pekkae					-	Dinas Kesehatan	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (pembangunan Pagar Pustu)	RT.02 Dusun Lalabata/Desa pao-Pao	PKM Pancana					-	Dinas Kesehatan	
						Pemasangan Paving Block Halaman Pustu Anabanua Desa Anabanua	Desa Anabanua	PKM Palakka					-	Dinas Kesehatan	
						Rehab Pustu Siawung Desa Siawung	Desa Siawung	PKM Padongko					-	Dinas Kesehatan	
02	02	2	01	11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinkes+UPTD	2 rumdis		600.000.000	-	600.000.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	01	13		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 unit	1.201.974.920	2.435.720.699	1.233.745.779	Dinas Kesehatan	
											3.450.000.000	-	3.450.000.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	193 unit	4.453.348.672	3.710.714.789	-	742.633.883	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
										3 unit	31.389.281.589	2.590.522.163	-	28.798.759.426	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	99 item	5.000.000.000	1.508.204.969	-	3.491.795.031	Dinas Kesehatan
										1 paket		2.407.013.702	2.407.013.702		Dinas Kesehatan
02	02	2	01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	49 item	4.968.431.593	1.812.410.003	-	3.156.021.590	Dinas Kesehatan
02	02	2	01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	244 Unit	300.000.000	175.000.000	-	125.000.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhihan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhihan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	53.690.761.006	61.598.367.345		7.907.606.339	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	01		Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM)	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM)	3402 ibu hamil	230.032.550	1.236.920.560		1.006.888.010	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	02		Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	3199 Ibu bersalin	750.538.575	78.523.500	-	672.015.075	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	03		Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	3109 Bayi	127.149.910	188.554.460		61.404.550	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	12618 Balita	66.245.900	407.074.608		340.828.708	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	4651 Jiwa	36.082.250	515.230.000		479.147.750	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	120204 Jiwa	8.080.000	908.866.500		900.786.500	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	22820 Jiwa	242.677.750	1.915.481.800		1.672.804.050	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	49172 Jiwa	10.100.000	27.813.500		17.713.500	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	3082 Jiwa	6.060.000	193.334.490		187.274.490	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	02	2	02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (SPM)	437 Jiwa	10.100.000	101.265.000	91.165.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	11		Pengelolaan PelayananKesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan PelayananKesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	4600 Jiwa	30.300.000	994.492.412	964.192.412	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	3760 Jiwa	25.250.000	879.003.000	853.753.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduiduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				23.502.700	11.200.000	-	12.302.700	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				7.070.000	15.500.000		8.430.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dok	1.556.402.021	2.343.727.080	787.325.059	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	16		Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dok	34.211.225	83.676.000	49.464.775	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	17		Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dok	353.500.000	424.068.200	70.568.200	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dok	371.639.600	531.447.600	159.808.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dok	42.462.420	19.128.000	-	23.334.420	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	20		Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dok	13.938.000	212.866.400	198.928.400	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	31122 Jiwa	10.100.000	65.646.600	55.546.600	Dinas Kesehatan	
02	02	2	02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dok	533.714.300	481.302.195	-	52.412.105	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	02	2	02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				7.070.000	-	-	7.070.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dok	141.400.000	1.637.167.014		1.495.767.014	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	31.727.953.137	44.414.518.926		12.686.565.789	Dinas Kesehatan
							Penambahan Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Palakka	Desa Palakka						-	Dinas Kesehatan
							Penambahan kartu BPJS Keshatan untuk warga	Desa Gattareng						-	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dok	127.332.350	95.831.500	-	31.500.850	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32		Operasional pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.868.000.000		-	1.868.000.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dok	12.120.000.000	2.291.798.000	-	9.828.202.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota				500.000.000		-	500.000.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit	777.780.800	132.219.000	-	645.561.800	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	36		investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Lap	17.069.000	19.950.000		2.881.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dok	368.699.930	186.902.000	-	181.797.930	Dinas Kesehatan
02	02	2	02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13 Dok	1.546.298.587	1.184.859.000	-	361.439.587	Dinas Kesehatan
02	03	2	03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi		786.850.000	105.239.000	-	681.611.000	Dinas Kesehatan
02	03	2	03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	13 Dok	40.400.000	105.239.000		64.839.000	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	03	2	03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				146.450.000		-	146.450.000	Dinas Kesehatan
02	03	2	03	03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			0	600.000.000		-	600.000.000	Dinas Kesehatan
02	03	2	04			PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D SERTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasyankes yang mempunyai izin operasional				39.930.350		-	39.930.350	Dinas Kesehatan
02	03	2	04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				25.381.300		-	25.381.300	Dinas Kesehatan
02	03	2	04	04		Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				14.549.050		-	14.549.050	Dinas Kesehatan
02	03					<u>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</u>	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	<u>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</u>	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	49.402.000	798.566.932		749.164.932	Dinas Kesehatan
02	03	2	01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Barru	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Barru	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	100 %	16.502.158	16.295.000	-	207.158	Dinas Kesehatan
02	03	2	01	01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	7.562.001	7.465.000	-	97.001	Dinas Kesehatan
02	03	2	01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	8.940.156	8.830.000	-	110.156	Dinas Kesehatan
02	03	2	02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase peyusunan SDMk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase peyusunan SDMk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	12.356.471	62.845.400		50.488.929	Dinas Kesehatan
02	03	2	02	01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	6.120.600	5.794.400	-	326.200	Dinas Kesehatan
02	03	2	02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	35 orang	3.175.571	2.963.000	-	212.571	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
02	03	2	02	03		Pembinnan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinnan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	3.060.300	54.088.000	51.027.700	Dinas Kesehatan
02	03	2	03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis		20.543.371	719.426.532	698.883.161	Dinas Kesehatan
02	03	2	03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 orang	20.543.371	719.426.532	698.883.161	Dinas Kesehatan
02	04	2				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	100 %	169.140.000	402.648.000	233.508.000	Dinas Kesehatan
02	04	2	01			pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha				69.850.000	-	69.850.000	Dinas Kesehatan
02	04	2	01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				25.000.000	-	25.000.000	Dinas Kesehatan
02	04	2	01	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				44.850.000	-	44.850.000	Dinas Kesehatan
02	02	2	03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	100 %	30.000.000	402.648.000	372.648.000	Dinas Kesehatan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	02	2	03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dok	30.000.000	402.648.000	372.648.000	Dinas Kesehatan	
02	02	2	06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang-undangan				3.831.940	-	-	3.831.940	Dinas Kesehatan
02	02	2	06	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				3.831.940		-	3.831.940	Dinas Kesehatan
02	04	2	04			Kegiatan Penerbitan Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diterbitkan laik hygiene sanitasi sesuai standar peraturan perundang-undangan				52.397.285	-	-	52.397.285	Dinas Kesehatan
02	04	2	04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				52.397.285		-	52.397.285	Dinas Kesehatan
02	04	2	05			Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	Jumlah stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan				13.060.775		-	13.060.775	Dinas Kesehatan
02	04	2	05	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				13.060.775		-	13.060.775	Dinas Kesehatan
02	05					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	80 %	187.136.000	739.785.560	552.649.560	Dinas Kesehatan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
02	05	2	01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kel Siaga Aktif strata mandiri dan purnama				127.136.000	-	127.136.000	Dinas Kesehatan	
02	05	2	01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				127.136.000	-	127.136.000	Dinas Kesehatan	
02	05	2	02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Masyarakat yang telah menerapkan germas Hidup Bersih dan Sehat.				30.000.000	-	30.000.000	Dinas Kesehatan	
02	05	2	02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				30.000.000	-	30.000.000	Dinas Kesehatan	
02	05	2	03			Pengembangan dan Pelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan dan Pelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000	739.785.560	709.785.560	Dinas Kesehatan	
02	05	2	03	01		Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dok	30.000.000	739.785.560	709.785.560	Dinas Kesehatan	
1	3					BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
01	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 level	7.191.295.691	6.382.769.155	808.526.536	Dinas PUTR-PERKIM	
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JPL	104.000.000	63.314.000	40.686.000		
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	5.500.553.660	5.032.699.979	467.853.681	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 OB	5.500.553.660	5.032.699.979	467.853.681	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100 %	104.000.000	63.314.000	40.686.000	Dinas PUTR-PERKIM	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	81.209.700	63.314.000	-	17.895.700	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	22.790.300	-	-	22.790.300	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	407.203.750	364.780.100	-	42.423.650	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.250.000	2.500.000	-	3.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	118.750.000	85.951.000	-	32.799.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	10.256.250	-	-	10.256.250	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.125.000	29.700.000	-	33.425.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.687.500	7.700.000	-	4.987.500	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293 Laporan	196.135.000	238.929.100		42.794.100	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	452.806.451	335.549.000		-117.257.451	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	200.306.451	89.050.000	-	111.256.451	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	27.500.000	18.000.000	-	9.500.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	162.500.000	228.499.000		65.999.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	62.500.000	-	-	62.500.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 %	438.409.500	361.563.000	-	76.846.500	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	43.750.000	21.437.000	-	19.313.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	89.948.250	77.976.000	-	11.972.250	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13.461.250	12.550.000	-	911.250	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	291.250.000	249.600.000	-	41.650.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	392.322.330	288.177.076	-	104.145.254	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	23.906.250	19.760.000	-	4.146.250	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	144.150.000	36.830.000	-	107.320.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	174.766.080	204.959.400		30.193.320	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	20.000.000	-	-	20.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	17.147.676	-	2.852.324	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	9.500.000	9.480.000	-	20.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	54,49 %	7.935.000.000	2.811.328.670	-	5.123.671.330	Dinas PUTR-PERKIM
							persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	6,54 %	1.148.700.000	9.728.884.779		8.580.184.779	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun	0,592 KM	1.148.700.000	9.728.884.779	8.580.184.779	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.01	10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,142 KM	424.000.000	426.258.577	2.258.577	Dinas PUTR-PERKIM	
							Pembangunan Bronjong Sungai Ceppaga		Pembangunan Bronjong Sungai Ceppaga	0,072 KM	200.000.000	426.258.577		Dinas PUTR-PERKIM	
							Pembangunan Buronjong Sungai tetturange		Pembangunan Buronjong Sungai tetturange	0,07 KM	200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.01	12		Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,35 KM	127.200.000	208.365.605	- 127.200.000	Dinas PUTR-PERKIM	
									Pembangunan kanal banjir Lompo Tengah	0,35 KM		208.365.605		Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.01	18		Pembangunan Seawall dan Bangunan PengamanPantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Seawall dan Bangunan PengamanPantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,1 KM	397.500.000	245.245.710	- 152.254.290	Dinas PUTR-PERKIM	
									Pembangunan tanggul pantai polejiwa	0,1 KM		245.245.710		Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.01	37		Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0	0	-	-	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.01	54		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,5 KM		=		Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	2	2.01	12		Pembangunan Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 Paket	-	43.662.500	43.662.500	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	2	2.01	18		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (LANJUTAN)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (LANJUTAN)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 Paket	-	836.124.410	836.124.410	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	2	2.01	27		Rehabilitasi Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang di rehabilitasi	Rehabilitasi Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang di rehabilitasi	1 Paket	-	76.572.600	76.572.600	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	2	2.01	53		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (LANJUTAN)	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (LANJUTAN)	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Paket	-	376.185.800	376.185.800	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	2	2.01	54		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir (LANJUTAN)	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Paket	-	65.211.000	65.211.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	02	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik	0,25 KM	7.935.000.000	2.448.321.270	- 6.649.600.614	Dinas PUTR-PERKIM	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	02	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,25 KM	7.935.000.000	489.132.986	-	7.445.867.014	Dinas PUTR-PERKIM
							Rehab Irigasi Labuleng-Barang		Rehab Irigasi Labuleng-Barang	0,25 KM		489.132.986			Dinas PUTR-PERKIM
1	3	02	2.02	8		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	1 Paket	-	71.936.295		71.936.295	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	02	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 Paket	-	1.615.109.714		1.615.109.714	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	02	2.02	21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi yang beroperasi dan dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (LANJUTAN)	Panjang Jaringan Irigasi yang beroperasi dan dipelihara	1 Paket	-	272.142.275		272.142.275	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	70,63%%	134.243.543.200	72.909.518.850	-	61.334.024.350	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten	17,67 KM	134.243.543.200	72.909.518.850	-	61.334.024.350	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	10	2,01	0,5		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0	-	-	-	-	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	05		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		2.148.832.000	-	-	2.148.832.000	Dinas PUTR-PERKIM
															Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	06		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		2.440.925.600	-	-	2.440.925.600	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	08		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	17,67 KM	120.802.726.010	49.179.831.746	-	71.622.894.264	Dinas PUTR-PERKIM
							LakonraE-KaerengngE (R.17)		LakonraE-KaerengngE (R.17)	1400	24.880.500.000	46.607.831.746			Dinas PUTR-PERKIM
							Kaerengnge - Watu (R.19)		Kaerengnge - Watu (R.19)	520	6.285.600.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Ralla - Bette (R.02)		Ralla - Bette (R.02)	8180	7.682.400.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Cilellang - Barantang (R.41)		Cilellang - Barantang (R.41)	1106	1.920.600.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Takkalasi - Tompo (R.09)		Takkalasi - Tompo (R.09)	753,5	10.126.800.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Balusu - Padumpu (R.601)		Balusu - Paddumpu	756	1.396.800.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Parigi-Bungoro		Parigi-Bungoro	2200					
							Lajoanging-Cappabenteng		Lajoanging-Cappabenteng	1014					
							Kota Kec. Balusu (Jl. Masuk Lapangan)		Kota Kec. Balusu (Jl. Masuk Lapangan)	316	4.033.260.000				Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
							Reknstruksi Jalan Ruas Kota Kec. Barru (Samping RSU Barru)		Reknstruksi Jalan Ruas Kota Kec. Barru (Samping RSU Barru)	418	8.310.960.000			Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekonstruksi Jalan Ruas Ballewe - Waepubbu	125 m		372.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon. Jalan Ruas Siddo - Kiru2 (lanjutan)	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon. Jl. A. Holland Samping Timur Mesjid Jami Palanro	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Peningkatan Jalan Ceppaga - Bulobulo Kec. Pujananting (lanjutan)	80		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon jalan Maralleng-Ance Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Jalan Lawampang-Tompo (Batulappa)	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Jalan Ruas Bunne - Rumpia"E	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Jalan Limpo - Lappa Dare	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon. Ruas Jalan PekkaE-Cinekko	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Jl. H.M Sewang Depan SDN Coppo Kelurahan Coppo Kecamatan Barru (lanjutan)	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Ruas jalan Watu - Daccipong (akses pariwisata Celebes Canyon)	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Rekon Ruas JalanTabbatue - Cempae (peningkatan jalan dusun cempa)	80 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	09		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0	3.033.125.450	-	-	2.633.125.450	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	96,3 KM	1.060.000.000	2.200.000.000		1.140.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
							Pemeliharaan jalan 7 Kecamatan		Pemeliharaan jalan 7 Kecamatan	96,3 KM	1.060.000.000	2.200.000.000		1.140.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	72 m	7.182.000.000	870.533.176	-	6.311.466.824	Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Jemb. S. Pude'e		Pembangunan Jemb. S. Pude'e	42 m	726.000.000	670.533.176	-	55.466.824	Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Jembatan Gantung Di Lempo Loang Tanete Rilau	30 m		200.000.000		200.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Jembatan Gantung Nepo Mallusetasi (Lanjutan)	1 Unit		3.169.665.623		3.169.665.623	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	18		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	0		-	-	-	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	10	2,01	19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100m	848.000.000	300.000.000	-	548.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
							Pemeliharaan berkala Jembatan Sungai Lajari		Pemeliharaan berkala Jembatan Sungai Lajari		550.000.000				Dinas PUTR-PERKIM
							Pemeliharaan Jembatan 7 Kecamatan		Pemeliharaan Jembatan 7 Kecamatan		298.000.000				Dinas PUTR-PERKIM
1	3	10	2.01	5		Pembangunan Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dibangun	Pembangunan Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dibangun	1 Paket	-	3.462.682.385		3.462.682.385	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	10	2.01	8		Rekonstruksi Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1 Paket	-	13.712.827.020		13.712.827.020	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	10	2.01	12		Pembangunan Jembatan (LANJUTAN)	Panjang Jembatan yang Dibangun	Pembangunan Jembatan (LANJUTAN)	Panjang Jembatan yang Dibangun	1 Paket	-	3.169.665.623		3.169.665.623	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	10	2.01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan (LANJUTAN)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 Paket	-	13.978.900		13.978.900	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	35 %	507.265.489	2.417.314.055		1.910.048.566	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	06	2,01			Pengelolaan dan pengebangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Pengelolaan dan pengebangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	3735 m	507.265.489	2.417.314.055		1.910.048.566	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	06	2,01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3735 m	232.978.269	1.614.706.285		1.381.728.016	Dinas PUTR-PERKIM
							Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	235 m	114.108.820	114.706.285			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Drainase Ruas Jalan Lawallu - Tanrabalana (Dusun Lawallu)	500 m		200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Drainase Ruas Jalan Barru-Lakonrae (Lingkungan Mangempang)	500 m		200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Saluran Drainase Jalan H. A Unru	250 m		100.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Saluran Drainase Jalan Andi Kondang	250 m		100.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tompo Kaerengnge (Jl. H. Salma Lanjutan)	250 m		100.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Saluran Drainase Lapakaka	500		200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
									Pembangunan Saluran Ruas Jalan Pekkapao-Limpomajang (Saluran Air Poros Buttue Lajari) (Lanjutan)	500 m		200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
									Pembangunan Drainase Ruas Jalan Barru-Lakonrae (dusun Jeppe'e)	500		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
									Drainase Jalan Melati, Kab. Barru	250 m		200.000.000		Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	06	2,01	07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	-	-		274.287.219	-	274.287.219	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	6,00	2.01	5		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Paket	-	389.087.670	389.087.670	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	6,00	2.01	7		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1 Paket	-	390.965.650	390.965.650	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	6,00	2.01	12		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang di bangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (LANJUTAN)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang di bangun	1 Paket	-	22.554.450	22.554.450	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh akses kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota (SPM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh akses kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota (SPM)	98,31 layak dan 66,31 aman	500.000.000	1.261.841.375	761.841.375	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	03	2,01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten	260 SR	500.000.000	1.261.841.375	761.841.375	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	03	2,01	04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	260 SR	500.000.000	1.261.841.375	761.841.375	Dinas PUTR-PERKIM	
									Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	260 SR		1.261.841.375			
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100 %	500.000.000	227.191.000	-	272.809.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah	1000 RT	500.000.000	227.191.000	-	272.809.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01	06		Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0	200.000.000	-	-	200.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01	10		Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 unit	200.000.000	227.191.000		27.191.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01	16		Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0	100.000.000	-	-	100.000.000	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB	100 %	13.235.000.000	25.955.236.759	12.720.236.759	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	08	2,01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata	8 unit	13.235.000.000	25.955.236.759	12.720.236.759	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	08	2,01	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100 Dokumen	175.000.000	128.250.000 -	46.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	08	2,01	02		Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	8.725.021.400	8.725.021.400	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	08	2,01	12		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	8 unit	13.060.000.000	15.220.357.431	2.160.357.431	Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda OR		Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda OR	1 Unit	8.000.000.000	14.070.357.431		Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Rujab Ketua DPR		Pembangunan Rujab Ketua DPR	1 Unit	3.360.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Kantor dan Rujab Kepala Kejaksaan Negeri Barru		Rujab Kepala Kejaksaan Negeri Barru	1 Unit	1.700.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Gabungan Dinas		Pembangunan Gabungan Dinas	1 Unit	9.200.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Kantor Koramil 1405-7 Tanete Rilau		Rehabilitasi Kantor Koramil 1405-7 Tanete Rilau	1 Unit	241.762.503			Dinas PUTR-PERKIM
									Rehab lesplan atap kantor bupati	1 unit			250.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
									Selasar Kantor Bupati Barru	1 unit		700.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
									Rehabilitasi Kantor Lingkungan Hidup	1 unit		200.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	3	8,00	2,01	2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota (LANJUTAN)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota (LANJUTAN)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	1 Paket	-	814.971.811	814.971.811	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	8,00	2,01	12		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota (LANJUTAN)	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota (LANJUTAN)	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	1 Paket	-	1.066.636.117	1.066.636.117	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 %	990.000.000	516.558.800	-	473.441.200	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	12	2,01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ ditetapkan sesuai standart peraturan Perundang-undangan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ ditetapkan sesuai standart peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	990.000.000	516.558.800	-	473.441.200	Dinas PUTR-PERKIM
1	3	12	2,01	01		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRWKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRWKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	270.968.000	-	-	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	12	2,01	03		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	990.000.000	265.590.800			Dinas PUTR-PERKIM
1	4					BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	1.010.000.000	1.491.582.500		481.582.500	Dinas PUTR-PERKIM
							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)	0	-	-	-		
1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata	100 %	5.000.000	32.849.500		27.849.500	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.01	03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	5.000.000	32.849.500		27.849.500	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	45 Orang	5.000.000	4.631.000	-	369.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02	01		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	3.000.000	2.860.000	-	140.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02	04		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	15 Orang	2.000.000	1.771.000	-	229.000	Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	04	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Pemerintah	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Pemerintah	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah	100 Orang	1.000.000.000	1.454.102.000	454.102.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.03	01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100 Unit	980.000.000	1.454.102.000	474.102.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.03	02		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	20.000.000	-	20.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	-	644.800.000	-	644.800.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	644.800.000	-	644.800.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04	2.01	01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 0	644.800.000	-	644.800.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57%	348.025.450	4.659.023.713	4.310.998.263	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun	100	348.025.450	4.659.023.713	4.310.998.263	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05	2.01	01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	5.000.000	5.000.000	-	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05	2.01	02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	337.550.000	3.361.165.992	3.023.615.992	Dinas PUTR-PERKIM
							Jalan Beton Kompleks Perumahan		Jalan Beton Kompleks Perumahan		50.000.000	337.549.992		Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan jalan perkuburan pattunuang		Pembangunan jalan perkuburan pattunuang		50.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
							pembangunan bak penampungan air		pembangunan bak penampungan air		45.000.000			Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan jalan rabat beton		Pembangunan jalan rabat beton		92.550.000			Dinas PUTR-PERKIM
							Perintisan jalan pekuburan		Perintisan jalan pekuburan		94.524.550			Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	04	05	2.01	05		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5.475.450	5.463.500	-	11.950	Dinas PUTR-PERKIM	
1	4	5	2.01	2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (LANJUTAN)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (LANJUTAN)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Paket	-	1.287.394.221	1.287.394.221	Dinas PUTR-PERKIM	
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	73,00%	1.104.450.000	374.678.800	-	729.771.200	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.01			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100 %	150.000.000	148.657.800	-	1.342.200	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.01	02		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dok	150.000.000	148.657.800	-	1.342.200	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0	228.000.000	226.021.000	-	1.979.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.02	02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	228.000.000	226.021.000	-	1.979.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0	726.450.000	-	-	726.450.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.03	01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-	21.000.000	-	-	21.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	03	2.03	06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	-	705.450.000	-	-	705.450.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	5					BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
1	05	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP (BPBD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP (BPBD)	3	2.331.972.661	2.247.865.120			BPBD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	160.000.000	-			
1	05	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		1.841.372.661	1.971.543.180		BPBD	
1	05	1	2	02	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1.841.372.661	1.971.543.180	130.170.519	BPBD	
1	05	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		160.000.000	-		BPBD	
1	05	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		28.000.000	- -	28.000.000	BPBD	
1	05	1	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		7.000.000	- -	7.000.000	BPBD	
1	05	1	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		125.000.000	- -	125.000.000	BPBD	
1	05	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah			220.700.000	136.929.000		BPBD	
1	05	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3.000.000	1.830.000 -	1.170.000	BPBD	
1	05	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	17.000.000	- -	17.000.000	BPBD	
1	05	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2.500.000	581.000 -	1.919.000	BPBD	
1	05	1	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	51.000.000	42.465.000 -	8.535.000	BPBD	
1	05	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	11.000.000	7.195.000 -	3.805.000	BPBD	
1	05	1	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		700.000	- -	700.000	BPBD	
1	05	1	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.000.000	2.509.000 -	491.000	BPBD	
1	05	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	132.500.000	82.349.000 -	50.151.000	BPBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	05	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			60.000.000	-		BPBD	
###	###	1	2	07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25.000.000	-	-	25.000.000	BPBD
1	05	1	2	07	05	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		35.000.000	-	-	35.000.000	BPBD
1	05	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			88.400.000	97.882.940		BPBD	
1	05	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.000.000	533.000	-	467.000	BPBD
1	05	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	37.000.000	50.484.440		13.484.440	BPBD
1	05	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	50.400.000	46.865.500	-	3.534.500	BPBD
1	05	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			121.500.000	41.510.000		BPBD	
1	05	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	107.000.000	39.155.000	-	67.845.000	BPBD
1	05	1	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		3.000.000	-	-	3.000.000	BPBD
1	05	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5.500.000	2.355.000	-	3.145.000	BPBD
1	05	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3.000.000	-	-	3.000.000	BPBD
1	05	1	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3.000.000	-	-	3.000.000	BPBD
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100				-	BPBD
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	45.000.000	33.699.000		BPBD	
							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	424.145.421	325.395.000		BPBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	150.000.000	81.799.650		BPBD	
1	05	3	2	01		Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota		Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota			45.000.000	33.699.000		BPBD	
1	05	3	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	165	45.000.000	33.699.000	- 11.301.000	BPBD	
1	05	3	2	02		Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana			367.000.000	304.026.500		BPBD	
1	05	3	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	27.400.000	27.298.000	- 102.000	BPBD	
1	05	3	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	23.000.000	1.960.000	- 21.040.000	BPBD	
1	05	3	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		24.500.000	- -	24.500.000	BPBD	
1	05	3	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	104.100.000	98.164.500	- 5.935.500	BPBD	
1	05	3	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20	123.000.000	176.604.000	53.604.000	BPBD	
1	05	3	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		45.000.000	- -	45.000.000	BPBD	
1	05	3	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		20.000.000	- -	20.000.000	BPBD	
1	05	3	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana			150.000.000	81.799.650		BPBD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	05	3	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	25.000.000	11.451.500	-	13.548.500	BPBD
1	05	3	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	355	50.000.000	17.696.600	-	32.303.400	BPBD
1	05	3	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150	50.000.000	17.455.000	-	32.545.000	BPBD
1	05	3	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	25.000.000	35.196.550		10.196.550	BPBD
1	05	3	2	04		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana			57.145.421	21.368.500			BPBD
1	05	3	2	04	03	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulanangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	5.000.000	1.997.500	-	3.002.500	BPBD
1	05	3	2	04	04	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	5.000.000	2.165.000	-	2.835.000	BPBD
1	05	3	2	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	3.000.000	1.350.000	-	1.650.000	BPBD
1	05	3	2	02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	44.145.421	15.856.000	-	28.289.421	BPBD
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	100%	5.107.394.263	4.861.058.114		(246.336.149)	Satpol PP dan Damkar
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL					
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		4.380.540.758	4.158.309.151		(222.231.607)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 ok	4.380.540.758	4.158.309.151		(222.231.607)	Satpol PP dan Damkar

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	05	01	2,08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		111.008.318	84.565.963	(26.442.355)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,08	01		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	15.000.000	-	(15.000.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	67.082.818	74.965.963	7.883.145	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	19.325.500	-	(19.325.500)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.600.000	9.600.000	-	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06			Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		198.574.000	278.605.500	80.031.500	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.909.500	1.595.000	(4.314.500)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.920.000	-	(19.920.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4.177.000	4.534.000	357.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	24.500.000	32.995.000	8.495.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7.000.000	3.425.000	(3.575.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12.000.000	-	(12.000.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 laporan	125.067.500	236.056.500	110.989.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		39.740.000	27.000.000	(12.740.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,07	05		Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 jenis	21.000.000	-	(21.000.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,07	06		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 jenis	18.740.000	27.000.000	8.260.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		186.595.687	282.577.500	95.981.813	Satpol PP dan Damkar

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	05	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	163.839.687	269.802.500	105.962.813	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	10.656.000		(10.656.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	9.600.000	12.775.000	3.175.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.500.000		(2.500.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	190.935.500	30.000.000	(160.935.500)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	86.756.500	30.000.000	(56.756.500)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Jenis	81.679.000	-	(81.679.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Ok	22.500.000	-	(22.500.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	100%	1.097.437.758	1.628.912.000	531.474.242	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,01			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	999.966.058	1.555.760.000	555.793.942	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,01	01		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Dokumen	835.365.000	830.350.000	(5.015.000)	Satpol PP dan Damkar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1					2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	05	02	2,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 kasus	35.053.158	-	(35.053.158)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1084 Dokumen	65.435.900	725.410.000	659.974.100	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,01	06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	48 Dokumen	39.112.000	-	(39.112.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,01	07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	25.000.000	-	(25.000.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,02		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3	100%	97.471.700	73.152.000	(24.319.700)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 Laporan	49.819.100		(49.819.100)	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Laporan	24.217.600	73.152.000	48.934.400	Satpol PP dan Damkar
1	05	02	2,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	13 laporan	23.435.000	-	(23.435.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04			Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran		1.727.999.111	1.778.900.000	50.900.889	Satpol PP dan Damkar
					Waktu tanggap (renspnse time)		Waktu tanggap (renspnse time)			55.681.635	303.200.000	247.518.365	Satpol PP dan Damkar

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	05	04	2,01			Kegiatan Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,penyelamatan,dan Penanggulangan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kegiatan Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,penyelamatan,dan Penanggulangan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran		1.700.763.272	1.475.700.000	(225.063.272)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,01	02		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Ok	1.573.563.272	1.475.700.000	(97.863.272)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,01	06		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 unit	82.150.000	303.200.000	221.050.000	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,01	07		Pembinaan aparaturn pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan aparaturn pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	70 Orang	42.500.000		(42.500.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,01	09		Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan,antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan,penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan,antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan,penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	2.550.000	-	(2.550.000)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran		27.235.839	-	(27.235.839)	Satpol PP dan Damkar
1	05	04	2,04	01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	210 orang	27.235.839	-	(27.235.839)	Satpol PP dan Damkar
1	6					SOSIAL								
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial	3,00	2.585.634.383	2.648.144.383	62.510.000	Dinas Sosial
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL				Dinas Sosial
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	100%	2.213.225.713	2.213.225.713	-	Dinas Sosial

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	2.213.225.713	2.213.225.713	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	18.626.000	18.626.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	18.626.000	18.626.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	180.028.100	230.028.100	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.072.000	8.072.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.647.300	2.647.300	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.016.800	23.016.800	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.850.000	9.850.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.960.000	3.960.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132.482.000	182.482.000	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.850.000	16.360.000	12.510.000	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	10 Unit	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	3.850.000	8.850.000	5.000.000	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	1 Unit	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	7.510.000	7.510.000	Dinas Sosial	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	06	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	115.431.420	115.431.420	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.093.500	19.093.500	0	Dinas Sosial	
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.337.920	30.337.920	0	Dinas Sosial	
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	66.000.000	66.000.000	0	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	54.473.150	54.473.150	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil/Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil/Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	36.092.150	36.092.150	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8.145.000	8.145.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	3 Unit	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.950.000	4.950.000	-	Dinas Sosial	
1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.286.000	5.286.000	-	Dinas Sosial	
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	1,00	86.587.000	86.587.000	-	Dinas Sosial	
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100%	86.587.000	86.587.000	-	Dinas Sosial	
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	4 Org	7.895.000	7.895.000	-	Dinas Sosial	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi	7 Orang	13.570.000	13.570.000	-	Dinas Sosial
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan, lembaga Kesejahteraan sosial Lainnya) yang mendapatkan peningkatan potensi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan, lembaga Kesejahteraan sosial Lainnya) yang mendapatkan peningkatan potensi	2 Lembaga	65.122.000	65.122.000	-	Dinas Sosial
1	06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kelompok LK3 yang dibina	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kelompok LK3 yang dibina	1 Lembaga	-	-	-	Dinas Sosial
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	0	-	-	Dinas Sosial
1	06	03	2	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Kasus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Kasus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	5 Kasus	-	-	-	Dinas Sosial
1	06	03	2	01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal	10 Orang	-	-	-	Dinas Sosial
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100%	157.983.500	284.775.100	126.791.600	Dinas Sosial
							Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100%	16.167.375	31.167.375	15.000.000	Dinas Sosial
							Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100%	16.167.375	31.167.375	15.000.000	Dinas Sosial

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
							Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100%	33.670.625	53.670.625	20.000.000	Dinas Sosial
							Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)		Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%	91.978.125	168.769.725	76.791.600	Dinas Sosial
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	15 Orang	91.978.125	168.769.725	76.791.600	Dinas Sosial
							Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	5 Orang	16.167.375	31.167.375	15.000.000	Dinas Sosial
							Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	5 Orang	16.167.375	31.167.375	15.000.000	Dinas Sosial
							Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	15 Orang	33.670.625	53.670.625	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	71.674.000	71.674.000	-	Dinas Sosial
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	25.585.000	25.585.000	-	Dinas Sosial
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	4.626.000	19.626.000	15.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2	01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	7.756.500	9.548.100	1.791.600	Dinas Sosial

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	48.342.000	158.342.000	110.000.000	Dinas Sosial	
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	13 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan Bombingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan Bombingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial	100 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan	7 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan pemberian layanan rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan pemberian layanan rujukan	3 Orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100%	428.068.000	498.068.000	70.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan	72000 Orang	428.068.000	498.068.000	70.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	72000 Orang	37.879.000	37.879.000	-	Dinas Sosial	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pendataan kemiskinan yang terkelola dengan baik	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pendataan kemiskinan yang terkelola dengan baik	1 aplikasi	-		-	Dinas Sosial	
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Keluarga	390.189.000	460.189.000	70.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	180.468.500	230468500	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	1500 Orang	116.517.500	166.517.500	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	38.840.000	63.840.000	25.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	-	-	-	Dinas Sosial	
1	06	06	2	1	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	67.912.000	92.912.000	25.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Jiwa	9.765.500	9.765.500	-	Dinas Sosial	
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	100%	63.951.000	63.951.000	-	Dinas Sosial	
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	63.951.000	63.951.000	-	Dinas Sosial	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	45.266.600	45.266.600	-	Dinas Sosial	
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	7 TMPN	45.266.600	45.266.600	-	Dinas Sosial	
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 TMPN	45.266.600	45.266.600	-	Dinas Sosial	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7					BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	3 Poin	1.909.938.809	1.714.538.309	-	195.400.500	DINAS TENAGA KERJA
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0	75.684.500	-	-	75.684.500	
2	7	01	2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1.417.931.709	1.417.931.709	-	DINAS TENAGA KERJA	
2	7	01	2 02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang / Bulan	1.417.931.709	1.417.931.709	-	DINAS TENAGA KERJA	
2	7	01	2 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	100%	75.684.500	-	-	75.684.500	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-	DINAS TENAGA KERJA	
2	7	01	2 05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	43.672.000	-	-	43.672.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	32.012.500	-	-	32.012.500	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	100%	266.762.500	232.476.500	-	27.911.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	980.000	-	-	980.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2 06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	30.000.000	-	-	30.000.000	
2	7	01	2 06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	7.860.000	-	-	7.860.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.732.500	7.680.000	-	52.500	DINAS TENAGA KERJA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	7	01	2 06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.350.000	1.754.000	-	1.596.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	5.249.000	-	-	5.192.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354 Laporan	211.591.000	223.042.500		17.769.500	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2 06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	-	-	-	
2	7	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	100%	131.205.000	3.783.000	-	127.422.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	20.000.000	-	-	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.660.000	3.783.000	-	31.877.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	25.545.000	-	-	25.545.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	100%	69.039.600	45.612.100	-	23.434.500	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	14.883.300	11.532.100	-	3.358.200	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	36.156.300	17.280.000	-	18.876.300	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2 08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	16.800.000	-	1.200.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah siap Pakai	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah siap Pakai	100%	25.000.000	14.735.000	-	10.265.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	13.455.000	12.735.000	-	720.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	1.000.000	-	-	1.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.950.000	-	-	5.950.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	07	01	2,09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-		
2	07	01	2,09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	2.000.000	-	23.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	57,03	154.393.500	123.080.000	-	37.631.500	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	138.842.500	123.080.000	-	22.080.500	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	138.842.500	123.080.000	-	22.080.500	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 01	02		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah BLK Komunitas yang terbangun	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Lembaga	-	-	-	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	03	2 02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	0	5.500.000	-	-	5.500.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 02	01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	5.500.000	-	-	5.500.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 04			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitasi Konsultasi Produktivitas	0	10.051.000	-	-	10.051.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2 04	01		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	10.051.000	-	-	10.051.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1,63%	101.496.000	16.614.000	-	84.882.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 01			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar	0	60.059.000	-	-	60.059.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 01	01		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang terlatih	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	39.268.000	-	-	39.268.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 01	02		Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	15.121.000	-	-	15.121.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	07	04	2 01	04		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 Orang	5.670.000	-	-	5.670.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan	100	41.437.000	16.614.000	-	24.823.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 04	01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase penyelesaian Fasilitas PMI yang dipulangkan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	11.437.000	16.614.000		5.177.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2 04	03		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI / TKI Purna dan Keluarganya yang diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	30.000.000	-	-	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	31.781.740	40.358.700		8.576.960	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan	100	16.041.500	11.224.500	-	4.817.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 01	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 Perusahaan	4.792.000	2.000.500	-	2.791.500	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 01	02		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan PKB	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 Perusahaan	4.804.000	-	-	4.804.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pngupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pngupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	6.445.500	9.224.000		2.778.500	
2	07	05	2 02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan	100%	15.740.240	29.134.200		13.393.960	DINAS TENAGA KERJA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	07	05	2 02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	9.271.000	3.986.000	-	5.285.000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 02	01		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara yang terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara yang terselesaikan	1 Perkara	3.824.240	3.060.200	-	764.040	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2 02	01		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	17 Perusahaan	2.645.000	22.088.000		19.443.000	DINAS TENAGA KERJA
2	8					BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	8	2				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18,85%	159.000.000	80.120.000		78.880.000	DPMDPPKBPPPA
2	8	2	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	36 PD	77.000.000	20.415.500		56.584.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	2	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Dok	77.000.000	20.415.500		56.584.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	0,35	82.000.000	59.704.500		22.295.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	2	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Organisasi	82.000.000	59.704.500		22.295.500	DPMDPPKBPPPA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	85%	57.000.000	21.924.500	35.075.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan	100%	57.000.000	21.924.500	35.075.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	5	2	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dok	57.000.000	21.924.500	35.075.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	100	113.000.000	124.501.500	(11.501.500)	DPMDPPKBPPPA
2	8	6	2	1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak	Madya	113.000.000	124.501.500	(11.501.500)	DPMDPPKBPPPA
2	8	6	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dok	113.000.000	124.501.500	(11.501.500)	DPMDPPKBPPPA
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,73%	202.000.000	15.421.500	186.578.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	100%	202.000.000	15.421.500	186.578.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	3	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan	202.000.000	15.421.500	186.578.500	DPMDPPKBPPPA
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,15%	47.000.000	19.124.000	27.876.000	DPMDPPKBPPPA
2	8	7	2	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	100%	47.000.000	19.124.000	27.876.000	DPMDPPKBPPPA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	8	7	2	2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	47.000.000	19.124.000	27.876.000	DPMDPPKBPPPA	
2	9					BIDANG PANGAN									
2	09	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	0%	200.000.000	-	200.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	200.000.000	-	200.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	02	2.01	01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit	20.000.000	-	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	02	2.01	02		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0 Unit	100.000.000	-	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	02	2.01	03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	80.000.000	-	80.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	95%	407.768.155	237.639.900	170.128.255	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	100.000.000	44.807.500	55.192.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	25.000.000	-	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.01	04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan	2 Dokumen	25.000.000	27.418.000	- 2.418.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.01	05		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	7 Unit	25.000.000	17.389.500	7.610.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.01	06		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	25.000.000	-	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	09	03	2.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Unit	100.000.000	71.282.000	28.718.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	30.000.000	-	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.8 Ton	50.000.000	71.282.000	-	21.282.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	04		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0 Ton	20.000.000	-	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.03			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	0 Laporan	30.000.000	-	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.03	01		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 Laporan	30.000.000	-	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	75	177.768.155	121.550.400	56.217.755	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.04	01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	8 Dokumen	30.000.000	-	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	117.768.155	111.317.400	6.450.755	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	03	2.04	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	7 Laporan	30.000.000	10.233.000	19.767.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	05				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	68%	140.000.000	34.675.000	105.325.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	0,68	140.000.000	34.675.000	105.325.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	05	2.01	01		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 Dok	20.000.000	-	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	09	05	2.01	04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	70.000.000	8.503.000	61.497.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000	26.172.000	23.828.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	1%	273.000.000	35.037.000	237.963.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4	2.01			Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	93.000.000	16.787.000	76.213.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.01	01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dok	93.000.000	16.787.000	76.213.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02			Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	4 Desa	180.000.000	18.250.000	161.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	30.000.000	18.250.000	11.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	150.000.000	-	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	10					BIDANG PERTANAHAN								
2	10	02				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	3.750.000	3.750.000	-	Dinas PUTR dan Perkim
2	10	02	2.01			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan	2 rek	3.750.000	3.750.000	-	Dinas PUTR dan Perkim
2	10	02	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan pemberian izin dan lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan pemberian izin dan lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	2 Lap	3.750.000	3.731.000	-	Dinas PUTR dan Perkim
2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	12.750.300	12.750.300	-	Dinas PUTR dan Perkim

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
									Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1					2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 Kasus	12.750.300	12.750.300	-	Dinas PUTR dan Perkim	
2		10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	12.750.300	12.750.300	-	Dinas PUTR dan Perkim	
							Pengukuran Batas Lahan HKM & LPHD (Hutan Kemasyarakatan) Untuk Masyarakat Dusun PaccekkeKecamatan Soppeng Riaja	Pengukuran Batas Lahan HKM & LPHD (Hutan Kemasyarakatan) Untuk Masyarakat Dusun PaccekkeKecamatan Soppeng Riaja		12.750.300	12.750.300	-	Dinas PUTR dan Perkim	
2		10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	100 %	2.750.300	2.750.300		Dinas PUTR dan Perkim
2		10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	1 Dokumen	2.750.300	2.750.300		Dinas PUTR dan Perkim
2		10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	2.750.300	2.746.000	-	Dinas PUTR dan Perkim
2	11					BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai maturitas SPIP DLH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai maturitas SPIP DLH	3,00	2.458.912.102	3.009.488.776		Dinas Lingkungan Hidup	
						Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0	90.000.000	-	575.576.674		
2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.083.701.667	2.745.214.876	661.513.209	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	2.083.701.667	2.745.214.876	661.513.209	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/ fungsional	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/ fungsional	0	90.000.000	-	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	90.000.000	-	-90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	197.651.593	211.616.500	-	67.785.093	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	01	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	58.800.000	-	-	58.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Unit	5.396.068	1.489.500	-	3.906.568	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	3.780.000	3.354.000	-	426.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Laporan	129.675.525	206.773.000	-	81.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	106.775.092	83.679.900	-	22.345.192	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	31.575.092	14.042.900	-	17.532.192	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lap	20.000.000	19.987.000	-	13.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	55.200.000	49.650.000	-	750.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah	100	70.783.750	68.977.500	-	4.193.750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	35.937.500	-	-	35.937.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	20.000.000	54.090.000	-	4.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.008.750	6.900.000	-	108.750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.837.500	7.987.500	-	2.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	350.000.000	67.454.000	-	282.546.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian dok RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian dok RPPLH	100%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	- Dok	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01	02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	- Dok		-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	1 Dok	350.000.000	67.454.000	-	282.546.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	01		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	200.000.000	-	-	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dok	150.000.000	67.454.000	-	82.546.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	28%	96.670.400	49.226.560	-	47.443.840	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya	3 Keg	88.817.900	49.226.560	-	39.591.340	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dok	43.630.400	38.412.560	-	5.217.840	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dok	15.187.500	10.814.000	-	4.373.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0	30.000.000	-	-	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun	1 Dok	7.852.500	-	-	7.852.500	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	7.852.500	-	-	7.852.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	177.651.150	175.477.900	-	2.173.250	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	1 Lokasi	177.651.150	189.700.400		(2.173.250)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2,01	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,52 Ha	177.651.150	175.477.900	-	2.173.250	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2,01	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (LANJUTAN)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (LANJUTAN)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Paket	-	14.222.500		14.222.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	85,43 %	101.416.200	35.627.500	-	65.788.700	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2,01			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	2 Usaha	33.926.200	10.911.000		(23.015.200)	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Lap	33.926.200	10.911.000	-	23.015.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3	1 Pengumpul	67.490.000	24.716.500	-	42.773.500	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	05	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dok	67.490.000	24.716.500	-	42.773.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	23.520.000	18.277.500	-	5.242.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Usaha	23.520.000	18.277.500	-	5.242.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dok	8.870.000	7.156.500	-	1.713.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Lap	14.650.000	11.121.000	-	3.529.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100%	10.977.000	-	-	10.977.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2,01			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terdata	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terdata	1 DOK	10.977.000	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	07	2,01	01		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	DOK	10.977.000	-	10.977.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	82%	69.894.255	43.711.500	-	26.182.755	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	2 lembaga	69.894.255	43.711.500	(26.182.755)		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	2,01	02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dok	69.894.255	43.711.500	-	26.182.755	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	100%	11.524.800	8.581.500	-	2.943.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	3 Pengaduan	11.524.800	8.581.500	-	2.943.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	3 Dok	11.524.800	8.581.500	-	2.943.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11				Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	81,63%	3.873.600.000	3.929.920.500		56.320.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2,01			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	24550,6 Ton	3.873.600.000	3.929.920.500		56.320.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	01		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dok	46.420.000	38.775.500	-	7.644.500	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	11	11	2.01	3		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	24550,6 Ton	2.914.650.000	3.043.855.000	129.205.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	85.030.000	47.376.000	-	37.654.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	06		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	49.500.000	-	-	49.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	43 Unit	778.000.000	799.914.000	21.914.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12					BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 3	4.602.493.086	3.604.182.706	(998.310.380)	Dinas Kependudukan dan Capil	
							Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	130.000.000	31.063.300	(98.936.700)		
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil	
2	12	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil	
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil	
2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibayarkan gaji dan tunjangannya terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibayarkan gaji dan tunjangannya terhadap keseluruhan ASN	100%	2.993.706.086	2.671.834.506	(321.871.580)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	2.993.706.086	2.671.834.506	(321.871.580)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	85%	130.000.000	31.063.300	(98.936.700)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	30.301.500	-	(30.301.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	28.838.000	11.000.000	(17.838.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	05	11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	70.860.500	20.063.300	(50.797.200)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	383.785.000	399.832.700	16.047.700	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.000.000	-	(1.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	330.720.000	300.281.700	(30.438.300)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1.000.000	-	(1.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.815.000	1.776.000	(39.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78 Laporan	49.250.000	97.775.000	48.525.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	900.000.000	222.000.000	(678.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	900.000.000	-	(900.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	222.000.000	222.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	260.452.000	259.835.500	(616.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.652.000	15.035.500	(616.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	244.800.000	244.800.000	-	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	64.550.000	50.680.000	(13.870.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	53.550.000	39.775.000	(13.775.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.000.000	6.625.000	(1.375.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000	4.280.000	2.280.000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1.000.000	-	(1.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	01		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	293.446.000	187.038.500	(106.407.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	167.283.000	121.616.500	(45.666.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	46.596.500	19.945.000	(26.651.500)	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	120.686.500	101.671.500	(19.015.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan	1 Jenis	94.950.000	50.702.000	(44.248.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	14.000.000	-	(14.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	64.200.000	50.702.000	(13.498.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	16.750.000	-	(16.750.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 Jenis	31.213.000	14.720.000	(16.493.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	02	2	04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	4 Laporan	31.213.000	14.720.000	(16.493.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	98%	172.773.000	63.170.800	(109.602.200)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Jenis	120.273.000	60.511.000	(59.762.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 Dokumen	17.075.000	-	(17.075.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	103.198.000	60.511.000	(42.687.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang Diselenggarakan	0 Jenis	47.500.000	-	(47.500.000)	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	12	03	2	02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0 Laporan	20.500.000	-	(20.500.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	27.000.000	-	(27.000.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Jenis	5.000.000	2.659.800	(2.340.200)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	03	2	03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	1 Laporan	5.000.000	2.659.800	(2.340.200)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENINGKATAN OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENINGKATAN OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN	22%	178.629.000	46.104.000	(132.525.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	99.431.000	20.261.500	(79.169.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	49.000.000	6.878.000	(42.122.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	50.431.000	13.383.500	(37.047.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola	100%	79.198.000	25.842.500	(53.355.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	25.500.000	-	(25.500.000)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7 Laporan	53.698.000	25.842.500	(27.855.500)	Dinas Kependudukan dan Capil
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%	30.550.500	16.992.700	(13.557.800)	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang Disusun	100%	30.550.500	16.992.700	(13.557.800)	Dinas Kependudukan dan Capil	
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	30.550.500	16.992.700	(13.557.800)	Dinas Kependudukan dan Capil	
2	13					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3.593.255.653,00	2.881.968.531	711.287.122	DPMDPPKBPPPA	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL					
						Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	3.248.255.653,00	2.639.971.091	608.284.562	DPMDPPKBPPPA	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 org/ bulan	3.248.255.653	2.639.971.091	608.284.562	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	22,22%	32.500.000,00	9.398.000	23.102.000	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	32.500.000	9.398.000	23.102.000	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	129.000.000,00	78.583.200	50.416.800	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.500.000	1.010.000	1.490.000	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.500.000	307.000	1.193.000	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	125.000.000	77.266.200	47.733.800	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25.000.000	17.100.000	7.900.000	DPMDPPKBPPPA	
2	13	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	25.000.000	11.800.000	13.200.000	DPMDPPKBPPPA	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	13	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	5.300.000	(5.300.000)	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	97.500.000	82.311.240	15.188.760	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	69.000.000	53.682.600	15.317.400	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.500.000	18.968.640	(468.640)	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	9.660.000	340.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	61.000.000	54.605.000	6.395.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	45.000.000	32.000.000	13.000.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	7.000.000	1.500.000	5.500.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	9.000.000	21.105.000	(12.105.000)	DPMDPPKBPPPA
2	13	3				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	37,50%	20.000.000	8.631.500	11.368.500	DPMDPPKBPPPA
2	13	3	2	1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan	37,50%	20.000.000	8.631.500	11.368.500	DPMDPPKBPPPA
2	13	3	2	1	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 dok	20.000.000	8.631.500	11.368.500	DPMDPPKBPPPA
2	13	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib administrasi sesuai peraturan Per UU an	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib administrasi sesuai peraturan Per UU an	100%	1.778.000.000	994.572.544	783.427.456	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an	100%	1.778.000.000	994.572.544	783.427.456	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dok	900.000.000	837.006.544	62.993.456	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	40 Dok	55.000.000	13.086.000	41.914.000	DPMDPPKBPPPA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	13	4	2	1	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Laporan	45.000.000	18.543.000	26.457.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dok	43.000.000	12.240.000	30.760.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Laporan	550.000.000	27.480.000	522.520.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	55 dok	80.000.000	23.433.000	56.567.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	4	2	1	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	55 dok	105.000.000	62.784.000	42.216.000	DPMDPPKBPPPA
2	13	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	100%	481.000.000	440.351.600	40.648.400	DPMDPPKBPPPA
2	13	5	2	1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina	6 lembaga	481.000.000	440.351.600	40.648.400	DPMDPPKBPPPA
2	13	5	2	1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 lembaga	36.000.000	18.179.500	17.820.500	DPMDPPKBPPPA
2	13	5	2	1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dok	120.000.000	17.090.500	102.909.500	DPMDPPKBPPPA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	13	5	2	1	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	55 dok	325.000.000	405.081.600	(80.081.600)	DPMDPPKBPPPA
2	14					BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,65	3.275.120.000	3.721.520.500	(446.400.500)	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan	80%	56.000.000	25.658.000	30.342.000	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	1	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dok	56.000.000	25.658.000	30.342.000	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB	100%	657.120.000	625.420.000	31.700.000	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	2	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 laporan	657.120.000	625.420.000	31.700.000	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	100%	2.500.000.000	3.031.027.000	(531.027.000)	DPMDPPKBPPPA
2	14	3	2	3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	2.500.000.000	3.031.027.000	(531.027.000)	DPMDPPKBPPPA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	14	3	2	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	62.000.000	39.415.500	22.584.500	DPMDPPKBPPPA	
2	14	3	2	4	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Organisasi	62.000.000	39.415.500	22.584.500	DPMDPPKBPPPA	
2	15					BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3	4.252.079.887	4.409.019.733	156.939.846	DINAS PERHUBUNGAN	
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	100.000.000	100.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	3.354.754.887	3.643.394.212	288.639.325	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang /Bulan	3.344.254.887	3.632.894.212	288.639.325	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02			Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen	2.000.000	2.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	500.000	500.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	8.000.000	8.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100.000.000	100.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	15	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	25.000.000	25.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	75.000.000	75.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	478.325.000	444.804.500	-	33.520.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	825.000	-	-	825.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	30.000.000	30.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	5.000.000	2.854.000	-	2.146.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	80.000.000	81.773.500		1.773.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	3.500.000	1.750.000	-	1.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	9.000.000	812.000	-	8.188.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621	350.000.000	327.615.000	-	22.385.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	147.500.000	7.765.000	-	139.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	100.000.000	-	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	7.500.000	-	-	7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	7.765.000	-	22.235.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	15	01	2.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	10.000.000	-	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	62.500.000	107.839.642	45.339.642	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	2.500.000	13.779.000	11.279.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	94.060.642	34.060.642	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	209.000.000	205.216.379	-	3.783.621	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	29.000.000	-	29.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	70.000.000	125.078.000	55.078.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	5.000.000	-	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	20.000.000	8.775.000	-	11.225.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	07		Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	60.000.000	66.325.000	6.325.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	5.038.379	-	9.961.621	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	10.000.000	-	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100	4.365.823.801	1.291.913.500	-	3.073.910.301	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
							persentase layanan angkutan darat		persentase layanan angkutan darat	100	1.650.000.000	1.847.282.000	197.282.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7 jenis	4.365.823.801	1.291.913.500	3.073.910.301	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	01		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	319 Unit	3.545.858.801	889.955.900	2.655.902.901	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16	20.000.000	4.800.000	15.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	769	799.965.000	397.157.600	402.807.400	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang terkelola sesuai standart peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang terkelola sesuai standart peraturan perundang-undangan	4 lokasi	352.500.000	-	-	352.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2	300.000.000	-	-	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	30.000.000	-	-	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	05		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	22.500.000	-	-	22.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan	753 unit	272.500.000	21.360.000	-	251.140.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0	45.000.000	-	-	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	22.500.000	-	-	22.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 Dokumen	175.000.000	12.500.000	-	162.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 unit	15.000.000	8.860.000	-	6.140.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	15	02	2.05	08		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	15.000.000	-	-	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas	85 ruas	880.000.000	587.993.500	-	292.006.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	750.000.000	561.700.000	-	188.300.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 unit	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	130.000.000	26.293.500	-	103.706.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundang-undangan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundang-undangan	0	40.000.000	-	-	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	02		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	25.000.000	-	-	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	04		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	15.000.000	-	-	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase pelaksanaan pengendalian dan keselamatan sesuai standart peraturan perundang-undangan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase pelaksanaan pengendalian dan keselamatan sesuai standart peraturan perundang-undangan	100%	80.000.000	10.885.000	-	69.115.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	02		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	35.000.000	10.885.000	-	24.115.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	45.000.000	-	-	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang sesuai standart peraturan perundang-undangan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang sesuai standart peraturan perundang-undangan	100%	25.000.000	1.227.043.500		1.202.043.500	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	15	02	2.09	02		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	25.000.000	1.227.043.500	1.202.043.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga	2%	-	24.000.000	24.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13			Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	persentase keterpenuhan pelabuhan penyeberangan yang fungsional dan sesuai standart peraturan perundang-undangan	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	persentase keterpenuhan pelabuhan penyeberangan yang fungsional dan sesuai standart peraturan perundang-undangan	100%	-	24.000.000	24.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13	03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	-	24.000.000	24.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13	05		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	0	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
2	16					BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo-SP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo-SP	3,00	3.641.468.684	3.675.438.459	33.969.775	Diskominfo-SP
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan latihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan latihan	-	-	-	-	
2	16	01	2 01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan keuangan	6 Dokumen 2 Laporan	1.643.000	2.070.000	427.000	Diskominfo-SP
2	16	01	2 01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	452.000	865.000	413.000	Diskominfo-SP
2	16	01	2 01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	397.000	425.000	28.000	Diskominfo-SP
2	16	01	2 01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	397.000	390.000	7.000	Diskominfo-SP
2	16	01	2 01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	397.000	390.000	7.000	Diskominfo-SP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	16	01	2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.000.848.684	3.110.823.409	109.974.725	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 02	01		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	3.000.639.684	3.110.443.409	109.803.725	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	155.000	155.000	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	209.000	225.000	16.000	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Diklat kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Diklat kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	0%	-	-	-	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	-	-	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	-	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06			Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	240.045.500	196.013.700	44.031.800	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.573.500	1.843.000	730.500	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.100.000	1.956.700	5.143.300	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	26.622.000	23.608.000	3.014.000	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.000.000	2.232.000	768.000	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan	200.750.000	166.374.000	34.376.000	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	232.548.000	214.485.550	18.062.450	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 07	05		Pengadaan meubeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan meubeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	-	-	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 07	10		Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	232.548.000	214.485.550	18.062.450	Diskominfo-SP	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	16	01	2 07	11		Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	Diskominfo-SP	
2	16	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	140.958.000	126.345.800	-	14.612.200	Diskominfo-SP
2	16	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	140.958.000	126.345.800	-	14.612.200	Diskominfo-SP
2	16	01	2 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.425.500	25.700.000		274.500	Diskominfo-SP
2	16	01	2 09	01		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	19.425.500	20.700.000		1.274.500	Diskominfo-SP
2	16	01	2 09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000	5.000.000	-	1.000.000	Diskominfo-SP
2	16	02	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat efektifitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	100%	2.087.173.500	1.335.192.000	-	751.981.500	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Banyaknya jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Banyaknya jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	265 Informasi	2.087.173.500	1.335.192.000	-	751.981.500	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01	06		Pelayanan informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	1.173.631.500	865.406.500	-	308.225.000	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01	07		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	500.042.000	162.661.000	-	337.381.000	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01	10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	268.500.000	42.065.000	-	226.435.000	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01	11		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	8 Dokumen	45.000.000	5.455.500	-	39.544.500	Diskominfo-SP
2	16	02	2 01	12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1023 Dokumen	100.000.000	259.604.000		159.604.000	Diskominfo-SP
2	16	03	2			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase sistem informasi yang terintegrasi dan berfungsi optimal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung daya akses internet yang berkualitas yang di sediakan Kominfo	100%	1.722.140.700	1.742.884.000		20.743.300	Diskominfo-SP
2	16	03	2 01			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 OPD	1.077.240.700	1.220.567.000		143.326.300	Diskominfo-SP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	16	03	2 02	03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1.077.240.700	1.220.567.000	143.326.300	Diskominfo-SP	
2	16	03	2 02			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Aplikasi yang menunjang SPBE di Kabupaten Barru	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Aplikasi yang menunjang SPBE di Kabupaten Barru	2 aplikasi	644.900.000	522.317.000	- 122.583.000	Diskominfo-SP	
2	16	03	2 02	02		Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	8 Dokumen	350.000.000	312.252.000	- 37.748.000	Diskominfo-SP	
2	16	03	2 02	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6 Dokumen	294.900.000	210.065.000	- 84.835.000	Diskominfo-SP	
2	17					BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	3 Level	3.273.698.014	3.102.758.820	- 170.939.194	DISKUMDAG	
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JPL	110.000.000	-		DISKUMDAG	
2	17	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	0	2.884.845.722	2.814.248.240	- 70.597.482	DISKUMDAG	
2	17	01	2,02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org	2.884.845.722	2.814.248.240	- 70.597.482	DISKUMDAG	
2	17	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	0	110.000.000	- -	110.000.000	DISKUMDAG	
2	17	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	65.000.000	- -	65.000.000	DISKUMDAG	
2	17	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	45.000.000	- -	45.000.000	DISKUMDAG	
2	17	01	2,06			Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	140.000.000	161.121.500	21.121.500	DISKUMDAG	
2	17	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	2.139.500	- 2.860.500	DISKUMDAG	
2	17	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 OK	135.000.000	158.982.000	23.982.000	DISKUMDAG	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	17	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0%	34.904.792	675.000	-	34.229.792	DISKUMDAG
2	17	01	2,07	05		Pengadaan meubeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan meubeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	14.952.396	-	-	14.952.396	DISKUMDAG
2	17	01	2,07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	14.952.396	-	-	14.952.396	DISKUMDAG
2	17	01	2,07	11		Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.000.000	675.000	-	4.325.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	157.572.000	119.899.080	-	37.672.920	DISKUMDAG
2	17	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	106.062.500	89.628.000	-	16.434.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	51.509.500	30.271.080	-	21.238.420	DISKUMDAG
2	17	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	56.375.500	6.815.000	-	49.560.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,09	01		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	28.975.500	3.305.000	-	25.670.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.900.000	3.510.000	-	1.390.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	20.000.000	-	-	20.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0	2.500.000	-	-	2.500.000	DISKUMDAG
2	17	02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	0%	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
2	17	02	2.01			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	0%	5.000.000	-	-	5.000.000	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	17	02	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	5.000.000	-	-	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	02	2.02			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang	0%	5.000.000	-	-	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	02	2.02	01		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	0	5.000.000	-	-	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	100%	60.000.000	29.436.000	-	30.564.000	DISKUMDAG
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	60.000.000	29.436.000	-	30.564.000	DISKUMDAG
2	17	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Unit Usaha	30.000.000	29.436.000	-	564.000	DISKUMDAG
2	17	03	2.01	02		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	0	30.000.000	-	-	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KOPERASI	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KOPERASI	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	93%	60.000.000	18.147.500	-	41.852.500	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	93%	60.000.000	18.147.500	-	41.852.500	DISKUMDAG
2	17	04	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	38 Unit Usaha	30.000.000	18.147.500	-	11.852.500	DISKUMDAG
2	17	04	2.01	02		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0	30.000.000	-	-	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM Perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM Perkoperasian	69%	70.000.000	1.863.544.500		1.793.544.500	DISKUMDAG
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	69%	70.000.000	1.863.544.500		1.793.544.500	DISKUMDAG
2	17	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	70.000.000	1.863.544.500		1.793.544.500	DISKUMDAG
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10,55%	2.800.000.000	56.363.250	-	2.743.636.750	DISKUMDAG
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	40%	2.800.000.000	56.363.250	-	2.743.636.750	DISKUMDAG
2	17	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2.700.000.000	-	-	2.700.000.000	DISKUMDAG
2	17	07	2.01	02		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	20.000.000	56.363.250		36.363.250	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	17	07	2.01	03		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0	20.000.000	-	-	20.000.000	DISKUMDAG
2	17	07	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	60.000.000	-	-	60.000.000	DISKUMDAG
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,90%	321.838.897	317.769.000	-	4.069.897	DISKUMDAG
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	90 Unit Usaha	321.838.897	317.769.000	-	4.069.897	DISKUMDAG
2	17	08	2.01	01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan tehnologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan tehnologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha	321.838.897	317.769.000	-	4.069.897	DISKUMDAG
2	18					BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP DPMPTSP	3 Level	3.157.455.951	3.370.133.049	212.677.098	DPMPTSP	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0 Jpl	130.000.000	-	-		130.000.000
2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.074.539.157	2.474.381.249	399.842.092	DPMPTSP	
2	18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	2.074.539.157	2.474.381.249	399.842.092	DPMPTSP	
2	18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	0%	130.000.000	-	-	130.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	63.867.529	-	-	63.867.529	DPMPTSP
2	18	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	66.132.471	-	-	66.132.471	DPMPTSP
2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	100%	471.988.158	445.586.500	-	26.401.658	DPMPTSP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	18	01	2 06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.289.792	2.096.000	-	1.193.792	DPMPTSP
2	18	01	2 06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	31.263.373		-	31.263.373	DPMPTSP
2	18	01	2 06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24.254.408	8.319.000	-	15.935.408	DPMPTSP
2	18	01	2 06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.500.000	58.344.000		35.844.000	DPMPTSP
2	18	01	2 06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.750.000	2.076.500	-	673.500	DPMPTSP
2	18	01	2 06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.101.085	19.070.000	-	16.031.085	DPMPTSP
2	18	01	2 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207Laporan	263.505.576	355.681.000		92.175.424	DPMPTSP
2	18	01	2 06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	89.323.924		-	89.323.924	DPMPTSP
2	18	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	95%	276.904.164	145.558.300		-131.345.864	DPMPTSP
2	18	01	2 07	02		Pengadaan Mebel	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	133.985.886	-	-	133.985.886	DPMPTSP
2	18	01	2 07	05		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	3 Unit	44.661.962	111.406.000		66.744.038	DPMPTSP
2	18	01	2 07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	66.992.943	16.375.000	-	50.617.943	DPMPTSP
2	18	01	2 07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	31.263.373	-	-	31.263.373	DPMPTSP
2	18	01	2 07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (LANJUTAN)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (LANJUTAN)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	-	17.777.300		17.777.300	DPMPTSP
2	18	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	100%	246.264.320	261.117.000		14.852.680	DPMPTSP
2	18	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.298.203	3.467.000	-	6.831.203	DPMPTSP
2	18	01	2 08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	23.227.926	2.050.000	-	21.177.926	DPMPTSP
2	18	01	2 08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	212.738.191	255.600.000		42.861.809	DPMPTSP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	18	01	2 09			Pemeliharaan barang milik Daerah Kabupaten	Persentase Barang milik Daerah Kabupaten	Pemeliharaan barang milik Daerah Kabupaten	Persentase Barang milik Daerah Kabupaten	100%	87.760.153	43.490.000	-	44.270.153	DPMPTSP
2	18	01	2 09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	11 Unit	33.184.532	34.425.000		1.240.468	DPMPTSP
2	18	01	2 09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	332.302	-	-	332.302	DPMPTSP
2	18	01	2 09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	16 Unit	6.261.820	9.065.000		2.803.180	DPMPTSP
2	18	01	2 09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	16.718.125	-	-	16.718.125	DPMPTSP
2	18	01	2 09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	31.263.373	-	-	31.263.373	DPMPTSP
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100%	58.557.353	47.800.000	-	10.757.353	DPMPTSP
2	18	02	2 01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/insentif	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/insentif	100%	17.973.049	16.506.500	-	1.466.549	DPMPTSP
2	18	02	2 01	01		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	17.393.273	16.506.500	-	886.773	DPMPTSP
2	18	02	2 01	02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0 Kegiatan usaha	579.776	-	-	579.776	DPMPTSP
2	18	02	2 02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencapai ketertarikan petani	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencapai ketertarikan petani	20%	40.584.304	31.293.500	-	9.290.804	DPMPTSP
2	18	02	2 02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40.584.304	31.293.500	-	9.290.804	DPMPTSP
2	18					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	20%	114.155.809	2.480.000	-	111.675.809	DPMPTSP
2	18	03	2 02			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal	100%	114.155.809	2.480.000	-	111.675.809	DPMPTSP
2	18	03	2 02	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.575.000	2.480.000		905.000	DPMPTSP
2	18	03	2 02	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	112.580.809	-	-	112.580.809	DPMPTSP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	98,0%	532.892.672	121.179.000	-	411.713.672	DPMPTSP
2	18	04	2 01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50%	532.892.672	121.179.000	-	411.713.672	DPMPTSP
2	18	04	2 01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.500 Pelaku Usaha	337.234.474	52.340.000	-	284.894.474	DPMPTSP
2	18	04	2 01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	550 Kegiatan Usaha	163.700.043	63.030.000	-	100.670.043	DPMPTSP
2	18	04	2 01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	33 Orang	25.213.465	3.359.000	-	21.854.465	DPMPTSP
2	18	04	2 01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	6.744.689	2.450.000	-	4.294.689	DPMPTSP
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	350 M	335.604.949	438.200.000		102.595.051	DPMPTSP
2	18	05	2 02			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	26,99%	335.604.949	438.200.000		102.595.051	DPMPTSP
2	18	05	2 02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	118.452.078	181.077.000		62.624.922	DPMPTSP
2	18	05	2 02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	202 Pelaku Usaha	128.064.773	141.651.000		13.586.227	DPMPTSP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	18	05	2 02	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	89.088.098	115.472.000	26.383.902	DPMPTSP
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0%	52.020.000	- -	52.020.000	DPMPTSP
2	18	06	2 01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	0%	52.020.000	- -	52.020.000	DPMPTSP
2	18	06	2 01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen	52.020.000	- -	52.020.000	DPMPTSP
2	19					BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	15%	49.330.000	140.065.000	90.735.000	DISPARPORA
							TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI		TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	0,91%	1.340.957.768	2.831.694.500	1.490.736.732	DISPARPORA
2	19	02	2			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	100%	1.340.957.768	2.831.694.500	1.490.736.732	DISPARPORA
2	19	02	2,01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0	21.797.500,00	-	(21.797.500)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	60.000.000,00	25.126.000	(34.874.000)	DISPARPORA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	19	02	2,01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang	62.406.201,00	61.556.000	(850.201)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	04		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	0	28.420.000,00	-	(28.420.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	05		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen	100.000.000,00	-	(100.000.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	06		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	223.334.067,00	-	(223.334.067)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	07		Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	0	20.000.000,00	-	(20.000.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	0	25.000.000,00	-	(25.000.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,01	07		Pemberian Penghargaan Pemuda dan \Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Pemberian Penghargaan Pemuda dan \Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	1928 Orang	-	2.745.012.500	2.745.012.500	DISPARPORA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	19	02	2,01	09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	0	800.000.000,00	-	(800.000.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	100%	49.330.000	140.065.000	90.735.000	DISPARPORA
2	19	02	2,02	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	0	31.500.000,00	-	(31.500.000)	DISPARPORA
2	19	02	2,02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	17.830.000,00	140.065.000,00	122.235.000	DISPARPORA
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE KENAIKAN RAIHAN PRESTASI PADA EVENT OLAHRAGA PROVINSI DAN NASIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE KENAIKAN RAIHAN PRESTASI PADA EVENT OLAHRAGA PROVINSI DAN NASIONAL	100%	473.070.591	1.028.153.934	555.083.343	DISPARPORA
2	19	03	2,01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	125.000.000	128.396.434	3.396.434	DISPARPORA
2	19	03	2,01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	15.000.000,00	-	(15.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,01	03		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	35 Unit	110.000.000,00	128.396.434,00	18.396.434	DISPARPORA
2	19	03	2,02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	100%	100.000.000	109.889.500	9.889.500	DISPARPORA
2	19	03	2,02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	60.000.000,00	-	(60.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,02	02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	109.889.500,00	69.889.500	DISPARPORA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	19	03	2,03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	100%	73.070.591	4.887.500	-	68.183.091	DISPARPORA
2	19	03	2,03	03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0	40.000.000,00	-		(40.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,03	04		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	20.000.000,00	-		(20.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,03	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	13.070.591,00	4.887.500,00		(8.183.091)	DISPARPORA
2	19	03	2,04			Pembiayaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Pembiayaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	100%	45.000.000	764.410.000		719.410.000	DISPARPORA
2	19	03	2,04	01		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	15.000.000,00	14.345.000,00		(655.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,04	02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	10.000.000,00	750.065.000,00		740.065.000	DISPARPORA
2	19	03	2,04	03		Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0	10.000.000,00	-		(10.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,04	04		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	0	10.000.000,00	-		(10.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi	100%	130.000.000	20.570.500	-	109.429.500	DISPARPORA
2	19	03	2,05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	10.000.000,00	-		(10.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,05	02		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	30.000.000,00	20.570.500,00		(9.429.500)	DISPARPORA
2	19	03	2,05	03		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	0	50.000.000,00	-		(50.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,05	04		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0	30.000.000,00	-		(30.000.000)	DISPARPORA
2	19	03	2,05	05		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0	10.000.000,00	-		(10.000.000)	DISPARPORA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	19	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Aktif	100%	126.438.597	300.065.000	173.626.403	DISPARPORA
2	19	04	2,01			Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	100%	126.438.597	300.065.000	173.626.403	DISPARPORA
2	19	04	2,01	03		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	126.438.597,00	300.065.000,00	173.626.403	DISPARPORA
2	20					BIDANG STATISTIK								
2	20	02	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase ketersediaan data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	100%	176.567.500	77.403.500	99.164.000	Diskominfo-SP
2	20	02	2 01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Barru	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Barru	100%	176.567.500	77.403.500	99.164.000	Diskominfo-SP
2	20	02	2 01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	176.567.500	77.403.500	99.164.000	Diskominfo-SP
2	21					BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	80.000.000	34.764.500	45.235.500	Diskominfo-SP
2	21	02	2 01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1 Dokumen	80.000.000	34.764.500	45.235.500	Diskominfo-SP
2	21	02	2 01	03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13 Laopran	80.000.000	34.764.500	45.235.500	Diskominfo-SP
2	22					BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase cagar dan karyabudaya yang ditetapkan sebagai WBTB	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase cagar dan karyabudaya yang ditetapkan sebagai WBTB		831.241.100	831.241.100	-	Disdikbud
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karyabudaya yang dapat dilindungi	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karyabudaya yang dapat dilindungi		35.390.000	35.390.000	-	Disdikbud
2	22	02	2	01	01	Perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		35.390.000	35.390.000	-	Disdikbud

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional		655.392.600	655.392.600	-	Disdikbud	
2	22	02	2	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		531.329.400	531.329.400	-	Disdikbud	
2	22	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		124.063.200	124.063.200	-	Disdikbud	
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat		140.458.500	140.458.500	-	Disdikbud	
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		140.458.500	140.458.500	-	Disdikbud	
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase kesenian tredisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WTB	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase kesenian tredisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WTB		223.322.000	223.322.000	-	Disdikbud	
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat		223.322.000	223.322.000	-	Disdikbud	
2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (di tingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (di tingkatkan Kompetensinya)		223.322.000	223.322.000	-	Disdikbud	
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan		103.886.725	121.288.972	17.402.247	Disdikbud	
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota			103.886.725	121.288.972	17.402.247	Disdikbud	
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs bersejarah yang dilestarikan	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs bersejarah yang dilestarikan	27 Objek	103.886.725	121.288.972	17.402.247	Disdikbud	
									LANJUTAN			17.432.247	17.432.247		
2	23					BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.440.369.042	3.970.291.475	529.922.433	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPIAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	23	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100%	2.276.280.902	3.063.405.475	787.124.573	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	2.276.280.902	3.063.405.475	787.124.573	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN	100%	85.000.000	-	(85.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	42.000.000	-	(42.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	0 Orang	43.000.000	-	(43.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	261.996.440	184.362.200	(77.634.240)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	386.500	-	(386.500)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368 Laporan	261.609.940	184.362.200	(77.247.740)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	67.000.000	6.000.000	(61.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	20.000.000	-	(20.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	25.000.000	-	(25.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN
2	23	01	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.000.000	6.000.000	(16.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPAPAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	23	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	703.721.000	701.428.800	(2.292.200)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,08	01		Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	29.121.000	26.838.000	(2.283.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	35.000.000	34.990.800	(9.200)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	639.600.000	639.600.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	46.370.700	15.095.000	(31.275.700)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,09	01		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	20.152.700	9.245.000	(10.907.700)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	2.510.000	-	(2.510.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	13.900.000	5.850.000	(8.050.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	01	2,09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	9.808.000	-	(9.808.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca		11.812.762.800	11.219.964.545	(592.798.255)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	02	2,01			Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang terkelola dengan Baik	Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang terkelola dengan Baik	100%	1.553.270.000	873.142.000	(680.128.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	
2	23	02	2,01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 { ITSM : Information Technology Service Management }	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 { ITSM : Information Technology Service Management }	1 Layanan	320.000.000	325.263.000	5.263.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSPIPAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	23	02	2,01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	508.000.000	510.114.000	2.114.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	03		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khusus Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khusus Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Eks	4.320.000	-	(4.320.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	04		Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	238 Perpustakkan	107.100.000	37.765.000	(69.335.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	05		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	4.350.000	-	(4.350.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	65.000.000	-	(65.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	07		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	20.000.000	-	(20.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	0 Eks	500.000.000	-	(500.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Terdiri atas : 1.		Terdiri atas : 1.		0 Eks	490.000.000	-	(490.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
										0 Eks	10.000.000	-	(10.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,01	09		Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	0 Eks	14.500.000	-	(14.500.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	23	02	2,01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	10.000.000	-	(10.000.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi	100%	10.259.492.800	10.346.822.545	87.329.745	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	01		Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	260 Lokus	194.664.800	-	(194.664.800)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	02		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	10.052.500.000	10.346.822.545	294.322.545	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	03		Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	6.164.000	-	(6.164.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2,02	05		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	0 Orang	6.164.000	-	(6.164.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1%	30.300.000	30.296.850	(3.150)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	100%	9.500.000	9.496.850	(3.150)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	3.100.000	3.098.950	(1.050)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15755 Berkas	6.400.000	6.397.900	(2.100)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	100%	11.000.000	11.000.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
2	24	02	2,02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	11.000.000	11.000.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	100%	9.800.000	9.800.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2,03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	9.800.000	9.800.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	57,5%	15.500.000	15.493.350	(6.650)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100%	2.400.000	2.399.000	(1.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01	01		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	600.000	600.000	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,01	02		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2100 Berkas	1.800.000	1.799.000	(1.000)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	100%	12.000.000	11.995.850	(4.150)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2,03	03		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	6.000.000	5.996.600	(3.400)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	24	03	2,03	04		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelura han	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	1 Arsip	6.000.000	5.999.250	(750)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	03	2,05			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	100%	1.100.000	1.098.500	(1.500)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	03	2,05	01		Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	1.100.000	1.098.500	(1.500)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24					BIDANG KEARSIPAN									
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1%	30.300.000	30.296.850	(3.150)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	100%	9.500.000	9.496.850	(3.150)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	3.100.000	3.098.950	(1.050)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15755 Berkas	6.400.000	6.397.900	(2.100)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	100%	11.000.000	11.000.000	-	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	11.000.000	11.000.000	-	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota yang dikelola dengan baik	100%	9.800.000	9.800.000	-	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	2,03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	9.800.000	9.800.000	-	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	57,5%	15.500.000	15.493.350	(6.650)	BIDANG KEARSIPAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
2	24	03	2,01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100%	2.400.000	2.399.000	(1.000)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,01	01		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	600.000	600.000	-	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,01	02		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2100 Berkas	1.800.000	1.799.000	(1.000)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	100%	12.000.000	11.995.850	(4.150)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,03	03		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	6.000.000	5.996.600	(3.400)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,03	04		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelura han	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	6.000.000	5.999.250	(750)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,05			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	100%	1.100.000	1.098.500	(1.500)	BIDANG KEARSIPAN	
2	24	03	2,05	01		Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	1.100.000	1.098.500	(1.500)	BIDANG KEARSIPAN	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25					BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	01	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3 Level	2.968.792.132	3.202.727.063	233.934.931	DINAS PERIKANAN	
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	40.800.000	-	(40.800.000)	DINAS PERIKANAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	01	2			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenbtase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenbtase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	-	1.000.000	-	-	1.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	-	500.000	-	-	500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	03		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	-	500.000	-	-	500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.510.641.336	2.657.872.983		147.231.647	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	25 Orang	2.510.641.336	2.657.872.983		147.231.647	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100%	500.000	-	-	500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	500.000	-	-	500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang telah mengikuti diklat Kompetensi teknis terjadap keseluruhan ASN Dinas Perikanan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang telah mengikuti diklat Kompetensi teknis terjadap keseluruhan ASN Dinas Perikanan	16%	40.800.000	-	-	40.800.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	0	40.800.000	-	-	40.800.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi UmumPerangkat Daerah	100%	287.461.590	354.376.000		66.914.410	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang diadakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang diadakan	12	4.080.000	4.065.500	-	14.500	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor berdasarkan jenisnya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor berdasarkan jenisnya	1	4.590.000	4.544.500	-	45.500	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	400	278.791.590	345.766.000		66.974.410	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.126.400	63.765.000		35.638.600	DINAS PERIKANAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	1 Jenis	28.126.400	63.765.000	35.638.600	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	100%	78.784.800	76.844.400	- 1.940.400	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	780	29.019.000	29.007.400	- 11.600	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	perisodesasi jasa komunikasi air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	perisodesasi jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	12.240.000	12.197.000	- 43.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	9.985.800	9.840.000	- 145.800	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya	12 bulan	27.540.000	25.800.000	- 1.740.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	62.278.006	49.868.680	- 12.409.326	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil/kendaraan operasion atau lapangan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil/kendaraan operasion atau lapangan yang dipelihara	17 Unit	54.688.006	44.375.000	- 10.313.006	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		2.040.000	- -	2.040.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	09		pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	5.550.000	5.493.680	- 56.320	DINAS PERIKANAN	
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	1.123.590.351	62.687.800	- 1.060.902.551	DINAS PERIKANAN	
3	25	02	2			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan	0	830.400.702	16.667.000	- 813.733.702	DINAS PERIKANAN	
3	25	02	2	01		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.300.000	16.667.000	1.367.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	02	2	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	204.000.000	- -	204.000.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	02	2	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0	611.100.702	- -	611.100.702	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	8 Kelpmpok	76.949.649	46.020.800	- 30.928.849	DINAS PERIKANAN	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	03	2	01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	71.849.649	38.373.600	-	33.476.049	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2	02		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	6 kelompok	5.100.000	7.647.200		2.547.200	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2	03		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang terkelola	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang terkelola	0	216.240.000	-	-	216.240.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2	2		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	216.240.000	-	-	216.240.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi disungai,Danau,Waduk, Rawa, dan Genagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi disungai,Danau,Waduk, Rawa, dan Genagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar	0	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2	02		Pelayanan penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dukumen TPUPi dan TPKPIH	Pelayanan penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dukumen TPUPi dan TPKPIH	0	-	-	-	-	DINAS PERIKANAN
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	4%	1.669.383.417	663.290.400	-	1.006.093.017	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	10 Dok	15.300.000	12.281.000	-	3.019.000	DINAS PERIKANAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	04	2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0	-	-	-	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	15.300.000	12.281.000	-	3.019.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	12 kelompok	81.400.000	10.188.400	-	71.211.600	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 kelompok	5.000.000	5.023.400	23.400	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	6 kelompok	5.000.000	5.165.000	165.000	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	71.400.000	-	71.400.000	DINAS PERIKANAN		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	04	2			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	1.352,37 Ton	15.300.000	12.281.000	-	3.019.000	DINAS PERIKANAN
3		25	04	2	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 rekomendasi	15.300.000	12.281.000	-	3.019.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	7 kelompok	1.557.383.417	628.540.000	-	928.843.417	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	asi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.400.000	14.835.000	-	5.565.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	204.000.000	-	-	204.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89 Unit	1.016.783.417	219.510.000	-	797.273.417	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	5.100.000	5.295.000		195.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	05		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Orang	5.100.000	3.525.000	-	1.575.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	06		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	10 Ha	102.000.000	93.620.000	-	8.380.000	DINAS PERIKANAN
						Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	204.000.000	291.755.000		87.755.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	1406,99	313.440.000	468.590.000		155.150.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2	1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan	1 Dokumen (5 Unit)	7.140.000	9.696.000		2.556.000	DINAS PERIKANAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	25	06	2	01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	7.140.000	9.696.000	2.556.000	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	4,83%	25.300.000	26.412.500	1.112.500	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2	1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit	25.300.000	26.412.500	1.112.500	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2	3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	3171,66 Ton	281.000.000	432.481.500	151.481.500	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2	01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45,9 Kg/Kapita/Tahun	-	37.921.500	37.921.500	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2	02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku	281.000.000	394.560.000	113.560.000	DINAS PERIKANAN	
3	26					BIDANG PARIWISATA									
3	26					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI MATURITAS SPIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI MATURITAS SPIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3 Level	4.990.032.880	3.825.624.534	-	1.164.408.346	DISPARPORA
							Rata-Rata Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Rata-Rata Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0	80.000.000	-	-	80.000.000	DISPARPORA
3	26	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	3.955.532.880	3.329.709.822	-	625.823.058	DISPARPORA
3	26	01	2.03	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.955.532.880	3.329.709.822		(625.823.058)	DISPARPORA
3	26	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	0%	80.000.000	-	-	80.000.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	26	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	80.000.000	-	(80.000.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	317.700.000	285.935.100	-	31.764.900	
3	26	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	1.425.000	(9.575.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	16.500.000	855.000	(15.645.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321 Laporan	290.200.000	283.655.100	(6.544.900)	DISPARPORA	
3	26	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	166.000.000	14.964.000	-	151.036.000	
3	26	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	42.500.000	11.579.000	(30.921.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	123.500.000	3.385.000	(120.115.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	165.000.000	169.105.612	4.105.612		
3	26	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	82.500.000	88.240.000	5.740.000	DISPARPORA	
3	26	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.500.000	80.865.612	(1.634.388)	DISPARPORA	
3	26	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	305.800.000	25.910.000	-	279.890.000	
3	26	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Kendaraan	30.800.000	19.280.000	(11.520.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Peralatan	11.000.000	6.630.000	(4.370.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	220.000.000	-	(220.000.000)	DISPARPORA	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	26	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	33.000.000	-	(33.000.000)	DISPARPORA	
3	26	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	11.000.000	-	(11.000.000)	DISPARPORA	
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah PAD Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah PAD Pariwisata	0,02	5.478.986.370	55.051.900	-	5.423.934.470	DISPARPORA
3	26	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan	0	3.392.713.630	-	-	3.392.713.630	DISPARPORA
3	26	02	2.01	02		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	165.000.000	-	(165.000.000)	DISPARPORA	
3	26	02	2.01	03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	3.221.113.630	-	(3.221.113.630)	DISPARPORA	
3	26	02	2.01	04		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	6.600.000	-	(6.600.000)	DISPARPORA	
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang	4 Lokasi	2.026.272.740	32.642.400	-	1.993.630.340	DISPARPORA
3	26	02	2.03	01		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	313.500.000	-	(313.500.000)	DISPARPORA	
3	26	02	2.03	02		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	176.000.000	-	(176.000.000)	DISPARPORA	
3	26	02	2.03	03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	127.372.740	-	(127.372.740)	DISPARPORA	
3	26	02	2.03	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	1.402.800.000	32.642.400	(1.370.157.600)	DISPARPORA	
3	26	02	2.03	05		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	6.600.000	-	(6.600.000)	DISPARPORA	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomendasikan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomendasikan	5 Usahaa	60.000.000	22.409.500	-	37.590.500	DISPARPORA
3	26	02	2.04	01		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0	15.000.000	-	(15.000.000)		DISPARPORA
3	26	02	2.04	04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	45.000.000	22.409.500	(22.590.500)		DISPARPORA
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAAWAN	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAAWAN	0,0745	417.883.501	404.458.000	-	13.425.501	DISPARPORA
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan	2 Media	417.883.501	404.458.000	-	13.425.501	DISPARPORA
3	26	03	2.01	01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	81.400.000	80.310.000	(1.090.000)		DISPARPORA
3	26	03	2.01	02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Laporan	329.883.501	324.148.000	(5.735.501)		DISPARPORA
3	26	03	2.01	04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0	-	-	-		DISPARPORA
3	26	03	2.01	05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	6.600.000	-	(6.600.000)		DISPARPORA
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU EKFRAP YANG MEMILIKI HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU EKFRAP YANG MEMILIKI HAKI	0%	81.400.000	-	-	81.400.000	DISPARPORA
3	26	04	2.02			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	0	81.400.000	-	-	81.400.000	DISPARPORA
3	26	04	2.02	07		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	74.800.000	-	(74.800.000)		DISPARPORA
3	26	04	2.02	09		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	-	-	-		DISPARPORA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	26	04	2.02	10		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	6.600.000	-	(6.600.000)	DISPARPORA	
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf	12%	799.348.000	169.404.000	-	629.944.000	DISPARPORA
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	30 Orang	650.848.000	84.627.000	-	566.221.000	DISPARPORA
3	26	05	2.01	01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	308.000.000	84.627.000		(223.373.000)	DISPARPORA
3	26	05	2.01	02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0	154.000.000	-		(154.000.000)	DISPARPORA
3	26	05	2.01	04		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	33.748.000	-		(33.748.000)	DISPARPORA
3	26	05	2.01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	148.500.000	-		(148.500.000)	DISPARPORA
3	26	05	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	6.600.000	-		(6.600.000)	DISPARPORA
3	26	05	2.02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	30 Orang	148.500.000	84.777.000	-	63.723.000	DISPARPORA
3	26	05	2.02	01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	148.500.000	84.777.000		(63.723.000)	DISPARPORA
3	27					BIDANG PERTANIAN									
3	27	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	Level 3	13.334.625.869	11.636.401.282		1.698.224.587	
							Rata - rata Lama Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Rata - rata Lama Penddikan dan Pelatihan Pegawai	20 JPL	50.000.000	9.598.000		40.402.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
3	27	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	117.500.000	43.155.000	74.345.000	
3	27	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.500.000	-	3.500.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	114.000.000	43.155.000	70.845.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	12.316.963.706	11.301.912.575	1.015.051.131	
3	27	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 OB	12.286.963.706	11.301.912.575	985.051.131	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	15.000.000	-	15.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	15.000.000	-	15.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100%	35.000.000	1.913.500	33.086.500	
3	27	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	5.000.000	-	5.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	15.000.000	-	15.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	1.913.500	13.086.500	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	16,98%	50.000.000	9.598.000	40.402.000	
3	27	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000	9.598.000	40.402.000	Dinas Pertanian dan KP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	229.363.235	136.443.000	92.920.235		
3	27	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Instalasi Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	7.000.000	-	7.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	4.115.000	30.885.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.363.235	754.000	1.609.235	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	185.000.000	131.574.000	53.426.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	325.750.000	-	325.750.000		
3	27	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	300.000.000	-	300.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	25.750.000	-	25.750.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	111.048.928	121.364.207	-	10.315.279	
3	27	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	22.000.000	30.903.000	-	8.903.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	208 Laporan	25.198.928	31.137.207	-	5.938.279	Dinas Pertanian dan KP
3	27	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.250.000	1.724.000	4.526.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	57.600.000	57.600.000	-	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	149.000.000	22.015.000	126.985.000		
3	27	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	41.000.000	18.130.000	22.870.000	Dinas Pertanian dan KP	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	27	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000.000	-	100.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.000.000	3.885.000	- 885.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	5.000.000	-	5.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	7,48%	1.871.650.000	692.085.500	1.179.564.500		
							Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun		Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2,95%	525.800.000	301.775.500	224.024.500		
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100%	1.300.000.000	500.797.000	663.238.000		
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	28 Laporan	950.000.000	171.333.500	778.666.500	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	350.000.000	329.463.500	20.536.500	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	100%	631.650.000	275.853.500	355.796.500		
3	27	02	2.02	01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	571.650.000	191.288.500	380.361.500	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	60.000.000	84.565.000	- 24.565.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	2	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	100%	175.800.000	10.845.000	164.955.000		
3	27	2	2.03	1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan//Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan//Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	175.800.000	10.845.000	164.955.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	100%	5.000.000	4.040.500	959.500		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	27	02	2.05	04		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0.7 Ton	5.000.000	4.040.500	959.500	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.06			Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100%	285.000.000	202.325.000	82.675.000		
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih.Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih.Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1114 Ekor	275.000.000	198.465.000	76.535.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	02	2.06	02		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton	10.000.000	3.860.000	6.140.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,47%	3.883.150.000	801.810.865	3.081.339.135		
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	0%	831.900.000	-	831.900.000		
3	27	03	2.01	01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0 Dokumen	135.000.000	-	135.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.01	02		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	150.000.000	-	150.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	96.900.000	-	96.900.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.01	04		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0 Dokumen	450.000.000	-	450.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan	100%	3.051.250.000	801.810.865	2.249.439.135		
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0 Unit	491.250.000	-	491.250.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.02	02		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	120.000.000	-	120.000.000	Dinas Pertanian dan KP	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.260.000.000	185.400.525	1.074.599.475	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.02	4		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	-	-	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.02	07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	50.000.000	-	50.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	700.000.000	-	700.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	3	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	430.000.000	-	430.000.000	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	3	2.02	1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (LANJUTAN)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (LANJUTAN)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 paket	-	206.232.817	206.232.817	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	3	2.02	3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (LANJUTAN)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (LANJUTAN)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	-	359.808.616	359.808.616	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	3	2.02	8		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya (LANJUTAN)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya (LANJUTAN)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	-	42.444.207	42.444.207	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	3	2.02	9		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (LANJUTAN)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (LANJUTAN)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	-	7.924.700	7.924.700	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah	0,33%	575.600.000	383.646.275	191.953.725		
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penangannan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%	300.000.000	85.398.400	214.601.600		
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	300.000.000	85.398.400	214.601.600	Dinas Pertanian dan KP	
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	100%	60.000.000	44.262.000	15.738.000		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
3	27	04	2.02	01		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	15.000.000	8.582.000	6.418.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	04	2.02	02		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	7 Laporan	45.000.000	35.680.000	9.320.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	04	2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	100%	130.000.000	199.622.725	-	69.622.725
3	27	04	2.03	01		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	100.000.000	37.905.750	62.094.250	Dinas Pertanian dan KP
3	27	04	2.03	02		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	30.000.000	161.716.975	-	131.716.975
3	27	04	2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	100%	15.000.000	10.388.150		4.611.850
3	27	04	2.04	01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	15.000.000	10.388.150	4.611.850	Dinas Pertanian dan KP
3	27	04	2.05			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	100%	70.600.000	43.975.000		26.625.000
3	27	04	2.05	01		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	7 Laporan	70.600.000	43.975.000	26.625.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	9,00%	330.000.000	137.372.700		192.627.300
3	27	05	2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 Persen	330.000.000	137.372.700		192.627.300
3	27	05	2.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	180.000.000	88.734.000	91.266.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05	2.01	02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	50.000.000	48.638.700	1.361.300	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05	2.01	05		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 Laporan	100.000.000	-	100.000.000	Dinas Pertanian dan KP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
3	27	06				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100,00%	115.000.000	7.373.000	107.627.000	
3	27	06	2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pertanian dalam daerah kab/kota	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pertanian dalam daerah kab/kota	0%	100.000.000	-	100.000.000	
3	27	06	2.01	01		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	25.000.000	-	25.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.01	02		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	50.000.000	-	50.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.01	03		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	0 Laporan	25.000.000	-	25.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.03			Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	100%	15.000.000	7.373.000	7.627.000	
3	27	06	2.03	02		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	15.000.000	7.373.000	7.627.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	20,00%	859.650.000	421.014.600	438.635.400	
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	859.650.000	421.014.600	438.635.400	
3	27	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	200.000.000	187.276.600	12.723.400	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	300.000.000	177.914.000	122.086.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	259.650.000	55.824.000	203.826.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	05		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	100.000.000	-	100.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	30					BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,0%	30.000.000	- -	30.000.000	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	30	02	2,01			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	0,0%	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3		30	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG tepat waktu	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG tepat waktu	0	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,02	01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,07			Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,07	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0	10.000.000	-	-	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	95%	1.256.267.599	1.100.434.900	-	235.373.099	DISKUMDAG
3	30	03	2,01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	95%	1.256.267.599	1.100.434.900	-	235.373.099	DISKUMDAG
3	30	03	2,01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	286.338.699	75.346.500	-	80.775.799	DISKUMDAG
3	30	03	2,01	02		Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8	969.928.900	908.090.000	-	37.598.900	DISKUMDAG
3	30	03	2,01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket	-	116.998.400	-	116.998.400	DISKUMDAG
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	≥10	54.000.000	13.860.000	-	36.223.500	DISKUMDAG
3	30	04	2,02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	83%	47.000.000	13.860.000	-	29.223.500	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	30	04	2,02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	10.000.000	- -	10.000.000	DISKUMDAG	
3	30	04	2,02	02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	30.000.000	13.860.000 -	12.223.500	DISKUMDAG	
3	30	04	2,02	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	0	7.000.000	- -	7.000.000	DISKUMDAG	
3	30	04	2,03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	0%	7.000.000	- -	7.000.000	DISKUMDAG	
3	30	04	2,03	02		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	3.500.000	- -	3.500.000	DISKUMDAG	
3	30	04	2,03	03		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	3.500.000	- -	3.500.000	DISKUMDAG	
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	200.976.300	64.859.000 -	125.552.300	DISKUMDAG	
3	30	06	2,01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tahun berjalan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tahun berjalan	68,06%	200.976.300	64.859.000 -	125.552.300	DISKUMDAG	
3	30	06	2,01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	748 unit	169.217.300	57.829.000 -	102.373.300	DISKUMDAG	
3	30	06	2,01	02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	240 orang	31.759.000	7.030.000 -	23.179.000	DISKUMDAG	
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	-	10.577.747	- -	10.577.747	DISKUMDAG	
3	30	07				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	-	10.577.747	- -	10.577.747	DISKUMDAG	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	30	07	2,01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	10.577.747	-	-	10.577.747	DISKUMDAG
3	30	07	2,01	02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0	0	0	-	-	DISKUMDAG
3	30	07	2,01	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	-	-	-	-	DISKUMDAG
3	31					BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	20%	475.000.000	275.050.500	-	199.949.500	DISKUMDAG
3	31	02	2,01			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat kualitasnya	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat kualitasnya	3 Klp	475.000.000	275.050.500	-	199.949.500	DISKUMDAG
3	31	02	2,01	02		1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	80.000.000	-	-	80.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2,01	03		2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	110.000.000	23.063.000	-	86.937.000	DISKUMDAG
3	31	02	2,01	04		3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	120.000.000	-	-	120.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2,01	05		4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	115.000.000	251.987.500		136.987.500	DISKUMDAG
3	31	02	2,01	06		5 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	50.000.000	-	-	50.000.000	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	220.000.000	24.054.000	-	195.946.000	DISKUMDAG
3	31	03	2,01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah ang memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS	Persentase peningkatan usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah ang memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan	100%	220.000.000	24.054.000	-	195.946.000	DISKUMDAG
3	31	03	2,01	01		1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 dokumen	200.000.000	24.054.000	-	175.946.000	DISKUMDAG
3	31	03	2,01	02		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20.000.000	-	-	20.000.000	DISKUMDAG
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	51.000.000	35.394.500	-	15.605.500	DISKUMDAG
3	31	04	2,01			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	100%	51.000.000	35.394.500	-	15.605.500	DISKUMDAG

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
3	31	04	2,01	01		1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	25.000.000	35.394.500	10.394.500	DISKUMDAG	
3	31	04	2,01	02		2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	11.000.000	- -	11.000.000	DISKUMDAG	
3	31	04	2,01	03		3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0	15.000.000	- -	15.000.000	DISKUMDAG	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1					SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	125.709.000	172.719.000	47.010.000		
4	01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4 Rekomendasi	125.709.000	172.719.000	47.010.000		
4	01	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dok	15.570.000	62.580.000	47.010.000	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	03	2.01	02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	24.462.500	24.462.500	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dok	72.156.000	72.156.000	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	03	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dok	13.520.500	13.520.500	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah	100%	243.908.500	283.254.500	39.346.000		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian,dan movev yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian,dan movev yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	243.908.500	283.254.500	39.346.000	
4	01	03	2.02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	14.563.500	14.563.500	-	Bag. Adm. Pemb
4	01	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	114 Laporan	208.266.500	232.133.000	23.866.500	Bag. Adm. Pemb
4	01	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	21.078.500	36.558.000	15.479.500	Bag. Adm. Pemb
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60 s/d 80	212.937.500	212.937.500	-	
4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3 Jenis	212.937.500	212.937.500	-	
							Persentase pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem pengadaan pemerintah		Persentase pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem pengadaan pemerintah	100%				
4	01	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dok	134.060.000	134.060.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dok	61.489.000	61.489.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang	17.388.500	17.388.500	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	39.119.300	62.120.320	23.001.020	
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	39.119.300	62.120.320	23.001.020	
4	01	03	2.04	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dok	39.119.300	62.120.320	23.001.020	Bag. Perekonomian dan SDA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3,00	28.033.505.097	35.631.532.805	7.598.027.708		
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	75.756.000	54.929.500	(20.826.500)		
							Tingkat Kematangan Organisasi		Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	192.310.200	421.283.502	228.973.302		
4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	9.801.690.196	9.807.848.849	6.158.653		
4	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/Bulan	9.801.690.196	9.807.848.849	6.158.653	Bagian Umum	
4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	75.756.000	54.929.500	(20.826.500)		
4	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	-	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	9.388.500	-	-	9.388.500	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	6.990.000	6.990.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	14.444.500	14.444.500	-	Bagian Hukum	
4	01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-	Bag. Adm. Pemb	
4	01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	33.495.000	33.495.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-	Bag. Pemerintahan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101 Laporan	63.935.500	63.935.500	-	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	73.967.200	95.112.700	21.145.500	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	33.796.000	35.796.000	2.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 Laporan	51.196.500	51.196.500	-	Bag. Pemerintahan
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101 Laporan	78.291.100	78.291.100	-	Bag. Perekonomian dan SDA
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	15.488.000	15.488.000	-	Bagian Protokol
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	25.961.500	25.961.500	-	Bagian Hukum
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409 Laporan	1.236.197.000	1.236.197.000	-	Bagian Umum
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	43.642.000	63.125.500	19.483.500	Bagian Organisasi
4	01	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dok	-	-	-	Bagian Umum
4	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	220.490.000	4.364.703.550	4.144.213.550	
4	01	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	1.761.250.000	1.761.250.000	Bagian Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Umum
4	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Hukum
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Protokol
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Hukum
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Umum
4	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Organisasi
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.300.000	14.300.000	-	Bag. Adm. Pemb
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.065.000	50.065.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	15.000.000	15.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	107.800.000	266.800.000	159.000.000	Bagian Protokol
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bagian Hukum
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23.200.000	149.910.000	126.710.000	Bagian Umum
4	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.125.000	25.125.000	-	Bagian Organisasi
4	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	576.911.000	576.911.000	Bagian Umum
4	01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	-	1.505.342.550	1.505.342.550	Bagian Umum

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	9.249.417.840	9.560.095.840	310.678.000		
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.109.000	14.109.000	-	Bag. Adm. Pemb	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.910.800	26.350.800	4.440.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	14.151.000	14.151.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.161.500	11.161.500	-	Bag. Pemerintahan	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	7.809.000	7.809.000	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.240.500	12.240.500	-	Bagian Protokol	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4.332.500	4.332.500	-	Bagian Hukum	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	162.349.200	162.349.200	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	13.903.800	13.903.800	-	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.194.230.500	7.500.468.500	306.238.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	549.975.040	549.975.040	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	-	-	Bag. Pemerintahan	
4	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.243.245.000	1.243.245.000	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	1.753.932.750	2.748.442.255	994.509.505		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	502.490.950	552.490.950	50.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.000.000	9.000.000	-	Bag. Adm. Pemb	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	8.500.000	8.500.000	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.750.000	7.750.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	-	-	-	Bag. Pemerintahan	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	8.500.000	8.500.000	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.000.000	7.000.000	-	Bagian Protokol	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.000.000	7.000.000	-	Bagian Hukum	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	317.817.800	427.317.800	109.500.000	Bagian Umum	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.500.000	7.500.000	-	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	Bagian Hukum	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.420.000	4.420.000	-	Bag. Adm. Pemb	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.710.000	2.710.000	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.065.000	2.065.000	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.210.000	3.210.000	-	Bag. Pemerintahan	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.250.000	3.250.000	-	Bag. Perekonomian dan SDA	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000	6.000.000	5.000.000	Bagian Protokol	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.650.000	2.650.000	-	Bagian Hukum	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	17.485.000	24.700.000	7.215.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	-	-	-	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat	
4	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	484.064.000	1.206.858.505	722.794.505	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	357.520.000	457.520.000	100.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	2.939.650.111	4.547.264.861	1.607.614.750		
4	01	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	588.612.361	568.412.361	(20.200.000)	Bagian Umum	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	148.800.000	352.900.000	204.100.000	Bagian Umum
4	01	01	2.11	03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	289.800.000	352.200.000	62.400.000	Bagian Umum
4	01	01	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang/Bulan	1.912.437.750	3.273.752.500	1.361.314.750	Bagian Umum
4	01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga yang difasilitasi kebutuhannya pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga yang difasilitasi kebutuhannya pada Sekretariat Daerah	100%	905.653.000	907.483.000	1.830.000	
4	01	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	485.493.000	487.323.000	1.830.000	Bagian Umum
4	01	01	2.12	02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	373.935.000	373.935.000	-	Bagian Umum
4	01	01	2.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	46.225.000	46.225.000	-	Bagian Umum
4	01	01	2.13			Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	192.310.200	421.283.502	228.973.302	
4	01	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dok	87.115.800	153.020.800	65.905.000	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	43.142.500	65.172.302	22.029.802	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	26.082.500	62.237.000	36.154.500	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	04		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dok	35.969.400	140.853.400	104.884.000	Bagian Organisasi
4	01	01	2.13	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Dok	-	-	-	Bagian Organisasi
4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	100%	399.127.000	664.413.500	265.286.500	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	6 Laporan	167.144.000	245.322.500	78.178.500	Bagian Protokol
4	01	01	2.14	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	133.632.500	256.227.000	122.594.500	Bagian Protokol
4	01	01	2.14	03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	98.350.500	162.864.000	64.513.500	Bagian Protokol
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,3697	370.856.600	370.856.600	-	
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	316.821.100	316.821.100	-	
4	01	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dok	41.765.500	41.765.500	-	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dok	85.009.500	85.009.500	-	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dok	190.046.100	190.046.100	-	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.04			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang ditetapkan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang ditetapkan	10 MOU	54.035.500	54.035.500	-	
4	01	02	2.04	01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	54.035.500	54.035.500	-	Bag. Pemerintahan
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan	3	470.253.500	545.253.500	75.000.000	
4	01	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan	10 Perda dan 20 Perbub	470.253.500	545.253.500	75.000.000	Bagian Hukum
4	01	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dok	232.738.000	232.738.000	-	Bagian Hukum
4	01	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	112.115.500	187.115.500	75.000.000	Bagian Hukum
4	01	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dok	125.400.000	125.400.000	-	Bagian Hukum
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	13.482.836.000	13.457.250.500	(25.585.500)	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun sesuai aturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun sesuai aturan Perundang-Undangan	100%	13.482.836.000	13.457.250.500	(25.585.500)	
4	01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dok	12.981.648.000	12.943.983.000	- 37.665.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dok	501.188.000	501.188.000	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 Dok	-	12.079.500	12.079.500	Bag. Kesejahteraan Rakyat
											43.247.191.697	51.212.137.727	7.964.946.030	
4	2					SEKRETARIAT DPRD								
4	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	3.0	15.091.210.532	18.723.379.827	3.632.169.295	Sekretariat DPRD
							Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL				Sekretariat DPRD
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.010.510.003	2.019.460.628	8.950.625	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.010.510.003	2.019.460.628	8.950.625	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Tekhnis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Tekhnis terhadap keseluruhan ASN	100%	58.157.000	33.837.000	- 24.320.000	Sekretariat DPRD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	58.157.000	33.837.000	-	24.320.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	520.982.500	853.978.000		332.995.500	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.715.000	29.279.000		23.564.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.930.000	26.238.000		19.308.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.378.500	89.458.000		29.079.500	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.400.000	49.240.000		25.840.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	104.520.000	87.000.000	-	17.520.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.790.000	78.958.000		70.168.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		311.249.000	493.805.000		182.556.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		71.567.699	1.724.787.450		1.653.219.751	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	708.000.000		708.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	4 Paket	29.281.550	37.715.000		8.433.450	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		42.286.149	979.072.450		936.786.301	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan jasa penunjang urusan kantor		689.350.000	885.901.400		196.551.400	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.807.000	1.531.400	-	275.600	Sekretariat DPRD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		220.992.000	484.170.000	263.178.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		466.551.000	400.200.000	- 66.351.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		249.405.446	1.435.051.465	1.185.646.019	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		141.580.000	363.882.000	222.302.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27.690.000	34.394.000	6.704.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		10.210.000	20.710.000	10.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara/Direhabilitasi		69.925.446	1.016.065.465	946.140.019	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpunuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpunuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		10.378.397.884	10.403.422.884	25.025.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		10.059.397.884	10.059.397.884	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		194.000.000	216.500.000	22.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		125.000.000	127.525.000	2.525.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD		1.112.840.000	1.366.941.000	254.101.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	92 Laporan	92.840.000	180.441.000	87.601.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Yang Disediakan	3 Paket	1.020.000.000	1.186.500.000	166.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	7.033.223.750	11.562.249.250	4.529.025.500	Sekretariat DPRD
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda	100%	317.750.000	1.159.594.500	841.844.500	Sekretariat DPRD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	17.500.000	36.230.000	18.730.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Dokumen	300.250.000	1.123.364.500	823.114.500	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya		2.075.259.000	2.836.336.000	761.077.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	166 Dokumen	1.004.259.000	1.636.698.000	632.439.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	16 Dokumen	567.000.000	569.638.000	2.638.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	126.000.000	378.000.000	252.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	378.000.000	252.000.000	-126.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%	2.712.350.000	3.503.987.500	791.637.500	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD	460 Laporan	57.200.000	47.350.000	-9.850.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2.655.150.000	3.456.637.500	801.487.500	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.927.864.750	4.062.331.250	2.134.466.500	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi DPRD	615 Dokumen	1.927.864.750	4.062.331.250	2.134.466.500	Sekretariat DPRD	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	1					PERENCANAAN									
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.262.416.947	3.312.136.598	49.719.651		
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL					
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	2.305.093.947	2.986.390.406	681.296.459	Sekretariat	
5	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.295.093.947	2.986.390.406	691.296.459		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	10.000.000	0	-10.000.000	
5	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	-	5.000.000	0	-5.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	5.000.000	0	-5.000.000	
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	-	180.000.000	0	-180.000.000	Sekretariat
5	01	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	10.000.000	0	-10.000.000	
5	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	170.000.000	0	-170.000.000	
5	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	412.897.000	136.940.000	-275.957.000	Sekretariat
5	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.850.000	0	-5.850.000	
5	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.005.000	9.430.000	-22.575.000	
5	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.005.000	1.143.000	-8.862.000	
5	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	22.384.000	3.740.000	-18.644.000	
5	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.732.000	3.178.000	-3.554.000	
5	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.800.000	0	-10.800.000	
5	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	325.121.000	119.449.000	-205.672.000	
5	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	159.326.000	50.700.000	-108.626.000	Sekretariat
5	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	48.000.000	0	-48.000.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	111.326.000	50.700.000	-60.626.000	
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	147.000.000	112.206.192	-34.793.808	Sekretariat
5	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	64.200.000	52.206.192	-11.993.808	
5	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000	60.000.000	-22.800.000	
5	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	53.100.000	25.900.000	-27.200.000	Sekretariat
5	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	27.350.000	15.025.000	-12.325.000	
5	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	20.750.000	9.200.000	-11.550.000	
5	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	1.675.000	-3.325.000	
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan PerUUan dan Ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan PerUUan dan Ditetapkan tepat waktu	100 Persen	524.000.000	227.817.350	-296.182.650	
							Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100 Persen			0	
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan	100 Persen	354.000.000	198.092.700	-155.907.300	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	10.000.000	14.852.100	4.852.100	
5	01	02	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	4.072.100	-20.927.900	
5	01	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	45.000.000	19.174.000	-25.826.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	274.000.000	158.116.500	-115.883.500	
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100 Persen	50.000.000	5.211.500	-44.788.500	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	20.000.000	0	-20.000.000	
5	01	02	2.02	02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	20.000.000	5.211.500	-14.788.500	
5	01	02	2.02	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	10.000.000	0	-10.000.000	
5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100 Persen	120.000.000	24.513.150	-95.486.850	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	52.500.000	4.062.250	-48.437.750	
5	01	02	2.03	02		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	15.000.000	0	-15.000.000	
5	01	02	2.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	52.500.000	22.290.400	-30.209.600	
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan	100 Persen	765.000.000	278.896.500	-486.103.500	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	48 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255.000.000	123.263.500	-131.736.500	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	03	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	42.500.000	27.088.700	-15.411.300	
5	01	03	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	-	42.500.000	0	-42.500.000	
5	01	03	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	42.500.000	35.408.500	-7.091.500	
5	01	03	2.01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	42.500.000	14.630.900	-27.869.100	
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	-	42.500.000	0	-42.500.000	
5	01	03	2.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	42.500.000	46.135.400	3.635.400	
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	18 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255.000.000	60.781.900	-194.218.100	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	48.750.000	16.230.500	-32.519.500	
5	01	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	-	30.000.000	0	-30.000.000	
5	01	03	2.02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	48.750.000	18.805.100	-29.944.900	
5	01	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	58.750.000	9.212.300	-49.537.700	
5	01	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	-	10.000.000	0	-10.000.000	
5	01	03	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	58.750.000	16.534.000	-42.216.000	
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	33 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255.000.000	94.851.100	-160.148.900	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	42.500.000	34.462.100	-8.037.900	
5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	-	42.500.000	0	-42.500.000	
5	01	03	2.03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	42.500.000	54.385.000	11.885.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	01	03	2.03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	42.500.000	1.765.000	-40.735.000	
5	01	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	-	42.500.000	0	-42.500.000	
5	01	03	2.03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	42.500.000	4.239.000	-38.261.000	
5	2					KEUANGAN								
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		5.601.258.548	5.906.453.548	305.195.000	BKAD
5	02	01	20,1			Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD		2.820.500	2.820.500	0	BKAD
5	02	01	20,1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	12 Bln	2.820.500	2.820.500	0	BKAD
5	02	01	20,2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD		4.984.430.048	4.984.430.048	0	BKAD
5	02	01	20,2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	12 Bln	4.984.430.048	4.984.430.048	0	BKAD
5	02	01	20,5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik		26.400.000	26.400.000	0	BKAD
5	02	01	20,5	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1 Kegiatan	26.400.000	26.400.000	0	BKAD
5	02	01	20,6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia		181.133.800	308.343.800	127.210.000	BKAD
5	02	01	20,6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	4 Jenis	3.841.800	3.841.800	0	BKAD
5	02	01	20,6	3		Belanja Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Belanja Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	4 Jenis		5.000.000	5.000.000	BKAD
5	02	01	20,6	9		Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		177.292.000	299.502.000	122.210.000	BKAD
5	02	01	20,7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan		31.000.000	153.785.000	122.785.000	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
									Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1					2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	02	01	20,7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	31.000.000	153.785.000	122.785.000	BKAD	
5	02	01	20,8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		310.989.200	306.189.200	-4.800.000	BKAD	
5	02	01	20,8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	12 Jenis	306.189.200	306.189.200	0	BKAD	
5	02	01	20,8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 OB	4.800.000	-	-4.800.000	BKAD	
5	02	01	20,9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara		64.485.000	124.485.000	60.000.000	BKAD	
5	02	01	20,9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	4 Unit	9.500.000	9.500.000	0	BKAD	
5	02	01	20,9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	4 Unit	40.000.000	40.000.000	0	BKAD	
5	02	01	20,9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	14.985.000	74.985.000	60.000.000	BKAD	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu		27.524.500	29.288.800	1.764.300	BKAD	
						Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah		98.832.732.651	99.315.239.143	1.294.804.000	BKAD	
						Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu		487.002.100	562.002.100	75.000.000	BKAD	
						Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu		Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu		1.071.527.500	1.149.008.500	77.481.000	BKAD	
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu		891.828.000	971.073.300	79.245.300	BKAD	
5	02	02	2,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	1 Dok.	33.219.000	33.219.000	0	BKAD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	02	02	2,01	2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	1 Dok.	26.130.000	26.130.000	0	BKAD	
5	02	02	2,01	3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	1 Dok.	6.847.000	6.847.000	0	BKAD	
5	02	02	2,01	4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	1 Dok.	7.497.000	7.497.000	0	BKAD	
5	02	02	2,01	5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	1 Dok.	5.883.000	6.713.300	830.300	BKAD	
5	02	02	2,01	6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	1 Dok.	7.297.500	8.231.500	934.000	BKAD	
5	02	02	2,01	7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	1 Dok.	323.391.000	339.180.000	15.789.000	BKAD	
5	02	02	2,01	8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	1 Dok.	258.386.000	264.986.000	6.600.000	BKAD	
5	02	02	2,01	9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	1 Dok.	200.185.500	250.327.500	50.142.000	BKAD	
5	02	02	2,01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			11.497.500	13.972.500	2.475.000	BKAD	
5	02	02	2,01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			11.494.500	13.969.500	2.475.000	BKAD	
5	02	02	2,02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas		348.925.500	443.729.500	94.804.000	BKAD	
5	02	02	2,02	1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	1 Keg	260.691.000	333.825.000	73.134.000	BKAD	
5	02	02	2,02	5		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Keg	47.092.000	49.732.000	2.640.000	BKAD	
5	02	02	2,02	6		Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	1 Keg	10.742.000	17.242.000	6.500.000	BKAD	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	02	02	2,02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	1 Keg	30.400.500	42.930.500	12.530.000	BKAD
5	02	02	2,03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhanpelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhanpelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		487.002.100	562.002.100	75.000.000	BKAD
5	02	02	2,03	2		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	1 Keg	28.177.000	28.177.000	0	BKAD
5	02	02	2,03	3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	1 Keg	33.284.300	33.284.300	0	BKAD
5	02	02	2,03	5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	1 Keg	354.024.300	429.024.300	75.000.000	BKAD
5	02	02	2,03	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur akutansi dan pelaporan keuangan	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur akutansi dan pelaporan keuangan	1 Keg	71.516.500	71.516.500	0	BKAD
5	02	02	2,04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			98.483.807.151	98.871.509.643	387.702.492	BKAD
5	02	02	2,04	4		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok Bunga dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok Bunga dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pinjaman Daerah	1 Keg	1.530.000.000	2.730.000.000	1.200.000.000	BKAD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	02	02	2,04	8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Kewuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Doku men Penerima Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Kewuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Doku men Penerima Bantuan Keuangan	1 Keg	91.788.792.151	91.788.792.151	0	BKAD
5	02	02	2,04	9		Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen SKPD Penerima BTT	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen SKPD Penerima BTT	1 Keg	5.165.015.000	4.352.717.492	-812.297.508	BKAD
5	02	02	2,05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD		207.224.000	207.224.000	0	BKAD
5	02	02	2,05	1		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	1 Keg.	56.221.000	56.221.000	0	BKAD
5	02	02	2,05	2		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Keg.	87.418.500	87.418.500	0	BKAD
5	02	02	2,05	3		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Keg.	63.584.500	63.584.500	0	BKAD
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat		617.646.975	821.253.975	203.607.000	BKAD
							Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat		Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat					BKAD
							Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan		Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan					BKAD
5	02	03	2,01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola		617.646.975	821.253.975	203.607.000	BKAD
5	02	03	2,01	1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	1 Keg.	43.851.500	43.851.500	0	BKAD
5	02	03	2,01	3		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Keg.	3.541.000	3.541.000	0	BKAD
5	02	03	2,01	4		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	1 Keg.	15.270.000	15.270.000	0	BKAD
5	02	03	2,01	5		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	1 Keg.	184.610.100	244.329.100	59.719.000	BKAD
5	02	03	2,01	6		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	1 Keg.	63.738.000	63.738.000	0	BKAD
5	02	03	2,01	7		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	1 Keg.	101.091.375	235.091.375	134.000.000	BKAD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	02	03	2,01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Keg.	99.413.000	99.413.000	0	BKAD	
5	02	03	2,01	11		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	17.863.500	13.903.500	-3.960.000	BKAD	
5	02	03	2,01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	1 Keg.	88.268.500	102.116.500	13.848.000	BKAD	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah	3,00	4.885.952.879	5.558.130.717	672.177.838	Badan Pendapatan Daerah	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL					
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-Undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-Undangan	100%	3.965.315.129	3.499.920.567	-	465.394.562	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.965.315.129	3.499.920.567	-	465.394.562	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	70.000.000	-	-	70.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	70.000.000	-	-	70.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	152.281.500	364.797.100		212.515.600	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	950.000	910.000	-	40.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	862.000	627.500	-	234.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	150.469.500	363.259.600		212.790.100	Badan Pendapatan Daerah

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	02	01	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	371.255.000	1.406.833.250	1.035.578.250	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	4 Unit	44.000.000	128.400.000	84.400.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	45 Unit	57.255.000	484.321.250	427.066.250	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.000.000	794.112.000	719.112.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	195.000.000	-	195.000.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	278.832.500	210.659.550	-	68.172.950	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	70.757.000	38.629.500	-	32.127.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	74.875.500	31.630.050	-	43.245.450	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	133.200.000	140.400.000	7.200.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	48.268.750	75.920.250	27.651.500	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	32.950.000	58.470.000	25.520.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9.300.000	11.000.000	1.700.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.018.750	6.450.250	431.500	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Devisiasi Realisasi PAD Terhadap anggaran PAD dalam APBD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Devisiasi Realisasi PAD Terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,84	4.266.716.000	3.345.348.700	-	921.367.300	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Keterpuhan Capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Keterpuhan Capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	100%	4.266.716.000	3.345.348.700	-	921.367.300	Badan Pendapatan Daerah

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
												Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	02	04	2	01	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.096.448.000	354.165.000	-	742.283.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	155.398.000	1.464.636.000		1.309.238.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	18 Unit	349.200.000	394.133.100		44.933.100	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1.680.452.000	656.863.000	-	1.023.589.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	205.009.500	47.220.000	-	157.789.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	46.800.000	39.237.000	-	7.563.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	59.752.000	13.355.000	-	46.397.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	524.156.500	300.317.600	-	223.838.900	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2	01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	149.500.000	75.422.000	-	74.078.000	Badan Pendapatan Daerah
5	3						KEPEGAWAIAN									
5	03	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	3	3.601.623.848	3.265.859.211		-335.764.637	BKPSDM
								Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20	202.717.200	-		-202.717.200	BKPSDM
5	3	1	2.02				Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	3.098.852.129	2.873.818.411		-225.033.718	BKPSDM
5	3	1	2.02	1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.098.852.129	2.873.818.411		-225.033.718	BKPSDM
5	3	1	2.05				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	0%	202.717.200	-		-202.717.200	BKPSDM
5	3	1	2.05	09			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	202.717.200	-		-202.717.200	BKPSDM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	3	1	2.06			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun	100%	264.336.900	203.869.800	-60.467.100	BKPSDM
5	3	1	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	6.639.400	2.354.000	-4.285.400	BKPSDM
5	3	1	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	18.275.000	14.428.000	-3.847.000	BKPSDM
5	3	1	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 laporan	239.422.500	187.087.800	-52.334.700	BKPSDM
5	3	1	2.07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun	97,73%	102.421.625	115.700.000	13.278.375	BKPSDM
5	3	1	2.07	05		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	-	-	0	BKPSDM
5	3	1	2.07	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 unit	102.421.625	115.700.000	13.278.375	BKPSDM
5	3	1	2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	88.484.500	46.366.000	-42.118.500	BKPSDM
5	3	1	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	88.484.500	46.366.000	-42.118.500	BKPSDM
5	3	1	2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun	10,59%	47.528.694	26.105.000	-21.423.694	BKPSDM
5	3	1	2.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	31.878.694	22.655.000	-9.223.694	BKPSDM
5	3	1	2.09	05		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0	8.750.000	-	-8.750.000	BKPSDM
5	3	1	2.09	10		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 unit	6.900.000	3.450.000	-3.450.000	BKPSDM
5	3	2				Program Kepegawaian Daerah	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Kategori B (61-80)	2.324.575.633	736.548.150	-1.588.027.483	BKPSDM
5	3	2	2.01			Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	60,41%	1.116.987.135	321.658.950	-795.328.185	BKPSDM
5	3	2	2.01	02		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	2 dokumen	63.579.450	1.811.400	-61.768.050	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1					2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	3	2	2.01	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	432.510.045	176.262.500	-256.247.545	BKPSDM	
5	3	2	2.01	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 dokumen	130.055.640	33.528.300	-96.527.340	BKPSDM	
5	3	2	2.01	08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	2 lembaga	12.512.000	13.886.500	1.374.500	BKPSDM	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	420.000.000	82.934.750	-337.065.250	BKPSDM	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen	58.330.000	13.235.500	-45.094.500	BKPSDM	
5	3	2	2.02		Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan	Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan	86%	776.124.750	361.285.200	-414.839.550	BKPSDM	
5	3	2	2.02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	6 dokumen	90.906.250	55.823.000	-35.083.250	BKPSDM	
5	3	2	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 dokumen	185.218.500	85.445.600	-99.772.900	BKPSDM	
5	3	2	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	500.000.000	220.016.600	-279.983.400	BKPSDM	
5	3	2	2.03		Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3	Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3	83,70%	174.645.000	2.038.000	-172.607.000	BKPSDM	
5	3	2	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	30 orang	174.645.000	2.038.000	-172.607.000	BKPSDM	
5	3	2	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik	90,02%	256.818.748	51.566.000	-205.252.748	BKPSDM	
5	3	2	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 dokumen	45.355.748	13.928.500	-31.427.248	BKPSDM	
5	3	2	2.04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	226 orang	91.044.000	22.290.000	-68.754.000	BKPSDM	
5	3	2	2.04	07	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	7 orang	120.419.000	15.347.500	-105.071.500	BKPSDM	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	4	2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP setahun	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP setahun	25%	1.344.851.500	73.544.000	-1.271.307.500	BKPSDM	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi	0%	25.000.000	-	-25.000.000	BKPSDM	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	4	2	2.01	01		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	0	25.000.000	-	-25.000.000	BKPSDM
5	4	2	2.02			Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik	100%	1.319.851.500	73.544.000	-1.246.307.500	BKPSDM
5	4	2	2.02	07		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	2 laporan	1.319.851.500	73.544.000	-1.246.307.500	BKPSDM
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 60,01 Poin	735.000.000	52.025.300	-682.974.700	
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	588.000.000	26.734.800	-561.265.200	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	147.000.000	15.898.800	-131.101.200	
5	05	02	2.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	147.000.000	10.836.000	-136.164.000	
5	05	02	2.01	13		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	147.000.000	0	-147.000.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
5	05	02	2.01	14		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	147.000.000	0	-147.000.000		
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100 Persen	147.000.000	25.290.500	-121.709.500	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	147.000.000	25.290.500	-121.709.500		
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1					INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	3 Level	5.746.993.248	4.208.970.819	-	1.538.022.429	Inspektorat
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	16 JP							
6	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	3.119.663.248	3.799.295.719		679.632.471	Inspektorat
6	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/ Tahun	3.119.663.248	3.799.295.719		679.632.471	Inspektorat
6	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat inspektorat yang mengikuti pelatihan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat inspektorat yang mengikuti pelatihan	100 %	2.118.252.000	61.866.600	-	2.056.385.400	Inspektorat
6	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	945.192.000	14.711.200	-	930.480.800	Inspektorat
6	01	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	1.173.060.000	47.155.400	-	1.125.904.600	Inspektorat
6	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	209.100.000	174.037.500	-	35.062.500	Inspektorat
6	01	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	7 Paket	11.100.000	2.049.000	-	9.051.000	Inspektorat
6	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	198.000.000	171.988.500	-	26.011.500	Inspektorat

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB					
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif									
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan						
1						2		3		4		5		9	10	11		12		13
6	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150.928.000	30.924.000	-	120.004.000	Inspektorat					
6	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	28 Unit	80.048.000	30.924.000	-	49.124.000	Inspektorat					
6	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	70.880.000	-	-	70.880.000	Inspektorat					
6	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 %	69.800.000	90.224.000		20.424.000	Inspektorat					
6	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	12 Laporan	55.400.000	85.424.000		30.024.000	Inspektorat					
6	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	-	Inspektorat					
6	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	4.800.000	-	9.600.000	Inspektorat					
6	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	79.250.000	52.623.000	-	26.627.000	Inspektorat					
6	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	21.000.000	37.645.000		16.645.000	Inspektorat					
6	01	01	2	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Dipelihara	20 Unit	5.250.000	-	-	5.250.000	Inspektorat					
6	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 Unit	18.000.000	7.630.000	-	10.370.000	Inspektorat					
6	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	7.348.000	-	27.652.000	Inspektorat					
6	01	01	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90 %	2.303.079.000	1.321.250.000	-	981.829.000	Inspektorat					
6	01	01	2			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	20 %	1.437.696.000	711.545.000	-	726.151.000	Inspektorat					
6	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Laporan	612.000.000	196.315.000	-	415.685.000	Inspektorat					
6	01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	174.009.000	115.820.000	-	58.189.000	Inspektorat					

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
6	01	01	2	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	43 Laporan	204.000.000	181.230.000	-	22.770.000	Inspektorat
6	01	01	2	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	31.680.000	8.300.000	-	23.380.000	Inspektorat
6	01	01	2	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7 Laporan	170.225.000	146.735.000	-	23.490.000	Inspektorat
6	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	28.100.000	410.000	-	27.690.000	Inspektorat
6	01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	217.682.000	62.735.000	-	154.947.000	Inspektorat
6	01	01	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	865.383.000	609.705.000	-	255.678.000	Inspektorat
6	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	39.572.000	19.600.000	-	19.972.000	Inspektorat
6	01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45 Laporan	825.811.000	590.105.000	-	235.706.000	Inspektorat
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	7 %	676.294.000	536.923.500	-	139.370.500	Inspektorat
6	01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	40.198.000	-	-	40.198.000	Inspektorat
6	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1.500.000	-	-	1.500.000	Inspektorat
6	01	03	2	01	02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	38.698.000	-	-	38.698.000	Inspektorat
6	01	03	2	02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,5 IEPK	636.096.000	536.923.500	-	99.172.500	Inspektorat
6	01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah	108.026.000	180.825.000	-	72.799.000	Inspektorat
6	01	03	2	02	02	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	107.685.000	20.880.000	-	86.805.000	Inspektorat

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
6	01	03	2	02	03	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	420.385.000	289.564.000	-	130.821.000	Inspektorat
6	01	03	2	02	04	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	-	45.654.500		45.654.500	Inspektorat
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1					KECAMATAN									
KECAMATAN BARRU															
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3	5.836.177.590	5.095.415.600	-	740.761.990	Kecamatan Barru
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	0	76.811.000	-	-	76.811.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	4.437.273.135	4.185.893.606	-	251.379.529	Kecamatan Barru
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	4.437.273.135	4.185.893.606	-	251.379.529	Kecamatan Barru
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	0%	76.811.000	-	-	76.811.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	05	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	76.811.000	-	-	76.811.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	444.466.930	218.663.400	-	225.803.530	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	13.217.000	-	-	13.217.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	11.558.430	-	-	11.558.430	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.645.000	61.350.000		30.705.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.419.000	7.572.000	-	5.847.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15.720.000	15.600.000	-	120.000	Kecamatan Barru

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2 06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.850.000	9.406.000	-	5.444.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506 Laporan	345.057.500	124.735.400	-	220.322.100	Kecamatan Barru
7	01	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	240.756.000	48.000.000	-	86.656.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 07	05		Pengadaan Meubel	Jumlah unit Meubel yang tersedia	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	55.500.000	-	-	55.500.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	185.256.000	48.000.000	-	31.156.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	594.820.379	554.007.137	-	40.813.242	Kecamatan Barru
7	01	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	525.196.100	488.610.300	-	36.585.800	Kecamatan Barru
7	01	01	2 08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.824.279	36.531.837	-	4.292.442	Kecamatan Barru
7	01	01	2 08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	28.865.000		65.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	118.861.146	88.851.457	-	30.009.689	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	78.023.000	61.472.000	-	16.551.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	1.624.620	-	-	1.624.620	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	12.760.000	4.680.000	-	8.080.000	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	22.453.526	20.199.457	-	2.254.069	Kecamatan Barru
7	01	01	2 09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	4.000.000	2.500.000	-	1.500.000	Kecamatan Barru
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100*%	65.054.800	73.706.300		8.651.500	Kecamatan Barru

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	02	2 01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100**%	63.662.000	43.461.500	-	20.200.500	Kecamatan Barru
7	01	02	2 01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	26.250.000	11.994.500	-	14.255.500	Kecamatan Barru
7	01	02	2 01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	37.412.000	31.467.000	-	5.945.000	Kecamatan Barru
7	01	02	2 02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	1.392.800	30.244.800	-	28.852.000	Kecamatan Barru
7	01	02	2 02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	1.392.800	30.244.800	-	28.852.000	Kecamatan Barru
7	01	03		00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	2.963.136.270	1.560.199.257	-	1.413.677.913	Kecamatan Barru
7	01	03	2 01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	2.945.250	2.360.000	-	585.250	Kecamatan Barru
7	01	03	2 01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang tersusun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatn	2.945.250	2.360.000	-	585.250	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	2.138.595.820	749.823.257	-	1.399.513.463	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatn	61.030.450	29.750.000	-	31.280.450	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1.700.000.000	579.477.357	-	1.120.522.643	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah laporan kegiatan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan yang tersusun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	-	-	-	-	Kecamatan Barru

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	03	2 02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / ormas	373.651.570	128.355.000	-	245.296.570	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	3.913.800	1.500.000	-	2.413.800	Kecamatan Barru
7	01	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Paket	-	10.740.900	-	10.740.900	Kecamatan Barru
7	01	03	2 03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	100%	821.595.200	808.016.000	-	13.579.200	Kecamatan Barru
7	01	03	2 03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	821.595.200	808.016.000	-	13.579.200	Kecamatan Barru
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	40.294.000	27.930.000	-	12.364.000	Kecamatan Barru
7	01	04	2 01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	9 Laporan	40.294.000	27.930.000	-	12.364.000	Kecamatan Barru
7	01	04	2 01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 evaluasi	21.814.000	21.660.000	-	154.000	Kecamatan Barru
7	01	04	2 01	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	18.480.000	6.270.000	-	12.210.000	Kecamatan Barru
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	2.578.600	654.000	-	1.924.600	Kecamatan Barru
7	01	05	2 01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	2.578.600	654.000	-	1.924.600	Kecamatan Barru
7	01	05	2 01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.578.600	654.000	-	1.924.600	Kecamatan Barru
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	9.119.000	1.760.000	-	7.359.000	Kecamatan Barru
7	01	06	2 01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	9.119.000	1.760.000	-	7.359.000	Kecamatan Barru
7	01	06	2 01	17		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	9.119.000	1.760.000	-	7.359.000	Kecamatan Barru

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
												Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
KECAMATAN TANETE RILAU																
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Tanete Rilau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Tanete Rilau	3.00 Point	3.834.629.834	3.369.787.499	-	464.842.335	Kec.Tanete Rilau	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	51.861.000	0	-	-51.861.000		
7	01	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	3.161.810.434	2.963.450.518	-	198.359.916	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	3.161.810.434	2.963.450.518	-	198.359.916	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	100 % (12 Orang)	51.861.000	-	-	51.861.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,05	11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	51.861.000	-	-	51.861.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Admintrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Admintrasi umum perangkat daerah	100%	348.116.400	223.809.000	-	124.307.400	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	1		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.437.200	944.000	-	168.493.200	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	21.000.000	1.387.500	-	19.612.500	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.798.000	43.130.000		26.332.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	16.798.000	5.518.000	-	11.280.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.876.000	5.040.000	-	2.836.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	6.300.000	6.372.000		72.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550 Laporan	109.907.200	161.417.500		51.510.300	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100% (15 unit)	84.525.000	-	-	84.525.000	Kec.Tanete Rilau	
7	01	01	2,07	05		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	13.650.000	-	-	13.650.000	Kec.Tanete Rilau	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2,07	06		Pengadan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	57.750.000	-	-	57.750.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,07	11		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	13.125.000	-	-	13.125.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Kantor	100 % (9 Laporan)	162.805.000	149.512.981	-	13.292.019	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	119.885.000	110.582.200	-	9.302.800	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	33.220.000	29.330.781	-	3.889.219	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	9.700.000	9.600.000	-	100.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemeritahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemeritahan daerah yang dipelihara	100 % (33 unit)	77.373.000	33.015.000	-	44.358.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	33.705.000	25.740.000	-	7.965.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	2.613.000	-	-	2.613.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	6.405.000	7.275.000	-	870.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	31.500.000	-	-	31.500.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	01	2,09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	3.150.000	-	-	3.150.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diinflementasikan	PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diinflementasikan	100	Rp 31.995.000	Rp 15.958.000	Rp (16.037.000)		Kec.Tanete Rilau
7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepenuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepenuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	Rp 31.470.000	Rp 15.958.000	Rp (15.512.000)		Kec.Tanete Rilau
7	01	02	2,01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34 laporan	19.950.000	15.958.000	-	3.992.000	Kec.Tanete Rilau

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	02	2,01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	11.520.000,00	-	-	11.520.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	02	2,02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP	100% (15 Laporan)	525.000	-	-	525.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	02	2,02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	525.000	-	-	525.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	100	792.623.565	545.788.234	-	246.835.331	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100 % (6 Lembaga)	2.945.250,00	-		(2.945.250,00)	Kec.Tanete Rilau
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	2.945.250	-	-	2.945.250	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	510.167.265	193.902.234	-	316.265.031	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	32.151.000	20.460.000	-	11.691.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	433.916.265	173.442.234	-	260.474.031	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	42.000.000	-	-	42.000.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	2.100.000	-	-	2.100.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100%	279.511.050	351.886.000		72.374.950	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	277.011.050	351.886.000		74.874.950	Kec.Tanete Rilau
7	01	03	2,03	04		Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	2.500.000	-	-	2.500.000	Kec.Tanete Rilau

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PersentasePemerintahan Desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PersentasePemerintahan Desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	11.760.000	1.650.000	-	10.110.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	06	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 laporan	11.760.000	1.650.000	-	10.110.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	06	2,01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 laporan	11.760.000	1.650.000	-	10.110.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	43.218.000	65.830.400		22.612.400	Kec.Tanete Rilau
7	01	05	2,01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25 orang	43.218.000	65.830.400		22.612.400	Kec.Tanete Rilau
7	01	05	2,01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	43.218.000	65.830.400		22.612.400	Kec.Tanete Rilau
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100% (7 Laporan)	50.450.000	26.700.000	-	23.750.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	04	2,01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan	50.450.000	26.700.000		(23.750.000)	Kec.Tanete Rilau
7	01	04	2,01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 evaluasi	25.695.000	23.400.000	-	2.295.000	Kec.Tanete Rilau
7	01	04	2,01	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24.755.000	3.300.000	-	21.455.000	Kec.Tanete Rilau
KECAMATAN TANETE RIAJA															
						PROGRAM PENUNJANG	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Tanete Riaja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Tanete Riaja	3 level					Kec Tanete Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	0				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	3.546.725.456	3.156.630.009	-	390.095.447	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14 Dokumen,8 Laporan	3.104.000	-	-	3.104.000	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	482.000	-		(482.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	437.000	-		(437.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2.05			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	3.111.592.086	2.779.754.647	-	331.837.439	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2.05	09		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	3.111.174.086	2.779.754.647	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	209.000	-		(209.000)	Kec Tanete Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2,02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	209.000	-	(209.000)	Kec Tanete Riaja	
7	1	1	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	530.000	- -	530.000	Kec Tanete Riaja	
7	1	1	2,03	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	265.000	- -	482.000	Kec Tanete Riaja	
7	1	1	2,03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	265.000	- -	482.000	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat komptensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	54.000.000	- -	54.000.000	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2.05	09		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Kec/ Kel. Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	54.000.000	- -	482.000	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2.06	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	143.080.920	239.085.900	96.004.980	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik Yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.324.920	2.955.000	630.080	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000	15.867.500	12.867.500	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum harian pegawai yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.896.000	37.740.000	20.844.000	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,06	09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	6.000.000	6.344.500	344.500	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,07			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ media cetak yang tersedia selama 1 Tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.160.000	1.800.000	(3.360.000)	Kec Tanete Riaja	
7	01	01	2,07	05		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.100.000	7.122.000	5.022.000	Kec Tanete Riaja	
7	1	1	2,06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	107.600.000	167.256.900	59.656.900	Kec Tanete Riaja	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2,08			Pengadaaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.000.000	21.161.000	-	31.839.000	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,08	01		Pengadaa Mebel	Jumlah unit Meubel yang Tersedia	Pengadaa Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		14.000.000	-	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,08	02		Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Tersedia	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		39.000.000	21.161.000	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	01	2,09			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	143.358.450	83.649.462	-	59.708.988	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	121.306.450	63.780.000	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	19.052.000	19.869.462	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	-		(3.000.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	02				Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	38.060.000	32.979.000	-	5.081.000	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.560.000	24.789.000		(1.771.000)	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,09	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Jenis	5.000.000	-		(5.000.000)	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000	5.275.000		2.775.000	Kec Tanete Riaja
7	1	1	2,09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000	2.915.000		(1.085.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	03				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumentasi SOP Pelayanan yand disusun dan Implementasikan	100%	27.903.900	32.490.000		4.586.100	Kec Tanete Riaja
7	01	03	2,02			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di desa/kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahanan di Tingkat Kecamatan	100%	27.403.900	32.010.000		4.606.100	Kec Tanete Riaja
7	01	03	2,02	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	24.203.900	32.010.000	-	482.000	Kec Tanete Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	2	2,01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.200.000	-	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	03	2,02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	500.000	480.000	-	20.000	Kec Tanete Riaja
7	1	2	2,02	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	500.000	480.000	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	395.333.320	228.518.800	-	166.814.520	Kec Tanete Riaja
7	01	04	2,03			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	Kec Tanete Riaja
7	1	3	2,01	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	3.000.000	1.500.000		(1.500.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	04				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan yang diberdayakan	4 Kegiatan	282.738.320	206.163.800	-	76.574.520	Kec Tanete Riaja
7	1	3	2,02	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	18.760.000	12.190.800		(6.569.200)	Kec Tanete Riaja
7	1	3	2,02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	260.424.320	-		(260.424.320)	Kec Tanete Riaja
7	1	3	2,02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	2.000.000	193.973.000		191.973.000	Kec Tanete Riaja
7	1	3	2,02	4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	1.554.000	-		(1.554.000)	Kec Tanete Riaja
7	01	04	2,03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100%	109.595.000	20.855.000	-	88.740.000	Kec Tanete Riaja
7	01	04	2,03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi	5 lbg	109.595.000	20.855.000	-	482.000	Kec Tanete Riaja
7	01	04				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	30.621.000	47.801.000		17.180.000	Kec Tanete Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	04	2,03			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase pembinaan wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	30.621.000	47.801.000	17.180.000	Kec Tanete Riaja	
7		01	04	2,03	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	30.621.000	47.801.000	- 482.000	Kec Tanete Riaja	
7	01	04				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	4.100.000	3.258.400	- 841.600	Kec Tanete Riaja	
7		01	04	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Laporan	4.100.000	3.258.400	(841.600)	Kec Tanete Riaja	
7		01	04	2,03		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	4.100.000	3.258.400	- 482.000	Kec Tanete Riaja	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	4 Evaluasi,1 Laporan	49.290.000	16.220.000	- 33.070.000	Kec Tanete Riaja	
7	1	4	2,01			Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Evaluasi,1 Laporan	49.290.000	16.220.000	(33.070.000)	Kec Tanete Riaja	
7		1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Evaluasi	21.000.000	16.220.000	(4.780.000)	Kec Tanete Riaja	
7		1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	28.290.000	-	(28.290.000)	Kec Tanete Riaja	
KECAMATAN BALUSU															
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Balusu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Balusu	100%	2.628.024.986	2.398.805.770	229.219.216		
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL					

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
X	XX	1	2,02			Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.194.120.986	2.034.218.726	159.902.260	
X	XX	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/bln	2.194.120.986	2.034.218.726	159.902.260	Kec Balusu
X	XX	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	54.714.000	-	54.714.000	
X	XX	01	2,05	11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Kecamatan/Kelurahan Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	54.714.000	-	54.714.000	Kec Balusu
X	XX	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	171.265.000	198.313.000	(27.048.000)	
X	XX	01	2,06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	1.210.000	1.790.000	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	3.600.000	1.445.000	2.155.000	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan minum pegawai yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	28.450.000	(3.450.000)	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7.500.000	5.636.500	1.863.500	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak yang tersedia selama 1 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	3.960.000	-	3.960.000	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	1.650.000	13.265.000	(11.615.000)	Kec Balusu
X	XX	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diadakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	126.555.000	148.306.500	21.751.500	Kec Balusu
					Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Dilaksanakan								Kec Balusu	
					Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Dilaksanakan								Kec Balusu	
X	XX	1	2,07	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46 Unit	46.960.000	3.544.000	43.416.000	
X	XX	01	2,08			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	24.560.000		24.560.000	Kec Balusu
X	XX	01	2,08	01		Pengadaan Meubel	Jumlah unit meubel yang tersedia	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	22.400.000	3.544.000	18.856.000	Kec Balusu

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB				
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif							
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan			
1					2		3		4		5		9	10	11	12	13
X	XX	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	112.120.000	115.072.794	(2.952.794)					
X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Pengelola jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laaporan	76.000.000	78.242.250	(2.242.250)	Kec Balusu				
						Jumlah ATK yang tersedia							Kec Balusu				
X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Juman Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2lap	26.520.000	27.230.544	(710.544)	Kec Balusu				
													Kec Balusu				
X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	9.600.000	9.600.000	-	Kec Balusu				
X	XX	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	48.845.000	47.292.000	1.553.000					
X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	32.345.000	37.987.000	(5.642.000)	Kec Balusu				
						Jumlah kendaraan yang dipelihara							Kec Balusu				
						Jumlah Kendaraan Yang Menggunakan Bahan Bakar dan Pelumas							Kec Balusu				
						Jumlah kendaraan operasional yang diganti suku cadangnya							Kec Balusu				
X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 unit	3.000.000	960.000	2.040.000	Kec Balusu				
X	XX	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	6.000.000	2.300.000	3.700.000	Kec Balusu				
X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket bagian gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	7.500.000	6.045.000	1.455.000	Kec Balusu				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	40.423.000	17.163.000	23.260.000					
7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di desa/kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	40.423.000	17.163.000	23.260.000					
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Perencanaan Yaang Tersusun	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan,	37.423.000	17.163.000	20.260.000	Kec Balusu				
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah SOP Kegiatan yang tersusun dan diimplementasikan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dok	3.000.000		3.000.000	Kec Balusu				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
									Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1					2	3	4	5	9	10	11	12	13
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	-	-	-	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP Pelayanan yang tersusun dan diimplementasikan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	-	-	-	Kec Balusu
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	650.442.500	280.571.120	369.871.380	
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dikoordinasikan kegiatan pemberdayaannya	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	2.500.000	2.285.000	215.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang tersusun	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lbg	2.500.000	2.285.000	215.000	Kec Balusu
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	100%	471.500.000	210.053.620	261.446.380	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang tersusun	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 dok	7.500.000	6.194.500	1.305.500	Kec Balusu
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1unit	215.500.000	27.041.620	188.458.380	Kec Balusu
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat kelurahan yang diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ormas	245.500.000	172.957.500	72.542.500	Kec Balusu
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan monev pemerintahan kelurahan yang dilakukan kecamatan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 lap	3.000.000	3.860.000	(860.000)	Kec Balusu
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang mendukung pelaksanaan Pemberdayaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100%	176.442.500	68.232.500	108.210.000	
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lbg	173.942.500	67.042.500	106.900.000	Kec Balusu
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Sentra Usaha Ekonomi Mayarakat Yang Difasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Lap	2.500.000	1.190.000	1.310.000	Kec Balusu
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	3.000.000	2.815.000	185.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	6	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Junlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	5 laporan	3.000.000	2.815.000	185.000		
7	01	06	2,01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	3.000.000	2.815.000	185.000	Kec Balusu	
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	45.279.500	37.975.000	7.304.500		
7	1	5	2,01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase pembinaan wawasan kebangsaaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional	25 orang	45.279.500	37.975.000	7.304.500		
7	01	05	2,01	01		Pembinaan Wawasan kebangsaaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan kebangsaaan dan ketahanan nasional	Pembinaan Wawasan kebangsaaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	45.279.500	37.975.000	7.304.500	Kec Balusu	
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase program ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	31.000.000	14.840.000	16.160.000		
7	1	4	2,01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Laporan	31.000.000	14.840.000	16.160.000		
7	01	04	2,01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terbentuknya satuan tugas penanganan kasus	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Evaluasi	15.000.000	14.840.000	160.000	Kec Balusu	
7	01	04	2,01	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 lap	16.000.000		16.000.000	Kec Balusu	
KECAMATAN SOPPENG RIAJA															
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Camat Soppeng Riaja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Camat Soppeng Riaja	3 Level	3.770.922.428				
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	-	2.889.616.855	-	884.005.573 Kantor Kec. Soppeng Riaja	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	32 Orang	2.708.841.908	2.441.677.981	-	267.163.927	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	32 Orang	2.708.841.908	2.441.677.981	-	267.163.927	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	-	53.155.800	-	-	53.155.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 05	09		Pendidikan dan Pelatihan 7Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan 7Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	53.155.800	-	-	53.155.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		453.104.400	229.872.600		229.872.600	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	01		Penyediaan Kompionen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Penyediaan Kompionen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/penerangan bangunan kantor yang diadakan		5.500.000	-	-	5.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		11.000.000	-	-	11.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	213.672.200	25.384.600	-	188.287.600	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	05		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	3 Paket	13.400.000	7.940.000	-	5.460.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 dokumen	8.400.000	6.780.000	-	1.620.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	2.340.000	11.740.000		9.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	1049 laporan	198.792.200	178.028.000	-	20.764.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.306.000	12.000.000	-	126.306.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		11.307.000	-	-	11.307.000	
7	01	01	2 07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 unit	61.999.000	12.000.000	-	49.999.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	01	2 07	09		Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		65.000.000	-	-	65.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	183.714.320	150.581.274	-	33.133.046	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		26.954.400	-	-	26.954.400	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	40.959.920	22.781.274	-	18.178.646	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.800.000	127.800.000		12.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	233.800.000	55.485.000	-	178.315.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	130.350.000	42.950.000	-	87.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09	05		pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2.350.000		-	2.350.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	17.500.000	4.565.000	-	12.935.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.750.000	7.970.000	-	17.780.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2 09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi saranadan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi saranadan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		57.850.000		-	57.850.000	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelyanan Kecamatan Yang disusun dan Di implementasikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelyanan Kecamatan Yang disusun dan Di implementasikan	100%	67.600.000	62.913.700	-	4.686.300	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2 01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	24.850.000	45.662.200		20.812.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2 01	01		Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan atau instansi vertikal	Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan atau instansi vertikal	8 Laporan	7.500.000	39.906.000		32.406.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	02	2 01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	17.350.000	5.756.200	-	11.593.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2 02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	42.750.000	17.251.500	-	25.498.500	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2 02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	2 dokumen	42.750.000	17.251.500	-	25.498.500	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	768.429.000	476.074.760	-	292.354.240	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	1 01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	7.500.000	3.023.800	-	4.476.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	1 01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	7.500.000	3.023.800	-	4.476.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	701.579.000	250.326.960	-	451.252.040	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	143.879.000	29.375.200	-	114.503.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	345.000.000	90.082.260	-	254.917.740	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas	200.000.000	120.827.000	-	79.173.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	12.700.000	192.500	-	12.507.500	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LANJUTAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	-	9.850.000	-	9.850.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2 03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	4 Lembaga Kemasyarakatan	59.350.000	222.724.000	-	163.374.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	03	2 03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga kemasyarakatan	59.350.000	222.724.000	163.374.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	33.400.000	18.400.000	-	15.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2 01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	33.400.000	18.400.000	-	15.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2 01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasioanal Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasioanal Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 laporan	25.000.000	18.400.000	-	6.600.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2 01	04		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		8.400.000	-	-	8.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	23.500.000	37.762.000	14.262.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
7	01	05	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	1 Keg	23.500.000	37.762.000	14.262.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
7	01	05	2 01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24 orang	23.500.000	37.762.000	14.262.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	7.500.000	2.750.000	-	4.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	06	2 1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	1 keg	7.500.000	2.750.000	-	4.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	06	2 01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	7.500.000	2.750.000	-	4.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
KECAMATAN PUJANANTING															
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	2.531.306.282	2.199.626.452	-	331.679.830	KEC. PUJANANTING
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20jpl					
7	1	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 dok,8 lap	3.104.000	-	-	3.104.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	482.000	-	-	482.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	437.000	-	-	437.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.998.677.822	1.855.695.982	-	142.981.840	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/ bln	1.998.237.822	1.855.695.982	-	142.541.840	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	220.000	-	-	220.000	KEC. PUJANANTING

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	01	2,02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	220.000	-	-	220.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah	1 dok,1 Lap	600.000	-	-	600.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	300.000	-	-	300.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	300.000	-	-	300.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan administrasi Kepegawaian	100%	77.556.000	-	-	77.556.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	77.556.000	-	-	77.556.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	204.529.500	217.305.500	12.776.000		KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.000.000	2.152.000	-	848.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	15.000.000	4.012.000	-	10.988.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	17.252.000	33.900.000	16.648.000		KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.005.000	5.694.500	689.500		KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dok	5.060.000	4.080.000	-	980.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	1.650.000	60.926.000	59.276.000		KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590 kali	157.562.500	106.541.000	-	51.021.500	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	21 unit	79.021.000	-	-	79.021.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	25.000.000	-	-	25.000.000	KEC. PUJANANTING

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	01	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	6.000.000	-	-	6.000.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,07	07		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan	0 unit	48.021.000	-	-	48.021.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	121.915.000	91.019.970	-	30.895.030	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.455.000	14.407.800	-	43.047.200	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	59.660.000	19.612.170	-	40.047.830	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.800.000	57.000.000		52.200.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100%	45.902.960	35.605.000	-	10.297.960	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	25.350.000	21.800.000	-	3.550.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 unit	2.525.310	-	-	2.525.310	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	3.500.000	3.265.000	-	235.000	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 paket	14.527.650	10.040.000	-	4.487.650	KEC. PUJANANTING
7	1	01	2,09	10		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	-	500.000		500.000	KEC. PUJANANTING
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	53.835.000	6.397.000	-	47.438.000	KEC. PUJANANTING
7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	53.035.000	6.397.000	-	46.638.000	KEC. PUJANANTING
7	01	02	2,01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Lap	13.035.000	-	-	13.035.000	KEC. PUJANANTING

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	01	02	2,01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	40.000.000	6.397.000	-	33.603.000	KEC. PUJANANTING
7	01	02	2,02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	800.000	-	-	800.000	KEC. PUJANANTING
7	01	02	2,02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 dokumen	800.000	-	-	800.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	522.886.961	312.302.857	-	210.584.104	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	2.000.000	-	-	2.000.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 lbg	2.000.000	-	-	2.000.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	100%	364.090.361	269.300.857	-	94.789.504	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lbg	8.130.000	-	-	8.130.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	324.960.361	135.609.857	-	189.350.504	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ormas	30.000.000	133.691.000		103.691.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	lap	1.000.000	-	-	1.000.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,03			Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100%	156.796.600	43.002.000	-	113.794.600	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 lbg	102.000.000	43.002.000	-	58.998.000	KEC. PUJANANTING
7	01	03	2,03	04		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Difasilitasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Difasilitasi	0 lembaga	54.796.600	-	-	54.796.600	KEC. PUJANANTING

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	01	2 00			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	3.550.960.207	4.023.714.523	472.754.316	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	1 keg.	2.507.716.207	3.309.023.230	801.307.023	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 ob	2.507.716.207	3.309.023.230	801.307.023	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	1 keg.	29.500.000	-	29.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	29.500.000	-	29.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah Yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah Yang Terlaksana	6 keg.	358.963.500	224.686.300	134.277.200	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000	-	6.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	14.050.000	-	14.050.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	36.840.000	16.190.000	20.650.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	16.623.500	8.497.000	8.126.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dok.	11.250.000	6.720.000	4.530.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.000.000	-	9.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	265.200.000	205.371.428	71.920.700	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	168.510.500	66.837.000	101.673.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2 07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	35.760.500	-	35.760.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	01	2 07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	132.750.000	66.837.000	-	65.913.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 keg.	394.785.000	364.211.743	-	30.573.257	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	35.200.000	35.653.900		453.900	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.000.000	45.957.843		21.957.843	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	13.985.000	-	-	13.985.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	321.600.000	282.600.000	-	39.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 keg.	91.485.000	58.956.250	-	32.528.750	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	57.000.000	52.250.000	-	4.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	13.985.000	6.706.250	-	7.278.750	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2 09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	20.500.000	-	-	20.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	44.000.000	20.055.000	-	23.945.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02	2 01			Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan Kecamatan	2 keg.	36.500.000	20.055.000	-	16.445.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02	2 01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	32.000.000	20.055.000	-	11.945.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
7	1	02	2 01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dok.	4.500.000	-	4.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	02	2 02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	7.500.000	-	7.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	02	2 02	02		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	7.500.000	-	7.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	03	2			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	100%	1.453.694.230	736.669.614	-	717.024.616	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 01			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 keg.	112.500.000	660.000	-	111.840.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	112.500.000	660.000	-	111.840.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	4 keg.	1.145.444.230	557.833.614	-	587.610.616	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	112.500.000	24.204.000	-	88.296.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	816.293.730	423.524.886	-	389.804.716	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 klp.	212.150.500	127.537.400	-	107.485.100	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	4.500.000	2.475.200	-	2.024.800	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan yang dilaksanakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan yang dilaksanakan	5 lembaga	195.750.000	178.176.000	-	17.574.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2 03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga	195.750.000	178.176.000	-	17.574.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
8	1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	- Nilai maturitas SPIP Kesbangpol. - Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	- Nilai maturitas SPIP Kesbangpol. - Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	3,00 20 JPL	2.146.565.934	2.272.144.619	125.578.685	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	1.785.313.450,00	2.101.459.751,00	316.146.301	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.02	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 14 bulan.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN.	20 Orang	1.785.313.450,00	2.101.459.751,00	316.146.301	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi tekhnis terhadap keseluruhan ASN.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi tekhnis terhadap keseluruhan ASN.	100%	85.000.000,00	0,00	-	85.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional Struktural dan Tekhnis.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	0	85.000.000,00	0,00	-	85.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	100%	135.437.784,00	74.580.000,00	-	60.857.784	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	6 Paket	1.600.000,00	1.506.500,00	-	93.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	9 Paket	1.703.000,00	1.703.000,00	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	98 Laporan	132.134.784,00	71.370.500,00	-	60.764.284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	100%	40.000.000,00	0,00	-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan.	0	40.000.000,00	0,00	-	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor.	100%	68.314.700,00	67.784.868,00	-	529.832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Makan Minuma Harian Pegawai, Jumlah Surat yang terkirim, Jumlah Tenaaga Honorer yang terbvayarkan.	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	4 Laporan	50.000.000,00	58.050.000,00		8.050.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
8	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Priodesasi jasa komunikasi, sumber daya air, listrik.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	24 Laporan	18.314.700,00	9.734.868,00	-	8.579.832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	100%	32.500.000,00	28.320.000,00	-	4.180.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya tiap tahunnya, jumlah kendaraan yang terpelihara.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	6 Unit	30.000.000,00	26.820.000,00	-	3.180.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	3 Unit	2.500.000,00	1.500.000,00	-	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan laiinya yang dipelihara/rehabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan laiinya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit	10.000.000,00	0,00	-	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02				Program : Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	Program : Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	100%	50.202.213,00	1.070.586.700,00		1.020.384.487	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01			Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaan.	Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaan.	3 Dokumen	50.202.213,00	1.070.586.700,00		1.020.384.487	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Peserta Orientasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	84 Orang	40.202.213,00	1.064.724.200,00		1.024.521.987	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Peserta Pembumian Nilai-Nilai Pancasila.	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	-	0,00	0,00	0,00	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Rapat Forum Pembauran kebangsaan (FPK).		Jumlah Orang Yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	24 Orang	10.000.000,00	5.862.500,00	-	4.137.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif				PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13	
8	01	03				Program: Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	Program: Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	80%	624.240.000,00	15.265.982.039,00	14.641.742.039,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	8 Dokumen	624.240.000,00	15.265.982.039,00	14.641.742.039	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Parpol yang memperoleh Dana Bantuan Keuangan.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	92100 Orang	573.020.650,00	548.120.268,00	- 24.900.382	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Peserta Forum dialog Parpol dan LSM.			0,00	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Peserta Bintek Parpol.			0,00	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.			0,00	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumla Pemantauan Situasi Politik Daerah.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	4 Laporan	51.219.350,00	14.717.861.771,00	14.666.642.421	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
							Jumlah Pemantauan dan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.			0,00	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04				Program: Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	Program: Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100%	130.612.440,00	37.139.640,00	-93.472.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01			Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokumen	130.612.440,00	37.139.640,00	-93.472.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Kegiatan Tim peneliti lapangan orkemas.	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	48 Orang	90.612.440,00	5.500.000,00	-85.112.440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Ormas yang dibina.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8	01	04	2.01	05		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah.	Jumlah Pertemuan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah.	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah.	1 Laporan	40.000.000,00	31.639.640,00	-8.360.360	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05				Program : Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Program : Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100%	121.136.061,00	17.850.500,00	-103.285.561	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01			Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	2 Dokumen	121.136.061,00	17.850.500,00	-103.285.561	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba.	Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	0	40.000.000,00	0,00	-40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidanan Perjudian dan Prostitusi.				0 Orang	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB
										Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
										Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1						2	3	4	5	9	10	11	12	13
8	01	05	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Pertemuan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).	Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	19 Orang	81.136.061,00	17.850.500,00	- 63.285.561	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Tim P4GN yang difasilitasi.				0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06				Program : Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	Program : Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50%	335.477.121	317.032.780	- 18.444.341	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	4 Dokumen	335.477.121	317.032.780	- 18.444.341	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Peserta Bintek peningkatan kapasitas pencegahan dan resolusi konflik.	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	0	31.055.821,00	0,00	(31.055.821,0)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Peserta Bintek pengenalan dasar-dasar intelegen.			0	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Pertemuan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	179 Orang	122.872.500,00	145.865.880,00	22.993.380	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Konflik.			0	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023	Pagu Indikatif			PENANGGUNGJAWAB	
											Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
											Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1							2	3	4	5	9	10	11	12	13	
8	01	06	2.01	05			Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Inteljejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing yang dilakukan selama setahun.	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Inteljejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Inteljejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	12 Laporan	20.000.000,00	17.493.900,00	-	2.506.100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06			Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Jumlah Pertemuan Tim Foorkopimda.	Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	4 Dokumen	161.548.800,00	153.673.000,00	-	7.875.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH													1.013.052.507.381			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023
berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahunan 2022	Target RKPD Pokok 2023	Target RKPD Perubahan 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,53	72,16	72,16
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,40	6,67	6,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,31	5,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,91	5,91
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp.	47,50	47,08	47,08
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,34	0,34

Sumber : BPS Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas beberapa indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2023, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Rasio Gini, hal ini menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 pada penggalan tahun 2022 dan memperhatikan target indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Target awal yang disajikan dalam RKPD Tahun 2023 merupakan target yang dihitung/diolah dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2022, namun seiring dengan tahapan penyelesaian dokumen RPJMD hingga penetapan terjadi perubahan target, sehingga pada perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dilakukan penyesuaian. Demikian pula pada jumlah Indikator makro Kabupaten Barru dari 9 (Sembilan) menjadi 6 (enam) indikator, hal ini juga menyesuaikan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

6.2 Indikator kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Penetapan Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kabupaten Barru

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok 2023	Target Perubahan RPKD Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,53	72,27	72,27
2	Indeks Pendidikan	65,31	70,28	70,28
3	Indeks Kesehatan	75,92	76,93	76,93
4	Paritas Daya Beli	11,27	11,35	11,35
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena Bencana	0,061	0,009	0,009
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan	0,05	7,25	7,25

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok 2023	Target Perubahan RPKD Tahun 2023
	kebudayaan dari 0 menjadi 12.73 %			
7	Indeks Ketahanan Bencana	0,64	0,72	0,72
8	Persenatse Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	0,083	11,11	11,11
9	Indeks Williamson	0,29	0,28	0,28
10	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	1,95	3,874	3,874
11	Pertumbuhan ekonomi	5,11	5,91	5,91
12	Persentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	50,27	52,52	52,52
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,04	74	74
14	Rasio Gini	0,33	0,34	0,33
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,31	5,31
16	Angka Kemiskinan	8,40	6,67	6,67
17	Nilai Reformasi Birokrasi	50,13	70	70
18	Nilai Sakip	57,34	65	65
19	Indeks Pelayanan Publik	3,96	3,7	3,96
20	Angka Kriminalitas	0,04	6,1	0,04
21	Proporsi Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0,001	0,001	0,001

Sumber : BPS Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas beberapa indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2023, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 pada penggalan tahun 2022 serta memperhatikan target indikator makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Target awal yang disajikan dalam RKPD Tahun 2023 merupakan target yang dihitung/diolah dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2022, namun seiring dengan tahapan penyelesaian dokumen RPJMD hingga penetapan terjadi perubahan target, sehingga pada perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dilakukan penyesuaian. Demikian pula pada jumlah Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru dari 9 (Sembilan) menjadi 21 (dua puluh satu) indikator, hal ini juga menyesuaikan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja kunci ini menggunakan perpaduan IKK pada Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Penetapan Perubahan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023
Kabupaten Barru

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,11	5,91	5,91
2	Laju inflasi (tidak ada)	Poin	6,66	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0
3	PDRB per kapita (rp)	Rp.	47,50	47,08	47,08
4	Rasio Gini	Poin	0,33	0,34	0,34
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	8,40	6,67	6,67
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,53	72,16	72,16
7	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,61	13,62	13,62
8	Angka rata-rata lama sekolah	%	8,25	8,77	8,77
9	Angka usia harapan hidup	%	69,35	69,06	69,35
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,02	0,02
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,36	57,92	62,36
12	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,32	5,31	5,31
13	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,93	11,85	11,85
15	Opini BPK		WTP	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (tidak ada)	%	93,20	92,72	93,20
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	NA	14,54	14,54

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
18	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	NA	7,29	7,29
19	Produksi sektor pertanian				
20	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	NA	1,41	1,41
21	Produksi sektor perkebunan				
22	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	%	NA	98,24	98,24
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	NA	1,04	1,04
24	Pertumbuhan Industri	%	NA	11	11
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka kriminalitas yang tertangani	%	0,04	6,5	0,04
2	Rasio ketergantungan	%	49,10	51,79	51,79
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan				
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	74,14	93,05	93,05
1. 2	Angka Partisipasi Kasar				
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	103,23	106,6	106,6
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	91,41	108,63	108,63
1,3	Angka Partisipasi Murni				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	99,39	95,37	95,37
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,21	94,5	94,5
1,4	Angka partisipasi sekolah				
1.4.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	99,38	100	100
1.4.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	94,01	100	100
1,5	Angka Putus Sekolah:				

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,52	0	0
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,90	0	0
1,6	AngkaKelulusan:				
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,63	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,82	100	100
1,7	Angka Melanjutkan				
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,29	100	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	100	100
1,8	Fasilitas Pendidikan:				
1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,24	96,39	96,39
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55,56	56,26	56,26
1.8.3	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	99,50	104,99	104,99
1.8.4	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	38,24	57,18	57,18
1,9	Rasio guru/murid				
1.9.1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)	%	664,98	1040,9	1040,9
1.9.2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)	%	1.434,29	713,48	713,48
1.10	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	89,17	99,31	99,31
1,11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	90,02	100
2	Kesehatan				
2,1	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	%	15	1,75	1,75
2,2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	99.60	100	100
2,3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	1	0,19	0,19
2,4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	15	1,24	1,24
2,5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	67	47	47

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
2,6	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0,28	0,28	0,28
2,7	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	%	0,43	0,45	0,45
2,8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	175,4	100	100
2,9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,40	100	100
2,1	Persentase Balita Gizi buruk	%	0.03	0,04	0,03
2,11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
2,12	Cakupan kunjungan bayi	%	96,86	100	100
2,13	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	88,51	100	100
2,14	Cakupan pelayanan nifas	%	92,84	100	100
2,15	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,47	100	100
2,16	Cakupan pelayanan anak balita		10.216	63,1	63,1
2,17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
2,18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	88,95	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3,1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,59	0,83	0,83
3,2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,36	4,03	4,03
3,3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	59,15	84,01	84,01
3,4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	6,8	1,70	6,8
3,5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	95,49	100
3,6	Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	6,41	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
3,7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	51,67	56,00	56,00
3,8	Rasio Jaringan Irigasi	%	27,90	54,49	54,49
3,9	Presentase penduduk berakses air minum	%	95,75	98,31	98,31
3,1	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,06	0,06	0,06
3,11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	138,97	3,23	3,23
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman				
4,1	Rasio rumah layak huni	%	0,24	0,70	0,70
4,2	Rasio permukiman layak huni	%	0.99	2,79	2,79
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5,1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	%	0,38	0,56	0,56
5,2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	20,75	100	100
5,3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	100
5,4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	15	15
5,3	Penegakan PERDA	%	56,58	100	100
6	Sosial				
6,1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	80	100
6,2	Presentase PMKS yang tertangani	%	100	80	100
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1,1	Angka sengketa pengusaha- pekerja pertahun	Kasus	0,03	0	0
1,2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	1	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1,3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	39	52,8	52,8
1,4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	67	71,07	71,07
1,5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah	Kasus	1	0	0
1,6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	96,73	100
1,7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	52,38	52,38
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	9,85	19,01	19,01
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	21,70	21,70
2,3	Rasio KDRT	%	0	0,33	0
2,4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
2,5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	-	100	100
2,6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	-	100	100
2,7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
	pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				
2,8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100
2,9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
2,1	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
3	Pangan				
3,1	Ketersediaan pangan utama	%	237,980	46,92	46,92
3,2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	77,3	68	77,3
5	Lingkungan Hidup				
5,1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Dokumen	Tidak ada	Ada	Ada
5,2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Dokumen	Tidak ada	Ada	Ada
5,3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Dokumen	Ada	Ada	Ada
5,4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	50,67	62	62
5,5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	92,74	91,84	92,74
5,6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	Poin	70,44	71	71
5,7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	23	7,17	23
5,8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	%	2	100	100
5,9	Terlaksananya pemberian	Penghargaan	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten	ADA	ADA

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
	penghargaan lingkungan hidup				
5,1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak nya di daerah	%	100	100	100
5,11	Timbulan sampah yang ditangani	%	23.671	45,41	45,41
5,12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	36,86	-	-
5,13	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,09	81,63	85,09
5,14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	100	77	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6,1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,98	100	100
6,2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	45	100
6,3	Rasio pasangan berakte nikah	%	50,72	100	100
6,4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Dokumen	Ada	ADA	ADA
6,5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah
6,6	Cakupan Penerbitan KTP	%	98,06	100	100
6,7	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	%	51,44	98,5	98,5
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7,1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100
7,2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan LPM
7,3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	41,70	42,8	42,8
7,4	Presentase LSM Aktif	%	100	100	100
7,5	Presentase LPM Berprestasi	%	35,00	36,49	36,49

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
7,6	Presentase PKK aktif	%	100	100	100
7,7	Presentase Posyandu aktif	%	100	100	100
7,8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30	30
7,9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50	50
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8,1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,52	1,94	1,94
8,2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	47	100	100
8,3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	30,68	30,68
8,4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	-	2	2
8,5	Rasio akseptor KB	%	53,68	70,36	70,36
8,6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,99	72,3	72,3
8,7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,44	1	1,44
8,8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,41	18,13	17,41
8,9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	10,20	15,08	15,08
8,1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	32,44	54,35	54,35

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
8,11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	51,12	48,97	51,12
8,12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	43,06	32,66	43,06
8,13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50,35	35,98	50,35
8,14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100
8,15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	759	976,6	976,6
8,16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100
8,17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	97,77	58,34	97,77
8,18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100
8,19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	10,56	100	100
8,2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100
8,21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
8,22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100
9	Perhubungan				
9,1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	288.282	2.096.196	2.096.196
9,2	Jumlah uji kir angkutan umum	Sertifikat	0	2127	2127
9,3	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	8	11	11
9,4	Presentase layanan Angkutan darat	%	0,04	100	100
9,5	Presentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	NA	42,71	42,71
9,6	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	NA	0,015	0,015
9,7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Ton	189.90 Orang, 96.360 Ton	931.890 Orang, 13.093 Ton	931.890 Orang, 13.093 Ton
9,8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Ton	237.738 Orang, 18.552.717 Ton	1.893.899 Orang, 9.792.798 Ton	1.893.899 Orang, 9.792.798 Ton
10	Komunikasi dan Informasi				
10,1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	NA	32,89	32,89
10,2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA	100	100
10,3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	NA	100	100
10,4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	54,48	54,48
10,5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	NA	54,81	54,81
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11,1	Persentase koperasi aktif	%	63,55	79,89	79,89
11,2	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	NA	95,87	95,87
11,3	Presentase BPR/LKM Aktif	%	71.43	75,14	75,14

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
11,4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,36	99,87	99,87
12	Penanaman Modal				
12,1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	49	124,1209	124,1209
12,2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	424.182.849.592	873.404.546.203	873.404.546.203
12,3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	33	245,13	245,13
12,4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-6,36	17,42077	17,42077
13	Kepemudaan dan Olahraga				
13,1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100
13,2	Presentase wirausaha muda	%	52,77	14,02	14,02
13,3	Cakupan pembinaan olahraga	%	92,86	100	100
13,4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Orang	77,78	7,59	7,59
13,5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	2	2
13,6	Cakupan pembinaan atlet muda	%	68,27	74,58	74,58
13,7	Jumlah Prestasi olahraga	Medali	0	2	2
14	Statistik				
14,2	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	Ada	Ada	Ada
14,3	Buku "PDRB kabupaten"	Buku	Ada	Ada	Ada
15	Persandian				
15,1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2.7	2,7	2,7
16	Kebudayaan				
16,1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	15	10	15
16,2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kawasan	100	84,15	100
16,3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	3	10	10

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
16,4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	15	32	32
17	Perpustakaan				
17,1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	127,693	127.577	127.577
17,2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	59,837	60.697	60.697
17,3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0.29	0,3	0,3
17,4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	855	0,669	0,669
17,5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	12.272	12076	12076
17,6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	2	3
18	Kearsipan				
18,1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	55,00	100	100
18,2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	3	3
III	Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
1,1	Kunjungan wisata	Orang	618,96	63129	63129
1,2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1 Hari	1 Hari
1,3	PAD Sektor Pariwisata	%	0,13	1,01	1,01
2	Pertanian				
2,1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	NA	14,54	14,54
2,2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	NA	7,29	7,29
2,3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	NA	1,43	1,43
2,4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	%	NA	98,24	98,24
2,5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	57,20	54,65	57,20
2,6	Cakupan bina kelompok petani	%	11,24	12,2	12,2

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
5	Perdagangan				
5,1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	NA	107.293.137	107.293.137
5,2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	NA	31,87	31,87
6	Perindustrian				
6,1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	15,00	15,34	15,34
7	Transmigrasi				
7,1	Presentase Transmigran swakarsa	Orang	NA	0	0
8	Kelautan dan Perikanan				
8,1	Produksi perikanan	Rupiah	26.429,87	26.563,42	26.563,42
8,2	Konsumsi ikan	%	100,02	46,52	100,02
8,3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	80	85	85
8,4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	14.640,82	13.058	14.640,82
IV	Urusan Penunjang				
1	Perencanaan Pembangunan				
1,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ADA	ADA	ADA
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100
2	Keuangan				
2,1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
2,2	Persentase SILPA	%	13,18	5,00	5,00
2,3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	13,18	5,00	5,00

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
2,4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	-	0,00	0,00
2,5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	31,55	20,00	20,00
2,6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	18,13	10,00	10,00
2,7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	BTL= 22% BL= 79%	BTL= 50% BL= 50%	BTL= 50% BL= 50%
2,8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10,58	9	9
2,9	Penetapan APBD	Per Tgl/Bln/Thn	30 Desember 2021	30 November 2022	30 November 2022
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
3,1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	26,77	20	20
3,2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	25,10	20	25,10
3,3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	29,02	72	72
3,4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32	29	32
3,5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	980	200	200
3,6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.733	3.345	3.345
4	Penelitian dan Pengembangan				
4,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100
4,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100
4,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	100	100	100
4,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	72,00	100	100
5	Pengawasan				
5,1	Persentase tindak lanjut temuan	%	50,94	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
5,2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,10	0	0
5,3	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	9	9
6	Sekretariat Dewan				
6,1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada
6,2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
6,3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas beberapa indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2023, hal ini menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026. Target awal yang disajikan dalam RKPD Tahun 2023 merupakan target yang dihitung/diolah dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2022, namun seiring dengan tahapan penyelesaian dokumen RPJMD hingga penetapan terjadi perubahan target, sehingga pada perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dilakukan penyesuaian dengan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib

yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan.

SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota diatur melalui Permendagri 100 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui melalui permendagri 59 tahun 2021 yang mengamanatkan 29 indikator yang dibagi dalam 6 urusan yakni:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Uraian	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
I	PENDIDIKAN			
1	pendidikan anak usia dini	74,14	91,55	91,55
2	pendidikan dasar			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,39	94,49	99,39
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	82,21	91,57	91,57
3	pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	100	80,71	100
II	KESEHATAN			
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	97	100	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	93	100	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95	100	100
4	pelayanan kesehatan balita	83	63,1	83
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	89	66,1	89
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	69	59,1	69
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	48	81,1	48
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	65	100	100
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes	94	100	100

No	Uraian	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
10	peayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	88	100	100
11	peayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	102	100	100
12	peayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	91	74,7	91
III	PEKERJAAN UMUM			
	pemenuhan kebutuhan pokok air minum	100	98,31	100
	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	100	95,49	100
IV	PERUMAHAN RAKYAT			
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100%	100%
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	100%	100%
V	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	peayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100%	100%
2	peayanan informasi rawan bencana	100	100%	100%
3	peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100%	100%
4	peayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	100%	100%
VI	SOSIAL			
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%

Sumber : SKPD Pengampu SPM Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tabel 6.5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2023

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,57	BAPPELITBAN GDA	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUTR dan PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMDPPKBPPP A, Bag.Kesra, BAPPELITBAN GDA, Dinas Koperindag
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jiwa	37242	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	100	Dinas Kesehatan	Dinas PUTR dan PERKIM
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	100	Dinas Kesehatan	Dinas PUTR dan PERKIM

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	99,01	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	7	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	293	BPBD	DINAS SOSIAL
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	0	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	210.983.290,00	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	ADA	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	8,29	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	37,28	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	93,41	Dinas Kesehatan	Dinas Ketahanan Pangan
		3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1000 kelahiran hidup	0,67	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1000 kelahiran hidup	4,08	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Per 1000 Orang	0,07	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	18,33	DPMDP2KBP3 A	DPMDP2KBP3 A
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%	0,0041	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	100	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	100	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	103	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%	79,69	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%	95,22	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%	97,09	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	9,09	DPMDP2KBP3 A	DPMDP2KBP3 A
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	13,96	DPMDP2KBP3 A	DPMDP2KBP3 A
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	87,29	DPMDP2KBP3 A	DPMDP2KBP3 A
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Keg	7	DPMDP2KBP3 A	DPMDP2KBP3 A
		6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	100	Dinas PUPR dan PERKIM	Dinas PUPR dan PERKIM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	100	Dinas PUPR dan PERKIM	Dinas PUPR dan PERKIM
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	kk	2450	Dinas PUPR dan PERKIM	Dinas PUPR dan PERKIM
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	80,56	/Dinas Kesehatan	Dinas LH
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Rupiah	50.079.000	BPS	Dinas PMPTSPNaker, DISPARPORA, Dinas Koperasi, UKM & Dag, Dinas Pemuda dan OR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
							dan Ketahanan Pangan
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	51,09	DINAS TENAGA KERJA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	48,32	DINAS TENAGA KERJA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	47,98	DINAS TENAGA KERJA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,31	BPS	DPMPPTSP
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jiwa	544	DISPARPORA	DISPARPORA
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	%	29,5	DISPARPORA	DISPARPORA
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	6,19	BPS	Dinas PMPTSPNaker, DISPARPORA, Dinas Koperasi, UKM & Dag, Dinas Pemuda dan OR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Regulasi	Belum ada	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	37242	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
		11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga	Belum Ada		Dinas PUTR dan PEKIM

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0,01	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	210.983.290,00	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	97,83	Dinas LH	Dinas LH
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Ada	BPBD	BPBD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0,01	BPBD	BPBD & Satpol PP DAMKAR
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	Dinas LH	Dinas LH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0	Kepolisian	Badan Kesbangpol & Satpol PP DAMKAR
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	B	Bag.Organisa si	Bag.Organisa si
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	95,27	Dukcapil	Dukcapil
		16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	2	Diskomista	Diskomista

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	SUMBER DATA/OPD PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Regulasi	Belum Ada	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rupah	1.065.343.412.067	BPS	Bapenda

Sumber : SKPD Pengampu TPB Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas, penentuan target SDGs/TPB Kabupaten Barru tahun 2023 secara umum tidak mengalami perubahan kecuali yang berkaitan dengan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru selain menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 juga memperhatikan target indikator makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun anggaran 2023 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Kabupaten Barru Tahun 2023.

Program Kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 akan menjadi ukuran pencapaian target kinerja bagi Perangkat Daerah, terutama akselerasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target kinerja, harapan dan aspirasi masyarakat. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini juga diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dengan sebaik- baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 ini;
3. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru;

4. Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan KUPA PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2023.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 ini diharapkan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Barru yakni “Kabupaten Barru Yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”.





Bappel Bangda

TAHUN 2023

